



**ARAHAN PENGEMBANGAN WILAYAH KEDUNGSEPUR
MELALUI INTERAKSI KERUANGAN ANTAR KABUPATEN-
KOTA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Geografi

Oleh:

Nur 'Izzatul Hikmah

NIM. 3211416023

**JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 02 Juni 2020

Pembimbing Skripsi



Ariyani Indrayati S.Si., M.Sc
NIP. 197806132005012005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Geografi



Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si

NIP. 196210191988031002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 08 Juni 2020

Penguji I

Dr. Rahma Hayati M.Si.
NIP. 197206241998032003

Penguji II

Drs. Saptono Putro M.Si.
NIP. 196209281990031002

Penguji III

Ariyani Indrayati S.Si., M.Sc.
NIP. 197806132005012005



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Moh. Salehatul Mustofa, M.A
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 02 Juni 2020



Nur 'Izzatul Hikmah
NIM. 3211416023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ *Just believe in Allah* : Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila selesai dari suatu urusan, tetapkanlah bekerja keras untuk urusan lain (QS. Al-Insyirah: 6-7).
- ❖ *Never give up on what you really want to do. The person with big dream is more powerful than the one with all facts* (Albert Einstein).
- ❖ Merantaulah agar kau tau betapa indahnyanya dunia di luar sana selain di rumah dan jangan lupa untuk kembali untuk membawa kesuksesanmu.

PERSEMBAHAN:

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta Ibu Sawen Suryati dan Bapak Ashri Ramadhan Batubara, serta kedua kakakku Saadah Gustin Ayu Pertiwi dan Habib Aulia Rahman Elgani yang senantiasa mendoakan, memotivasi, menyemangati dan memberikan dukungan materiil serta kasih sayang yang teramat besar.
- ❖ Sahabat sekaligus keluargaku BFF Squad : Anggita Fakhira Putri Gultom, Cindy Artika Sari Sinurat, Debora Margareta Simanjuntak, Novi Kumala, Rut Gloria Nabasa Sitorus dan Yullya Maria br. Nababan yang telah mencurahkan segala doa untuk kesuksesanku.
- ❖ Orang yang selalu menemaniku Arif Khoir Mahmud selama aku berkuliah di Universitas Negeri Semarang.
- ❖ Para dosen jurusan geografi atas ilmu yang telah diberikan selama belajar di Universitas Negeri Semarang.
- ❖ Teman-temanku prodi Geografi rombel Internasional 2016 khususnya Lu'lu'il Munawaroh dan Nailul Itsna Afifah.
- ❖ Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Arahan Pengembangan Wilayah Kedungsepur melalui Interaksi Keruangan antar Kabupaten-Kota”. Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi tidak terlepas dari keikutsertaan pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M. Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin dan kesempatan sehingga penelitian ini dapat dilakukan.
3. Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si., selaku Ketua Jurusan Geografi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin, arahan, serta fasilitas sehingga penelitian ini dapat dilakukan.
4. Ariyani Indrayati, S.Si, M.Sc, dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran senantiasa membimbing dan mengarahkan sampai terselesaikannya skripsi ini.
5. Dr. Rahma Hayati M.Si, dosen penguji I yang telah memberikan banyak saran dan masukan yang sangat membangun ketika penulisan proposal skripsi.
6. Drs. Saptono Putro M.Si, dosen penguji II yang telah memberikan banyak saran dan masukan yang sangat membangun ketika penulisan proposal skripsi.

7. Badan Pusat Statistika Kota Semarang dan Jawa Tengah yang telah memberikan data dalam proses pengolahan data Penelitian.
8. Sahabatku yang selalu mendoakanku dalam melakukan proses penelitian.
9. Semua pihak yang membantu dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas kebaikan yang telah diberikan. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Semarang, 02 Juni 2020



Penyusun

SARI

Hikmah, Nur 'Izzatul. 2020. *Arahan Pengembangan Wilayah Kedungsepur melalui Interaksi Keruangan antar Kabupaten – Kota.* Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Ariyani Indrayati, S.Si, M.Sc.

Kata Kunci: Kecenderungan Sektor Basis, Lokasi Potensial, Pengembangan Wilayah

Kedungsepur ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam pengembangannya membutuhkan interaksi keruangan dan penyebaran sektor basis antar Kota-Kabupaten agar tidak terjadi ketimpangan yang berat antara Kota inti yaitu Kota Semarang dengan Kabupaten – Kota *hinterland* yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui sektor yang menjadi basis di masing-masing kabupaten/kota di Kedungsepur, (2) menganalisis konektivitas antar wilayah di Kedungsepur, (3) mengetahui lokasi potensial untuk optimalisasi interaksi keruangan antar wilayah di Kedungsepur. Metode yang digunakan adalah analisis *Location Quotient*, indeks konektivitas, indeks aksesibilitas dan menentukan lokasi menggunakan analisis model Gravitasi dan teori titik henti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sektor basis di Kedungsepur yaitu Kabupaten Kendal: Sektor Industri Pengolahan; Kabupaten Demak: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Sektor Industri Pengolahan; Kabupaten Semarang : Sektor Industri Pengolahan; Kota Salatiga : Sektor Jasa – Jasa; Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih; Kota Semarang: Sektor Konstruksi; dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Kabupaten Grobogan: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Konektivitas wilayah di Kedungsepur menunjukkan bahwa Kedungsepur merupakan wilayah maju dimana Kota Semarang sebagai kota inti menjadi pusat tujuan kabupaten – kota *hinterland* nya yang mengindikasikan konektivitas di Kedungsepur memiliki jaringan yang kuat antar Kabupaten – Kota. Lokasi potensial di Kedungsepur berdasarkan analisis dan hasil perhitungan teori titik henti (*breaking point*) adalah Kabupaten Kendal di Kecamatan Kendal, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan; Kabupaten Demak di perbatasan antara Kecamatan Demak dan Kecamatan Wonosalam; Kabupaten Semarang di Kecamatan Ungaran Barat; Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik; dan Kabupaten Grobogan di Kecamatan Purwodadi.

ABSTRACT

Hikmah, Nur 'Izzatul. 2020. *Recommendation of Kedungsepur Regional Development through Spatial Interaction between Regencies and Cities. Final Project. Department of Geography, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Semarang. Supervisor: Ariyani Indrayati, S.Si, M.Sc.*

Keywords: Base Sector Trends, Potential Locations, Regional Development

Kedungsepur is stipulated in Provinsi Jawa Tengah as the National Activity Center based on RTRW, the development requiring spatial interaction and spreading of the base sector between cities, so that there is no severe imbalance between Semarang City (core city) and hinterland cities: Kendal Regency, Demak Regency, Semarang Regency, Salatiga City and Grobogan Regency. The objectives of this research are: (1) knowing the sectors that are the bases in each regencies / city in Kedungsepur, (2) analyzing connectivity between regions, (3) knowing potential locations for optimizing spatial interactions between regions in Kedungsepur. The method used is the analysis of LQ (Location Quotient) during 2015 - 2019, connectivity index, accessibility index and location determination using Gravity model analysis and breaking point theory.

The results showed that the base sector in Kedungsepur was Kendal Regency: Manufacturing Industry Sector; Demak Regency: Agriculture, Forestry and Fisheries Sector and Manufacturing Industry Sector; Semarang Regency: Processing Industry Sector; Salatiga City: Services Sector; Financial, Real Estate and Corporate Services Sector; and the Electricity, Gas and Water Supply Sector; Semarang City: Construction Sector; and the Transportation and Communication Sector; Grobogan Regency: Agriculture, Forestry and Fisheries Sector; Mining and Quarrying Sector; and the Trade, Hotel and Restaurant Sector. Regional connectivity in Kedungsepur shows that Kedungsepur is an advanced region where Semarang City as the core city is the center of its hinterland destinations which indicates connectivity in Kedungsepur has a strong network between Regencies and Cities. Potential locations in Kedungsepur based on the analysis and calculation results of the breaking point theory are Kendal District in Kendal District, Singorojo District, Boja District and Limbangan District; Demak Regency on the border between Demak District and Wonosalam District; Semarang Regency in Ungaran Barat District; Semarang City in Banyumanik District; and Grobogan Regency in Purwodadi District.

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis	6
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
1.5. Batasan Istilah	7
1.5.1. Arahana Pengembangan	7
1.5.2. Interaksi Kota - Kabupaten	8
1.5.3. Sektor Basis.....	9
1.5.4. Transfer Keruangan	9
1.5.5. Kesempatan Mengintervensi	10
BAB 2	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Deskripsi Teoretis.....	11

2.1.1. <i>Location Quotient (LQ)</i> dalam Menentukan Sektor Basis	11
2.1.2. <i>Spatial Transfer of Ability (SToA)</i> dalam Menganalisis Konektivitas antar Wilayah	14
2.1.3. <i>Intervening Opportunity (IO)</i> dalam Penentuan Lokasi Potensial untuk Optimalisasi Interaksi Keruangan antar Wilayah	17
2.2. Kajian hasil – hasil penelitian yang Relevan	18
2.3. Kerangka Berpikir	25
BAB 3	27
METODE PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan Penelitian	27
3.2. Populasi dan Lokasi Penelitian	27
3.3. Unit Analisis	28
3.4. Variabel Penelitian	28
3.4.1. Ketimpangan Wilayah (<i>Index Williamson (IW)</i>)	29
3.4.2. <i>Regional Complementary (Analisis Location Quotient (LQ))</i>	29
3.4.3. <i>Spatial Transfer of Ability (SToA)</i>	30
3.4.4. <i>Intervening Opportunity (IO)</i>	30
3.5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data	31
3.5.1. Alat Penelitian	31
3.5.2. Teknik Pengumpulan Data	32
3.6. Teknik Analisis Data	33
3.6.1. Ketimpangan Wilayah (<i>Index Williamson (IW)</i>)	33
3.6.2. Menghitung Sektor Basis Kabupaten/Kota di Kedungsepur menggunakan Analisis LQ (<i>Location Quotient</i>)	34
3.6.3. Analisis konektivitas antar Wilayah di Kedungsepur menggunakan Analisis Indeks Konektivitas dan Indeks Aksesibilitas	36
3.6.4. Menentukan Lokasi yang dapat Memberikan Kesempatan Antara (<i>Intervening Opportunity</i>) antar Wilayah di Kedungsepur menggunakan Model Gravitasi dan Teori Titik Henti (<i>Breaking Point</i>).	37
BAB 4	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian (Kedungsepur)	39

4.1.1. Letak Astronomis Kedungsepur	40
4.1.2. Letak Administrasi dan Geografis Kedungsepur	41
4.1.3. Luas Wilayah Kedungsepur	44
4.1.4. Kondisi Fisik Kedungsepur	46
4.1.5. Kondisi Transportasi Kedungsepur	48
4.1.6. Kondisi Kependudukan Kedungsepur	49
4.1.7. Kondisi Perekonomian Kedungsepur	50
4.2. Hasil Penelitian	53
4.2.1. <i>Location Quotient</i> pada Sektor Ekonomi di Kedungsepur	53
4.2.2. Konektivitas antar Wilayah (Kabupaten / Kota) Kedungsepur	66
4.2.3. Interaksi Keruangan antar Wilayah (Kabupaten / Kota) Kedungsepur dalam Menentukan Lokasi Potensial Arah Pengembangan Wilayah	71
4.3. Pembahasan	79
4.3.1. Kecenderungan Sektor yang merupakan Basis Sektor dalam Mewujudkan Peran antar Wilayah Kedungsepur menuju Struktur Perkotaan.	80
4.3.2. Peran Konektivitas Wilayah dalam Transfer Keruangan Sektor Unggulan antar Kabupaten – Kota Kedungsepur	98
4.3.3. Lokasi Potensial untuk Optimalisasi Interaksi Keruangan antar Wilayah di Kedungsepur	104
4.3.4. Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur melalui Interaksi Keruangan antar Kabupaten Kota	107
BAB 5	110
PENUTUP	110
5.1. Simpulan	110
5.2. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	120
Lampiran 1. Hasil Rinci Perhitungan <i>Location Quotient</i> (LQ) Sektoral Kedungsepur	121
Lampiran 2. Jalan Provinsi Jawa Tengah	137
Lampiran 3. Hasil Rinci Perhitungan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi Kedungsepur Tahun 2015 - 2019	138

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	PDRB Per Kapita ADHK 2010 Wilayah Kedungsepur Tahun 2017 dalam Rupiah 4
Tabel 2.1	Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 19
Tabel 3.1	Rincian Pengumpulan Data Sekunder 32
Tabel 3.2	Penafsiran Nilai <i>Location Quotient</i> (LQ)..... 35
Tabel 4.1	Luas Wilayah Kedungsepur Tahun 2020..... 43
Tabel 4.2	Kependudukan Kedungsepur Tahun 2010 dan 2019..... 49
Tabel 4.3	Perhitungan Kesenjangan Wilayah menggunakan Analisis Indeks Williamson (IW) Tahun 2019 51
Tabel 4.4	Hasil Nilai LQ Sektoral di Kabupaten Kendal..... 54
Tabel 4.5	Hasil Nilai LQ Sektoral di Kabupaten Demak..... 56
Tabel 4.6	Hasil Nilai LQ Sektoral di Kabupaten Semarang..... 58
Tabel 4.7	Hasil Nilai LQ Sektoral di Kota Salatiga..... 60
Tabel 4.8	Hasil Nilai LQ Sektoral di Kota Semarang..... 62
Tabel 4.9	Hasil Nilai LQ Sektoral di Kabupaten Grobogan..... 64
Tabel 4.10	Indeks Konektivitas antar Kabupaten – Kota Kedungsepur 66
Tabel 4.11	Klasifikasi Aksesibilitas Kabupaten – Kota Kedungsepur 69
Tabel 4.12	Indeks Aksesibilitas antar Kabupaten – Kota Kedungsepur 69
Tabel 4.13	Klasifikasi Interaksi antar Kabupaten – Kota Kedungsepur 73
Tabel 4.14	Nilai dan klasifikasi interaksi Kabupaten / Kota (<i>hinterland</i>) Kedungsepur terhadap Kota Semarang (kota inti) Tahun 2019 73
Tabel 4.15	Titik Henti Kabupaten – Kota <i>Hinterland</i> di Kedungsepur dari Pusat Kota (Kota Semarang) 76
Tabel 4.16	Kecenderungan Sektor Basis antar Kabupaten – Kota Kedungsepur..... 82
Tabel 4.17	Rata – Rata Presentase PDRB Kedungsepur Tahun 2015 – 2019 (%) 83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 <i>Spatial Transfer of Ability</i>	15
Gambar 2.2 <i>Intervening Opportunity</i>	17
Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian	26
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kedungsepur	44
Gambar 4.2 Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Kedungsepur	52
Gambar 4.3 Peta Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan Kedungsepur	67
Gambar 4.4 Peta Aksesibilitas Kawasan Perkotaan Kedungsepur	70
Gambar 4.5 Peta Interaksi Kawasan <i>Hinterland</i> terhadap Kota Inti Kedungsepur	75
Gambar 4.6 Hasil Analisis Peta Lokasi Potensial Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur	78
Gambar 4.7 Peta Lokasi Potensial Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur.....	106

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Hasil Rinci Perhitungan <i>Location Quotient (LQ)</i> Sektoral Kedungsepur	121
Lampiran 2. Jalan Provinsi Jawa Tengah	137
Lampiran 3. Hasil Rinci Perhitungan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi Kedungsepur Tahun 2015 - 2019	138

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di Kawasan metropolitan naik secara signifikan . Tingginya pertumbuhan penduduk tersebut berhubungan dengan naiknya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan terbentuknya formasi *Extended Metropolitan Region (EMR)* yang dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk dan ekonomi di kota inti yang melebar menuju kawasan di sekelilingnya atau biasa disebut dengan metropolitanisasi. Menguatnya metropolitanisasi dan perlu mendapat perhatian adalah perkembangan antarkota di Pulau Jawa contohnya Jakarta – Bogor – Depok –Tangerang – Bekasi (Jabodetabek) dan Semarang – Surakarta – Yogyakarta (Joglosemar) mengalami pertumbuhan yang pesat (Dharmapatni, 1993; Firman, 1992). Pertumbuhan yang pesat ini menandakan bahwa kota – kota tersebut telah mengalami transformasi struktur wilayah. Menurut McGee (1991) wilayah yang telah mengalami transformasi struktur wilayah yang semula perdesaan di koridor antarkota disebut kotadesasi yaitu perubahan ke arah struktur wilayah non agraris dari yang semula struktur wilayah agraris.

Kotadesasi yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya pulau Jawa memerlukan adanya pengembangan wilayah melalui interaksi keruangan antar Kabupaten-Kota (Bintarto, 1983). Perkembangan tersebut terjadi pada aspek spasial, ekonomi, sosial dan kultural sehingga terjadi transformasi wilayah yang signifikan dari sifat kedesaan menjadi bersifat kekotaan yang

biasa disebut sebagai fenomena metropolitan. Fenomena metropolitan di Indonesia yang juga diatur sebagai Pusat Kegiatan Nasional oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 salah satunya adalah pertumbuhan kawasan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, Purwodadi).

Istilah Kedungsepur merupakan indikasi bahwa kota inti yaitu Kota Semarang dan daerah di sekelilingnya (kawasan *hinterland*) seperti Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga, Purwodadi merupakan *region based urbanization*. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perubahan yang terjadi di Kota Semarang akan berpengaruh terhadap daerah di sekelilingnya. Dewasa ini, Kota Semarang juga memiliki hubungan antara urbanisasi dengan faktor-faktor sosial, ekonomi, demografi, politik atau kebijakan pembangunan kota dan perubahan fisik keruangan di Kedungsepur. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan dalam arahan pengembangan melalui interaksi keruangan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi Kawasan Kedungsepur.

Ketimpangan ekonomi antar kota berakibat buruk pada interaksi keruangan di suatu kawasan perkotaan. Interaksi antar ruang kota perlu ditingkatkan mengingat Pertumbuhan kota di dunia telah mencapai rata rata lebih dari 50 % (*Smart Indonesia Initiatives*, 2015). Kota merupakan satu aspek penting dalam bagian wilayah, hal ini disebabkan perkotaan merupakan suatu tempat yang mendukung tersedianya lapangan pekerjaan

yang sangat luas dan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi sebagai tempat penghubung satu kota ke kota yang lain. Pusat kota di Indonesia biasanya juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Hal ini didukung dengan tingkat aksesibilitas menuju kota sangat mudah untuk dilalui tetapi karena banyaknya urbanisasi menyebabkan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan di Indonesia setiap tahunnya meningkat. Hal lainnya menunjukkan kurang terdapatnya interaksi antara satu wilayah dengan wilayah lain yang menyebabkan terjadinya permasalahan interaksi keruangan antar kabupaten-kota. Salah satu penyebab munculnya berbagai permasalahan perkotaan di Indonesia adalah kurangnya interaksi dalam pengembangan wilayah di dalam ruang antara Wilayah Kota (Kawasan Inti) dan Kabupaten *hinterland* di Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Pemanfaatan perkembangan wilayah perkotaan (metropolitan) sangat dibutuhkan dalam mendukung tersebarnya potensi perkotaan ke wilayah lainnya sehingga memerlukan Arahana pengembangan wilayah melalui interaksi keruangan antar Kabupaten-Kota atau yang biasa disebut dengan metropolitan.

Ruas baru Metropolitan yang telah direncanakan telah ditetapkan dalam RTRW Jawa Tengah, salah satunya adalah Kedungsepur. Kedungsepur meliputi wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan (Purwodadi). Kedungsepur juga merupakan salah satu kawasan perkotaan yang dijadikan kawasan strategis dan sekaligus dijadikan

Pusat Kegiatan Nasional berdasarkan data RTRW Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2029 (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2010). Dimana berdasarkan Perda Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Kedungsepur dijadikan Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Strategi Provinsi, dimana Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi dan Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Tetapi Fakta yang ditemukan adalah bahwa terjadi ketimpangan di wilayah Kedungsepur yang ditunjukkan oleh nilai PDRB per kapita tiap Kabupaten/Kota. Kesejahteraan masyarakat di Kedungsepur akan semakin baik jika PDRB per kapitanya semakin tinggi begitu pula sebaliknya, sehingga kota inti (Kota Semarang) memiliki ketimpangan dengan wilayah di sekelilingnya (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Purwodadi). Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Wilayah Kedungsepur Tahun 2017 dalam Rupiah.

Kabupaten / Kota	PDRB Per Kapita	Persentase (%)
Kabupaten Kendal	28.824.874,82	14,26
Kabupaten Demak	14.498.063,87	7,17
Kabupaten Semarang (Ungaran)	31.084.761,00	15,37
Kota Semarang	69.409.689,79	34,33
Kota Salatiga	45.461.810,85	22,49
Kabupaten Grobogan (Purwodadi)	12.904.456,25	6,38
TOTAL KEDUNGSEPUR	202.183.656,58	100

Sumber : *BPS Jawa Tengah* dalam Sanditia, dkk (2017), diolah 2020.

Kedungsepur yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dalam pengembangannya membutuhkan interaksi keruangan dan penyebaran sektor basis antar Kota-Kabupaten agar tidak terjadi ketimpangan yang berat antara Kota inti yaitu Kota Semarang dengan Kabupaten – Kota *hinterland* nya yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Keruangan antar wilayah Kedungsepur memiliki ketersediaan cadangan lahan yang menjadi potensi dalam arahan pengembangannya. Keuntungan jika terdapat peningkatan pengembangan antar wilayah Kedungsepur bukan hanya lokal dan nasional saja, tetapi juga meliputi aglomeratif, interaktif, dan efektifitas antarkegiatan antarkabupaten/kota yang tergabung dalam interaksi keruangan tersebut (Giyarsih, 2012). Peningkatan interaksi keruangan di Kedungsepur dapat dilakukan melalui interaksi antara Kota inti yaitu Kota Semarang dan Kabupaten / Kota *hinterland* yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga, dan Purwodadi. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Arahan Pengembangan Wilayah Kedungsepur melalui Interaksi Keruangan Antar Kabupaten-Kota”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut.

1. Sektor apakah yang menjadi basis di masing-masing kabupaten/kota di Kedungsepur?
2. Bagaimana konektivitas antar wilayah di Kedungsepur?
3. Dimanakah lokasi potensial untuk optimalisasi interaksi keruangan antar wilayah di Kedungsepur?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Mengetahui sektor yang menjadi basis di masing-masing kabupaten/kota di Kedungsepur.
2. Menganalisis konektivitas antar wilayah di Kedungsepur.
3. Mengetahui lokasi potensial untuk optimalisasi interaksi keruangan antar wilayah di Kedungsepur.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (teoritis) dan praktis, sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dalam segi pengembangan ilmu pengetahuan/akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pustaka ilmiah atau sumbangan ilmu khususnya geografi yang memang berkonsentrasi pada pemahaman keruangan dan bagaimana arahan pengembangan wilayah melalui interaksi

keruangan dapat diterapkan pada suatu wilayah secara optimal, serta dapat menjadi bahan untuk referensi dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Keluaran penelitian ini adalah informasi peningkatan arahan pengembangan antar ruang di Kedungsepur yang dianalisis per Kabupaten/Kota pada wilayah Kedungsepur untuk mengetahui sejauh apa perkembangan antar ruang yang terjadi di Kedungsepur. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dirumuskan arahan pengelolaan dalam pengembangan wilayah Kedungsepur. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan interaksi antar sebagai arahan pengembangan wilayah Kedungsepur melalui interaksi antar Kota-Kabupaten.

1.5. Batasan Istilah

Agar dalam memahami penelitian ini tidak terjadi penyimpangan arti, kesepahaman, cara pandang, dan anggapan, diperlukan batasan istilah dengan penjabaran sebagai berikut.

1.5.1. Arahan Pengembangan

Berdasarkan isi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2002 Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi

ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru. Arahannya pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengembangan kerjasama antar keruangan di wilayah Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi) dalam membentuk kawasan pertumbuhan baru dengan mempertimbangkan kebutuhan antar sektor, seperti sektor ekonomi, sektor sosial, sektor industri berdampak pada berkurangnya ketimpangan antar sektor wilayah di Kedungsepur. Perkembangan wilayah yang maju akan berpengaruh terhadap berkurangnya ketimpangan dan berdampak positif karena wilayah satu dengan lainnya saling mempengaruhi dalam berbagai sektor di Kedungsepur.

1.5.2. Interaksi Kota - Kabupaten

Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, melalui berita yang didengar dan lain-lain (Roucek & R.R, 1963). Interaksi antar Kota Kemarang sebagai Kota Inti (Pusat Pertumbuhan) dengan wilayah di sekitarnya (*hinterland*) yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Purwodadi. Pada penelitian ini ditekankan pada konsep interaksi keruangan antar Kabupaten – Kota di Wilayah Kedungsepur meliputi peningkatan interaksi keruangan antar kota – kabupaten untuk menyelesaikan permasalahan keruangan menggunakan beberapa faktor perhitungan pengembangan kawasan wilayah. Asumsinya adalah semakin tinggi interaksi antar kota – Kabupaten di Wilayah Kedungsepur maka kawasan pengembangan juga semakin baik dalam

memenuhi kebutuhan antar ruang di masing-masing Kota-Kabupaten di Kedungsepur.

1.5.3. Sektor Basis

Sektor basis dapat disebut juga sebagai sektor unggulan. Pengertian sektor basis (sektor unggulan) biasanya terkait dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional (Wijaya, 1996). Sektor pada suatu wilayah berbeda – beda karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda sehingga potensi wilayah yang dapat dijadikan sektor basis (unggulan) juga berbeda. Apabila sektor tersebut menjadi sektor basis (unggulan) sektor tersebut harus mengekspor produknya ke daerah lain, sebaliknya apabila sektor tersebut menjadi sektor non basis (bukan unggulan) sektor tersebut harus mengimpor produk sektor tersebut ke daerah lain Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno, 2007).

1.5.4. Transfer Keruangan

Transfer keruangan merupakan bagaimana manusia dimudahkan dalam proses pemindahan antar ruang (Nugroho, 2014), baik proses pemindahan manusia, gagasan dan informasi atau pun proses pemindahan barang dari ruang satu dan ruang lainnya. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh jarak baik jarak mutlak maupun jarak relatif, biaya transportasi yang

menghubungkan antara satu wilayah dan wilayah lainnya serta sarana dan prasarana penghubung antara wilayah satu dengan lainnya misalnya jumlah kendaraan dan ketersediaan jaringan jalan penghubung. Transfer keruangan di Kedungsepur akan dilakukan dengan memperhitungkan jarak antar satu wilayah dengan wilayah lainnya serta jaringan jalan yang tersedia untuk menghubungkan antar wilayah di Kedungsepur.

1.5.5. Kesempatan Mengintervensi

Kesempatan mengintervensi diartikan sebagai kemungkinan atau kesempatan antara (perantara) yang menghambat timbulnya interaksi antar wilayah (Strodtbeck, 1949). Penelitian ini akan membahas bagaimana kesempatan antara di Kota – Kabupaten di Kedungsepur dapat menimbulkan menghambat timbulnya interaksi antar wilayah di Kabupaten – Kota di Kedungsepur. Misalnya pengaruh Kota besar (Kota Semarang) sebagai ibukota provinsi Jawa tengah mempengaruhi Kota – Kabupaten lainnya (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan) dalam interaksi keruangan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Teoretis

Teori adalah konstruk atau sebuah konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Djamba dan Neuman, 2002). Pengertian teori menurut Kinayati, Djojuroto 2004, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Sedangkan Turner 1986 menyatakan bahwa teori dalam ilmu sosial adalah penjelasan sistematis tentang hukum-hukum dan kenyataan-kenyataan yang dapat diamati, yang berkaitan dengan aspek khusus dari kehidupan manusia (Afid, 2013). Deskripsi teoritis dari penelitian ini akan menjelaskan teori yang dipakai sesuai dengan maksud dan tujuan penulisan, yaitu menghitung nilai *Location Quotient (LQ)*, *Spatial Transfer Ability (SoTA)* dan *Intervening Opportunity (IO)*.

2.1.1. *Location Quotient (LQ)* dalam Menentukan Sektor Basis

Metode LQ untuk mengidentifikasi komoditas unggulan diakomodasi dari (Miller, Gibson, dan Wright, 1991), (Isserman 2001), dan (Hod, 1998) untuk mengetahui kecenderungan sektor basis/unggulan pada suatu wilayah. Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang digunakan

dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk mengetahui sektor kegiatan atau lapangan usaha yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi sektor ekonomi melalui pendekatan perbandingan.

Teori ekonomi basis mengklarifikasikan seluruh kegiatan ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kecenderungan sektor yang menjadi basis pada suatu wilayah. Deliniasi wilayah dilakukan berdasarkan konsep-konsep perwilayahan yaitu konsep homogenitas, nodalitas dan konsep administrasi. Sektor basis merupakan kegiatan suatu masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa ditujukan untuk ekspor ke luar dari lingkungan masyarakat atau yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional (Rusastra, 2002). Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis sangat menentukan dalam pertumbuhan basis suatu wilayah. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan masyarakat yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukkan bagi masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi masyarakat tersebut. Konsep swasembada, mandiri, kesejahteraan dan kualitas hidup sangat menentukan dalam kegiatan non basis ini.

Teknik LQ banyak digunakan untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai *leading sector* suatu kegiatan ekonomi (industri). Praktek penggunaan pendekatan LQ meluas tidak terbatas pada bahasan ekonomi saja akan tetapi juga dimanfaatkan untuk menentukan

sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah berdasarkan potensinya. Studi tentang perubahan peran kacang kedelai dalam sistem pangan di China yang membahas aspek produksi, pengolahan, konsumsi dan perdagangan, salah satu alat analisisnya menggunakan pendekatan LQ (Aubert dan Zhu, 2002). Demikian juga di Indonesia, misalnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan) dalam membahas sistem komoditas kedelai juga menggunakan model LQ ini (CGPRT, 1985).

Berdasarkan pemahaman terhadap teori ekonomi basis, teknik LQ relevan digunakan sebagai metoda dalam menentukan sektor dan komoditas unggulan khususnya dari sisi penawaran (produksi atau populasi). Untuk komoditas yang berbasis lahan seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, perhitungannya didasarkan pada lahan pertanian (areal tanam atau areal panen), produksi atau produktivitas. Sedangkan untuk komoditas pertanian yang tidak berbasis lahan seperti usaha ternak, dasar perhitungannya digunakan jumlah populasi (ekor). Kelebihan dan Keterbatasan Metode LQ Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan demikian halnya dengan metode LQ. Kelebihan metode LQ dalam mengidentifikasi sektor dan komoditas unggulan antara lain penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit (Hendayana, 2003). Penyelesaian analisis cukup dengan spread sheet dari Excel atau program Lotus, bahkan jika datanya tidak terlalu banyak kalkulator pun bisa digunakan. Keterbatasannya adalah

karena demikian sederhananya pendekatan LQ ini, maka yang dituntut adalah akurasi data (Martono, 2008).

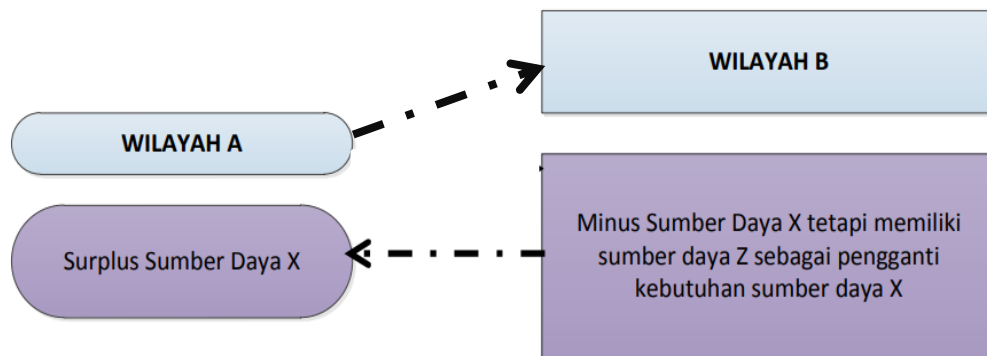
2.1.2. *Spatial Transfer of Ability (SToA)* dalam Menganalisis Konektivitas antar Wilayah

Transfer keruangan merupakan bagaimana manusia dimudahkan dalam proses pemindahan antar ruang (Nugroho, 2014), baik proses pemindahan manusia, gagasan dan informasi atau pun proses pemindahan barang dari ruang satu dan ruang lainnya. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh jarak baik jarak mutlak maupun jarak relatif, biaya transportasi yang menghubungkan antara satu wilayah dan wilayah lainnya serta sarana dan prasarana penghubung antara wilayah satu dengan lainnya misalnya jumlah kendaraan dan ketersediaan jaringan jalan penghubung.

Spatial Transfer of Ability adalah kemudahan pemindahan dalam ruang, baik proses pemindahan manusia, gagasan dan informasi atau pun proses pemindahan barang (Wibowo dan Rahayu, 2017). Faktor ini sangat berhubungan dengan bentuk interaksi ini antara lain:

- a. Jarak mutlak dan relatif antara satu wilayah dan wilayah lainnya (Hanafiah, 1996);
- b. Biaya angkutan atau biaya transportasi yang memindahkan manusia, barang, gagasan dan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya (Prasetio dan Sulistinah, 2016);

- c. Kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antarwilayah, seperti kondisi jalan, relief wilayah yang dilewati, dan jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi (Raharjani, 2005).



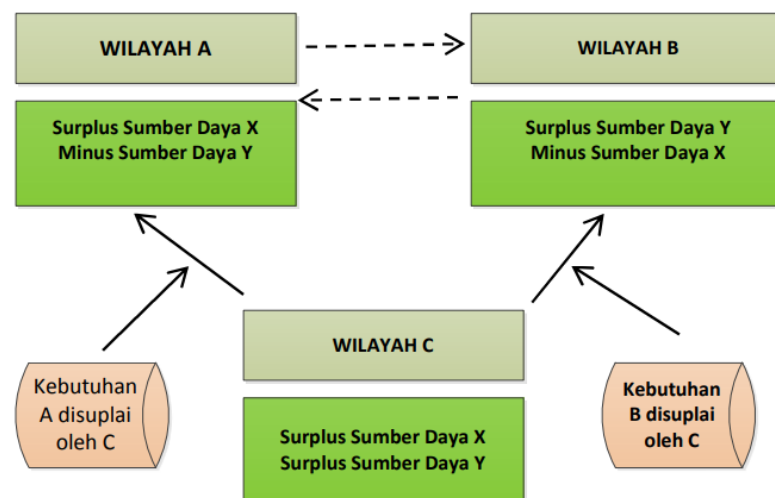
Gambar 2.1 *Spatial Transfer of Ability*
Sumber : (Utami & Kurniawati, 2018)

Jarak mutlak adalah jarak sebenarnya dari dua tempat atau lebih yang ingin kita ketahui kekuatan interaksinya. Misalnya, jarak Bandung-Jakarta adalah 180 km. Jarak relatif lebih ditekankan pada waktu yang dibutuhkan untuk mengadakan perpindahan manusia, barang dan jasa, serta gagasan dan informasi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, jarak relatif dapat diperpendek melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemudahan dan kelancaran prasarana dan sarana transportasi. Contohnya, apabila kita pergi ke Bandung ke Jakarta yang jaraknya 180 km dengan berjalan kaki maka akan memakan waktu sampai berhari-hari. Waktu tersebut dapat diperpendek menjadi sekitar 4,5 jam saja seandainya kita menggunakan kendaraan.

Selain jarak absolut dan relatif, dalam geografi dikenal pula lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut berisi informasi tentang dengan posisi suatu wilayah berdasarkan koordinat garis lintang dan garis bujur yang juga biasa disebut dengan lokasi astronomis. Misalnya wilayah Kota Semarang terletak pada $6^{\circ}50'0''$ LS – $07^{\circ}10'0''$ LS dan $109^{\circ}50'0''$ BT – $110^{\circ}35'0''$ BT. Lokasi relatif adalah posisi suatu wilayah terdapat kondisi wilayah yang ada disekitarnya. Misalnya wilayah Kota Semarang terletak di antara Laut Jawa dan Gunung Ungaran. Lokasi relatif juga dapat didasarkan atas kondisi-kondisi nonfisik. Lokasi relatif suatu tempat akan memberikan gambaran mengenai keterbelakangan perkembangan atau kemajuan wilayah dibandingkan dengan wilayahwilayah lain di sekitarnya. Posisi relatif ini sering pula dinamakan situation. Berdasarkan jenisnya, interaksi keruangan dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu keruangan ekonomi, keruangan politik, keruangan sosial, keruangan manusia dan lingkungan. Dimana interaksi keruangan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu membahas transfer keruangan di Kedungsepur akan dilakukan dengan memperhitungkan jarak relatif dan juga mendeskripsikan jarak absolut antar satu wilayah dengan wilayah lainnya serta jaringan jalan yang tersedia untuk menghubungkan antar wilayah di Kedungsepur.

2.1.3. *Intervening Opportunity (IO)* dalam Penentuan Lokasi Potensial untuk Optimalisasi Interaksi Keruangan antar Wilayah

Kesempatan antara (*intervening opportunity*) dapat diartikan sebagai suatu kemungkinan perantara yang dapat memberikan kesempatan timbulnya interaksi antarwilayah. Berdasarkan Gambar 2.2 sebenarnya secara potensial antara wilayah A dan B sangat mungkin terjalin hubungan timbal balik, sebab wilayah A kelebihan sumber daya X dan kekurangan sumber daya Y, sedangkan keadaan di wilayah B sebaliknya. Namun, karena kebutuhan masing-masing wilayah itu secara langsung telah dipenuhi oleh daerah C maka interaksi antara wilayah A dan B jadi melemah. *Intervening opportunity* dapat pula diartikan sebagai suatu hal atau keadaan yang dapat melemahkan pola interaksi antar wilayah, sebagai akibat adanya alternatif pengganti suatu sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu daerah. Perhatikan Gambar 2.2 melemahnya interaksi keruangan akibat adanya sumber daya alternatif.



Gambar 2.2. *Intervening Opportunity*
Sumber : (Utami & Kurniawati, 2018)

2.2. Kajian hasil – hasil penelitian yang Relevan

Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan kajian interaksi keruangan di Kedungsepur dengan kawasan metropolitan lainnya (Pusat Kegiatan Nasional) di Indonesia. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi (RTRW Jawa Tengah). Dengan tujuan penelitian sebagai berikut (1) Menganalisis kecenderungan sektor yang merupakan basis di masing-masing kabupaten/kota di Kedungsepur (2) Menganalisis konektivitas antar wilayah dengan mempertimbangkan aktivitas manusia di Kedungsepur (3) Mengetahui lokasi potensial untuk optimalisasi interaksi keruangan antar wilayah di Kedungsepur. Penentuan lokasi perkotaan Kedungsepur didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) yang tertulis pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi (Kedungsepur) yang juga didasari pada penelitian penelitian sebelumnya yang relevan untuk dijadikan acuan.

Berikut merupakan perbandingan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya di Kedungsepur dan penelitian lainnya di Indonesia secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan

No	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Perbandingan
1.	Putra Fajar Utama. 2008. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan di Kabupaten /Kota yang Terbagung dalam Kawasan Kedungsepur Tahun 2004-2008 (Artikel) (Utama, 2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis besarnya disparitas antar daerah dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota 2. Menganalisis sektor-sektor yang berpotensi dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, 3. Mengklasifikasi daerah dan sektor-sektor kabupaten / kota di Kedungsepur berdasarkan laju pertumbuhan dan pendapatan perkapitanya/kontribusinya 	Metode analisis sebagai metode penelitian yang digunakan adalah analisis indeks Williamson, <i>Location Quotient</i> (LQ), Shift Share dan Tipologi Klassen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sektor industri pengolahan dan sektor pertanian termasuk sektor yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota di Kedungsepur. 2. Ketimpangan pendapatan antar daerah di Kedungsepur tahun 2004-2008 tergolong rendah (< 0,5) dan cenderung tetap. 3. Untuk mengurangi disparitas pendapatan antar kabupaten/kota adalah menerapkan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada daerah-daerah yang masih relatif tertinggal tanpa mengabaikan daerah-daerah yang sudah maju dan tumbuh pesat. 	Persamaan penelitian yaitu tujuan untuk mengetahui distribusi keruangan serta arahan pengembangannya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tahun penelitian yang akan dilakukan perhitungan serta analisis dimulai dari tahun 2015 - 2019 pembahasannya mengenai interaksi keruangan di Kedungsepur.
2.	Zuswanto. 2014. Analisis Spasial Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kedungsapur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pola pertumbuhan ekonomi keruangan, 2. Mengetahui sektor yang mempengaruhi pola pertumbuhan ekonomi 	Metode analisis yang digunakan adalah analisis Indeks Williamson, Tipologi	Kota Semarang masuk kategori ketimpangan tinggi dengan nilai IW 1,6 atau lebih > 0,5. Sedangkan rata-rata nilai agregat IW kawasan KEDUNGSAPUR periode tahun 2008-2012 sebesar	Persamaan penelitian yaitu tujuan untuk mengetahui distribusi keruangan serta arahan pengembangannya dan kaitannya dengan

	<p>(Kendal, Demak, Ungaran, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Purwodadi) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012</p> <p>(Artikel Skripsi) (Zuswanto, Musyiam 2014)</p>	<p>3. Mengetahui faktor geografis yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Klassen, <i>Location Quotient</i> (LQ) dan analisis komparasi wilayah (Spasial).</p>	<p>0,45 atau lebih kecil < 0,5 dan masuk kategori moderat (cenderung stabil). Sedangkan, pertumbuhan ekonomi yang paling dominan adalah sektor Bangunan 6,75 %, sektor jasa-jasa 6,23 % perdagangan, hotel dan restoran sebesar 6 %, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,78 %, artinya pertumbuhan ekonomi tiap sektor mampu mendorong pertumbuhan dan pembangunan di kabupaten/kota di kawasan KEDUNGSAPUR serta berpotensi untuk dikembangkan dimasa yang akan datang. Untuk hasil Tipology Klassen kabupaten/ kota, Kabupaten Grobogan termasuk daerah realtif tertinggal (Kuadran IV) dan kabupaten/kota yang lain masuk dalam daerah maju tapi tertekan (Kuadran III). Sedangkan (LQ), potensi sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat adalah sektor bangunan dan jasa dan layak dikembanglan dimasa yang akan datang.</p>	<p>kawasan industri baru. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tahun penelitian yang akan dilakukan analisis serta perhitungan dimulai dari tahun 2015 - 2019 pembahasannya mengenai interaksi keruangan di Kedungsepur.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	<p>Primasto Ardi Martono. 2008</p> <p>Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi dan Antar Daerah di Wilayah Kedungsepur</p> <p>(Tesis) (Martono, 2008)</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antar sektor ekonomi dan keterkaitan antar daerah dalam perekonomian wilayah Kedungsepur</p>	<p>Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, dilakukan pengidentifikasian wilayah Kedungsepur yang meliputi: identifikasi karakteristik fisik, kependudukan dan ekonomi.</p>	<p>Sektor Industri merupakan sektor yang paling berperan karena merupakan pemberi input bagi sektor-sektor lainnya.. Sektor Pertanian dan Industri memiliki keterkaitan langsung ke depan yang cukup besar, hal ini mengindikasikan terjadi potensi yang cukup besar bagi pengembangan industri pengolahan hasil pertanian di wilayah Kedungsepur. Keterkaitan antar daerah pada industri pengolahan hasil pertanian tersebut berpeluang terjadi antara Kota Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Keterkaitan antar daerah dalam bidang usaha yang lain yaitu: Keterkaitan antar daerah dalam industri tekstil dan produk tekstil berpeluang terjadi antara Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga, keterkaitan antar daerah dalam industri otomotif dan komponen elektronik berpeluang terjadi</p>	<p>Persamaan penelitian yaitu tujuan untuk mengetahui distribusi keruangan serta arahan pengembangannya dan kaitannya dengan kawasan industri baru. Dan menganalisis beberapa sektor yang menambah laju pertumbuhan di Kedungsepur. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tahun penelitian yang akan dilakukan analisis serta perhitungan dimulai dari tahun 2015 - 2019 pembahasannya mengenai interaksi keruangan di Kedungsepur.</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				antara Kota Semarang dan Kabupaten Kendal.	
4.	<p>Sri Rum Giyarsih. 2012. Koridor Antar Kota Sebagai Penentu Sinergisme Spasial: Kajian Geografi Yang Semakin Penting</p> <p>(Artikel) (Giyarsih, 2012)</p>	<p>1. Memahami dinamika yang terjadi di koridor antarkota sebagai salah satu perekat sinergisme spasial</p> <p>2. Menghubungkan temuan yang diperoleh dengan kajian-kajian terbaru dan penelitian -penelitian mendatang dalam kajian geografi perkotaan</p>	<p>Metode survai, dan dikombinasikan dengan in-depth-interview terhadap berbagai informan kunci dan informan ahli.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub-wilayah dalam koridor dapat memiliki peran dan posisi penting dalam membentuk sinergisme spasial dalam koridor antarkota. 2. Kedekatan intra-regional antar sub-wilayah memiliki pengaruh dalam meningkatnya efisiensi proses produksi. Hal ini juga berdampak pada minimalisasi biaya transportasi. 3. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa beberapa isu-isu lain dalam perkembangan koridor (terutama isu mengenai dampak perubahan iklim terhadap pembangunan wilayah) dapat menjadi topik yang menarik di masa mendatang dalam kajian geografi perkotaan dan studi yang berkaitan. 	<p>Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu perlunya kerjasama melalui interaksi keruangan (spasial) antar wilayah dengan memanfaatkan koridor antar kota. Perbedaan dengan penelitian distribusi keruangan serta arahan pengembangannya dan kaitannya dengan kawasan industri baru serta menganalisis beberapa sektor yang menambah laju pertumbuhan di Kedungsepur pembahasannya mengenai interaksi keruangan di Kedungsepur.</p>
5.	Ariyani Indrayati ,	1. Memprediksi kondisi	Penelitian	Wilayah Metropolitan	Persamaan penelitian

	<p>Nur 'Izzatul Hikmah , Raulendhi Fauzanna.2019. Increasing Reciprocal Linkages between Primary City and Secondary Cities in Kedungsepur Metropolitan</p> <p>(Artikel Prosiding) (Indrayati, dkk, 2019)</p>	<p>spasial berdasarkan dinamika perubahan spasial lahan terbangun Metropolitan Kedungsepur.</p> <p>2. Mengklasifikasi tingkat kesenjangan ekonomi antara kota inti dengan kota-kota sekunder di Metropolitan Kedungsepur.</p> <p>3. Menemukan cara untuk meningkatkan keterkaitan timbal balik antara kota primer dengan kota-kota sekunder di Metropolitan Kedungsepur.</p> <p>4. Merumuskan arahan kebijakan untuk meningkatkan keterkaitan timbal balik antara kota primer dengan kota-kota sekunder di Metropolitan Kedungsepur</p>	<p>menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data berdasarkan ukuran-ukuran yang empiris (dengan menggunakan rumus). Analisis deskripsi digunakan untuk penelitian ini.</p>	<p>Kedungsepur telah terjadi perubahan fisik berupa peningkatan luasan kawasan terbangun (built up area). Perubahan yang paling intensif berada di sepanjang koridor antara kota primer dengan kota-kota sekunder di sekitarnya.</p> <p>Kesenjangan ekonomi ditemukan di Metropolitan Kedungsepur secara keseluruhan adalah moderat. Jika dilihat pada masing-masing daerah ditemukan tiga ketegori kesenjangan. Kategori kesenjangan tinggi ditemukan di Kota Semarang. Kategori kesenjangan moderat ditemukan di di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Kategori kesenjangan rendah ditemukan di Kota Salatiga, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang.</p> <p>Keterkaitan dan hubungan timbal balik antara kota primer dengan kota sekunder, difokuskan pada dua sektor unggulan yaitu sektor bangunan dan sektor</p>	<p>yaitu tujuan untuk mengetahui keterkaitan antar kabupaten – kota di Kedungsepur. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tahun penelitian yang akan dilakukan perhitungan serta analisis dimulai dari tahun 2015 - 2019 pembahasannya mengenai interaksi keruangan di Kedungsepur dengan memberikan arahan pengembangan wilayah di Kedungsepur.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				industri pengolahan. Keterkaitan diimplementasikan dengan mendorong tumbuhnya industri yang menghasilkan barang antara di kota-kota sekunder. Upaya yang lain adalah dengan melengkapi fasilitas di kota-kota sekunder dan memperkuat interaksi keruangan yang dapat meningkatkan perpindahan, baik yang berwujud barang, manusia, komoditas, jasa, informasi dan lain sebagainya.	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber : Data hasil dokumentasi penulis, 2020.

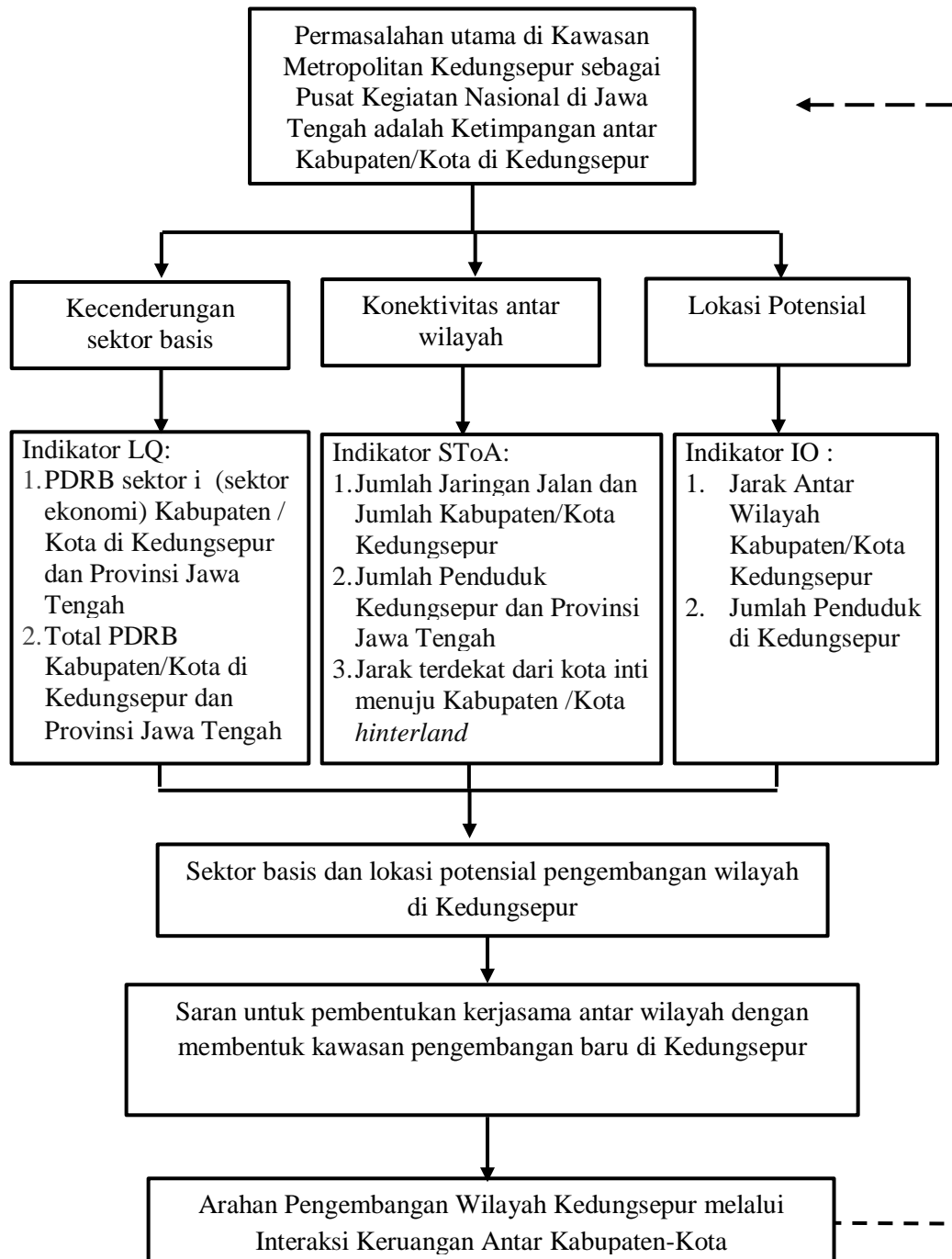
2.3. Kerangka Berpikir

Kajian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan utama dalam pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 yang salah satu kawasannya adalah Kedungsepur. Kedungsepur terdiri dari beberapa Kabupaten Kota di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan (Purwodadi).

Masalah tersebut adalah adanya ketimpangan antar wilayah, dimana Kota Semarang sebagai Kota inti berpengaruh terhadap wilayah di sekitarnya yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan (Purwodadi). Masalah ini dapat diketahui dengan menggunakan analisis perhitungan dengan menghitung ketimpangan wilayah (indeks Williamson) . Perhitungan lainnya yang dibutuhkan adalah *Location Quotient (LQ)*, *Spatial Transfer of Ability (SToA)* dan *Intervening Opportunity (IO)*.

Setelah dilakukan analisis perhitungan maka didapatkan hasil dari analisis kemampuan setiap wilayah dan juga kesempatan mengintervensi antara kota-kabupaten di wilayah Kedungsepur. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui arahan apa saja yang dapat dilakukan untuk pengembangan wilayah kedungsepur melalui interaksi

keruangan antar kabupaten-kota, salah satunya yaitu membentuk kawasan pengembangan baru di Kedungsepur.



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir Penelitian
Sumber : Penulis, 2020

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data sekunder. Penelitian deskriptif (Tika, 2005) merupakan penelitian yang mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada, walaupun terkadang diberikan interpretasi atau analisis. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa angka, untuk selanjutnya dilakukan olah data dan dianalisis guna untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut (Martono, 2010). Dalam penelitian ini arahan pengembangan wilayah Kedungsepur melalui interaksi keruangan dianalisis secara kuantitatif dan deskriptif pada setiap unit analisisnya yaitu kecamatan berdasarkan data sekunder untuk melihat arahan pengembangannya.

3.2. Populasi dan Lokasi Penelitian

Salah satu langkah pengumpulan dan analisa data yang penting dalam suatu penelitian yaitu penentuan populasi penelitian, karena merupakan sumber data penelitian yang disajikan sebagai objek penelitian. Populasi adalah kumpulan dari satuan-satuan elementer yang mempunyai karakteristik dasar yang sama atau dianggap sama. Karakteristik dasar dicerminkan dalam bentuk ukuran-ukuran tertentu (Yunus, 2010). Populasi

pada penelitian ini adalah wilayah dan komponen yang mempengaruhi interaksi keruangan antar wilayah di Kawasan Kedungsepur dengan jumlah 6 kabupaten/kota yaitu Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Grobogan dan Salatiga. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Perkotaan Kedungsepur.

3.3. Unit Analisis

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Unit analisis merupakan suatu penelitian yang dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Dalam penelitian tentang mengenai arahan pengembangan kawasan Kedungsepur ini unit analisisnya adalah Kabupaten – Kota di Kedungsepur dan Wilayah Perkotaan di Kabupaten/Kota Kedungsepur terhadap Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel Penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan (Arikunto, 2006). Variabel pada penelitian ini adalah ketersediaan interaksi keruangan dalam mengarahkan pengembangan wilayah, terdiri atas sebagai berikut.

3.4.1. Ketimpangan Wilayah (*Index Williamson (IW)*)

Analisis ketimpangan wilayah dalam menentukan gambaran umum penelitian di wilayah ini menggunakan Indeks Williamson, dimana data yang dibutuhkan adalah

- PDRB Per kapita Kabupaten / Kota di Kedungsepur;
- PDRB Per kapita rata rata Provinsi Jawa Tengah;
- Jumlah penduduk Kabupaten / Kota di Kedungsepur; dan
- Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah.

3.4.2. *Regional Complementary (Analisis Location Quotient (LQ))*

Menganalisis keberlangsungan sektor digunakan analisis LQ sebagai variabel penentu sektor unggulan yang dapat dihitung sebagai basis di masing-masing kabupaten/kota di Kedungsepur. Untuk menghitung basis sektor unggulan data atau sub-variabel yang dibutuhkan adalah :

- PDRB sektor i wilayah Kabupaten / Kota Kedungsepur di Kedungsepur;
- PDRB sektor i wilayah Kabupaten / Kota Kedungsepur di Provinsi Jawa Tengah;
- Total PDRB sektor i wilayah Kabupaten / Kota Kedungsepur di Kedungsepur; dan
- Total PDRB sektor i wilayah Kabupaten / Kota Kedungsepur di Provinsi Jawa Tengah

3.4.3. *Spatial Transfer of Ability (SToA)*

Untuk meningkatkan transfer keruangan antar wilayah di Kedungsepur menggunakan variabel *Spatial Transfer of Ability* atau kemampuan transfer keruangan. *Spatial Transfer of Ability* memiliki data atau sub-variabel dalam perhitungannya yaitu indeks konektivitas dan indeks aksesibilitas.

Indeks Konektivitas memerlukan data sebagai berikut.

- Jumlah jaringan jalan di Kedungsepur; dan
- Jumlah Kabupaten / Kota yang terhubung di Kedungsepur.

Dan Indeks Aksesibilitas memerlukan data sebagai berikut (Hadi, Joewono dan Santosa, 2013) :

- Jarak terdekat wilayah Kota inti (Kota Semarang) menuju wilayah kota di sekitarnya/*hinterland* (Kedungsepur selain Kota Semarang)
- Rata-rata jarak menuju Kota inti (Kota Semarang).

3.4.4. *Intervening Opportunity (IO)*

Dalam menentukan lokasi yang dapat memberikan kesempatan antara (*intervening opportunity*) sebagai variabel dalam penelitian antar wilayah di Kedungsepur. Sub-variabel dalam penelitian ini membutuhkan data Interaksi antara Kota inti (Kota Semarang) dan Kota *hinterland* (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga dan Purwodadi) yaitu menggunakan model gravitasi dan teori titik henti (*breaking point*):

- Masa wilayah Kota inti (Jumlah penduduk Kota Semarang);

- Masa wilayah Kabupaten / Kota *hinterland* (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga dan Purwodadi)
- Jarak antar wilayah kota inti yaitu Kota Semarang dan Kota *hinterland*
- Konstanta jarak yang dapat dihitung menggunakan model gravitasi berupa pangkat 2.

Sub-variabel lainnya menggugurkan analisis teori titik henti (*breaking point*), data yang dibutuhkan adalah

- Jarak wilayah A dan B (antar wilayah Kabupaten / Kota Kedungsepur);
- Jumlah Penduduk di Kota A (kota inti yaitu Kota Semarang);
- Jumlah penduduk Kabupaten / Kota B (Kabupaten / Kota *hinterland* (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga dan Purwodadi).

3.5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1. Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Laptop, untuk menjalankan *software* dan membuat laporan penelitian.
- b. *Microsoft Office*, digunakan untuk mengolah data.
- c. *Software ArcGIS 10.3*, digunakan untuk membuat peta.
- d. *Google Earth Pro*, digunakan untuk membantu interpretasi lokasi arahan pengembangan kawasan Kedungsepur.

3.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data sekunder yang dikumpulkan dari instansi-instansi terkait, misalnya melalui Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Semarang. Selain itu data juga dikumpulkan melalui BPS lain di Jawa Tengah yang meliputi Kawasan Kedungsepur.

Tabel 3.1 Rincian Pengumpulan Data Sekunder

No.	Tujuan Penelitian	Data	Sumber Data
1.	Mengetahui sektor yang merupakan basis di masing-masing kabupaten/kota di Kedungsepur.	PDRB sektor i wilayah Kabupaten / Kota Kedungsepur di Kedungsepur; PDRB sektor i wilayah Kabupaten / Kota Kedungsepur di Provinsi Jawa Tengah; Total PDRB sektor i wilayah Kabupaten / Kota Kedungsepur di Kedungsepur; dan Total PDRB sektor i wilayah Kabupaten / Kota Kedungsepur di Provinsi Jawa Tengah.	BPS Provinsi Jawa Tengah
2.	Menganalisis konektivitas antar wilayah di Kedungsepur.	Jumlah jaringan jalan di Kedungsepur; Jumlah Kabupaten / Kota yang terhubung di Kedungsepur ; Jarak terdekat wilayah Kota inti (Kota Semarang) menuju wilayah kota di sekitarnya/ <i>hinterland</i> (Kedungsepur selain Kota Semarang) Rata-rata jarak menuju Kota inti (Kota Semarang).	BPS Provinsi Jawa Tengah

3.	Mengetahui lokasi potensial untuk optimalisasi interaksi keruangan antar wilayah di Kedungsepur.	Masa wilayah Kota inti (Jumlah penduduk Kota Semarang); Masa wilayah Kabupaten / Kota <i>hinterland</i> (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga dan Purwodadi) Jarak antar wilayah kota inti yaitu Kota Semarang dan Kota <i>hinterland</i>	BPS Provinsi Jawa Tengah
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Sumber: Data hasil dokumentasi penulis, 2020

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu (1) mengetahui sektor yang merupakan basis di masing-masing kabupaten/kota di Kedungsepur menggunakan analisis LQ (*Location Quotient*), (2) menganalisis konektivitas antar wilayah di Kedungsepur menggunakan analisis indeks konektivitas dan analisis indeks aksesibilitas dan (3) mengetahui lokasi potensial untuk optimalisasi interaksi keruangan antar wilayah di Kedungsepur menggunakan model gravitasi dan teori titik henti (*breaking point*).

3.6.1. Ketimpangan Wilayah (*Index Williamson (IW)*)

Analisis ketimpangan wilayah dalam menentukan gambaran umum penelitian di wilayah ini menggunakan Indeks Williamson.

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 fi/n}}{Y}$$

Keterangan :

IW = Nilai Indeks Williamson

Y_i = PDRB Per kapita Kabupaten / Kota di Kedungsepur

Y = PDRB Per kapita rata-rata Provinsi JawaTengah

f_i = Jumlah penduduk Kabupaten / Kota di Kedungsepur

n = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah

Kriteria Ketimpangan Wilayah (IW) :

$< 0,35$: Ringan

$0,35 - 0,50$: Sedang

$> 0,5$: Berat

Sumber : Muta'ali, 2015

3.6.2. Menghitung Sektor Basis Kabupaten/Kota di Kedungsepur menggunakan Analisis LQ (*Location Quotient*)

Analisis Data Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

- a) *Insert data series* menurut subsektor selama lima tahun terakhir ke dalam *spreadsheet* dengan format kolom dan baris. Kolom diisi nama wilayah dan tahun sedangkan baris diisi sektor ekonomi yang akan dianalisis;
- b) Menghitung PDRB untuk setiap sektor yang ada Kedungsepur;
- c) Menentukan sektor basis dari Sembilan sektor yang ada di Kabupaten / Kota Kedungsepur.

Berikut formulasi nilai LQ (Muta'ali, 2015) yang dapat menentukan sektor basis pada suatu daerah. Dalam penelitian ini akan dihitung sektor i di wilayah Kedungsepur.

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{RV_j/RV}$$

Keterangan :

LQ_{ij} = Indeks Koefisien *Location Quotient* sektor i di Kabupaten/Kota Kedungsepur

X_{ij} = PDRB sektor i di Kabupaten/Kota Kedungsepur

X_i = PDRB sektor i di Provinsi Jawa Tengah

RV_j = Total PDRB di Kabupaten/Kota Kedungsepur

RV = Total PDRB di Provinsi Jawa Tengah

Kriteria Penafsiran Nilai LQ:

Tabel 3.2. Penafsiran Nilai *Location Quotient* (LQ).

Nilai LQ	Penafsiran		
	Sektor Basis/ unggulan / potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
$LQ > 1$	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
$LQ < 1$	Sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak terspesialisasi	Non Eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
$LQ = 1$	Sektor seimbang dengan wlayah acuan	Spesialisasi sama dengan wlayah acuan	Non Eksport, hanya mampu melayani pasar didalam wilayah

Sumber : Muta'ali, 2015

3.6.3. Analisis konektivitas antar Wilayah di Kedungsepur menggunakan Analisis Indeks Konektivitas dan Indeks Aksesibilitas

Untuk mengetahui transfer keruangan antar wilayah dilakukan melalui perhitungan indeks konektivitas dan indeks aksesibilitas pada kawasan strategis Kedungsepur, dapat dianalisis dengan menggunakan indeks konektivitas wilayah dan indeks aksesibilitas. Berikut formulasi K.J Kansky dalam Muta'ali, 2015 untuk analisis data dalam menghitung kemampuan transfer keruangan di Kawasan Kedungsepur.

Indeks Konektivitas (Indeks Beta) :

$$\beta = \frac{e}{v}$$

Keterangan :

β = Indeks Konektivitas (Indeks Beta)

e = Jumlah Jaringan Jalan yang menghubungkan Kabupaten / Kota

v = Jumlah kota dalam satu wilayah.

Dan,

Analisis Indeks Aksesibilitas dihitung sebagai berikut (Hadi, Joewono dan Santosa, 2013) :

$$a = \frac{dij}{dj}$$

Keterangan :

a = Indeks Aksesibilitas

Dij = Jarak terdekat wilayah Kota inti (Kota Semarang) menuju wilayah kota di sekitarnya/*hinterland* (Kedungsepur selain Kota Semarang).

Dj = Rata-rata jarak menuju Kota inti (Kota Semarang).

3.6.4. Menentukan Lokasi yang dapat Memberikan Kesempatan Antara (*Intervening Opportunity*) antar Wilayah di Kedungsepur menggunakan Model Gravitasi dan Teori Titik Henti (*Breaking Point*).

Intervensi sifatnya sebagai kegiatan pengarahan manusia dari suatu daerah ke daerah lain guna berbagai kepentingan. Keterjangkauan sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor interaksi desa dan kota (Harahap dan Purwaningsih, 2018). Analisis perhitungan kesempatan intervensi antar wilayah Kabupaten/Kota di Kedungsepur dapat dilakukan menggunakan perhitungan model gravitasi dan teori titik henti (*breakingpoint*). Berikut formulasi yang dapat digunakan untuk menentukan kesempatan intervensi antar wilayah satu dengan wilayah lainnya di Kabupaten / Kota Kedungsepur.

Model Gravitasi :

$$I_{ij} = \frac{M_1 \times M_2}{(J_{1 \times 2})^2}$$

Keterangan :

I_{ij} = Interaksi antara Kota inti (Kota Semarang) dan Kota Kota *hinterland* (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga dan Purwodadi)

M_1 = Masa wilayah Kota inti (Jumlah penduduk Kota Semarang)

M_2 = Masa wilayah Kabupaten / Kota *hinterland* (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Salatiga dan Purwodadi)

J = Jarak antar wilayah kota inti yaitu Kota Semarang dan Kota *hinterland*

Sumber : Muta'ali, 2015

dan,

analisis Teori Titik Henti (*breaking point theory*) yang dikemukakan oleh William J. Reilly tahun 1931 yang merupakan perbaikan dari model gravitasi, yaitu :

$$D_{AB} = \frac{d_{AB}}{1 + \sqrt{\frac{P_A}{P_B}}}$$

Keterangan :

DAB = Jarak titik henti.

dAB = Jarak wilayah A dan B.

PA = Jumlah penduduk kota A.

PB = Jumlah penduduk kota B.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian (Kedungsepur)

Lokasi penelitian dilakukan di salah satu Kawasan Pusat Kegiatan Nasional / Kawasan Metropolitan yang merupakan Kawasan Perkotaan yaitu Kedungsepur. Kawasan perkotaan inilah yang nanti akan dianalisis dalam upaya memberikan arahan pengembangan wilayahnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kedungsepur, Kawasan ini memiliki Kota Semarang sebagai Kota inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya adalah :

- 1) Kawasan Perkotaan Kendal, Kawasan Perkotaan Kaliwungu, Kawasan Perkotaan Weleri, Kawasan Perkotaan Boja, dan Kawasan Perkotaan Sukorejo di Kabupaten Kendal;
- 2) Kawasan Perkotaan Demak, Kawasan Perkotaan Sayung, dan Kawasan Perkotaan Mranggen di Kabupaten Demak;
- 3) Kawasan Perkotaan Ungaran, Kawasan Perkotaan Bawen, dan Kawasan Perkotaan Ambarawa di Kabupaten Semarang;
- 4) Kawasan Perkotaan Salatiga di Kota Salatiga; dan
- 5) Kawasan Perkotaan Purwodadi dan Kawasan Perkotaan Gubug di Kabupaten Grobogan.

Lingkup wilayah studi meliputi seluruh wilayah Kedungsepur yang terdiri atas:

- 1) Kabupaten Kendal, meliputi 19 kecamatan, 265 desa dan 20 kelurahan.
- 2) Kabupaten Demak, meliputi 14 kecamatan, 247 desa.
- 3) Kabupaten Semarang, meliputi 17 kecamatan, 220 desa dan 15 kelurahan.
- 4) Kota Semarang, meliputi 16 kecamatan, 117 kelurahan
- 5) Kota Salatiga, meliputi 4 kecamatan, 16 kelurahan
- 6) Kabupaten Grobogan, meliputi 19 kecamatan, 280 desa.

4.1.1. Letak Astronomis Kedungsepur

Letak astronomis suatu wilayah merupakan letak suatu daerah atau kawasan yang didasarkan pada garis lintang dan bujur (Suharto, 2009). Secara astronomis Keseluruhan wilayah Kedungsepur (meliputi seluruh wilayah Kabupaten Grobogan) terletak diantara $6^{\circ}42'25,2''$ - $7^{\circ}29'56,4''$ LS dan $109^{\circ}55'19,2''$ - $111^{\circ}14'38,4''$ BT dan wilayah khusus Kawasan Perkotaan Kedungsepur yaitu $6^{\circ}42'25,2''$ - $7^{\circ}29'56,4''$ LS dan $109^{\circ}55'19,2''$ - $111^{\circ}01'12''$ BT dengan rincian letak astronomis yang dapat dilihat pada gambar 4.1 dengan masing-masing wilayah kabupaten/kota Kedungsepur sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Kendal: terletak di antara $6^{\circ}50'34,8''$ - $7^{\circ}12'10,8''$ LS dan $109^{\circ}55'19,2''$ - $110^{\circ}21'57,6''$ BT .

- 2) Kabupaten Demak: terletak di antara $6^{\circ}42'25,2''$ - $7^{\circ}08'16,8''$ LS dan $110^{\circ}27'54,0''$ - $110^{\circ}50'2,4''$ BT.
- 3) Kabupaten Semarang: terletak di antara $7^{\circ}4'37,2''$ - $7^{\circ}29'56,4''$ LS dan $110^{\circ}14'56,4''$ - $110^{\circ}39'43,2''$ BT.
- 4) Kota Salatiga: terletak di antara $7^{\circ}17'60''$ - $7^{\circ}30'00''$ LS dan $110^{\circ}28'1,2''$ - $110^{\circ}32'13,2''$ BT.
- 5) Kota Semarang: terletak di antara $6^{\circ}55'51,60''$ - $7^{\circ}06'54''$ LS dan $110^{\circ}16'8,4''$ - $110^{\circ}30'25,2''$ BT.
- 6) Kabupaten Grobogan: terletak di antara $6^{\circ}55'22,8''$ - $7^{\circ}16'58,8''$ LS dan $110^{\circ}31'58,8''$ - $111^{\circ}14'38,4''$ BT dan Sebagian Kabupaten Grobogan yang termasuk kedalam Kawasan Perkotaan Kedungsepur: terletak di antara $6^{\circ}56'52,8''$ - $7^{\circ}14'45,6''$ LS dan $110^{\circ}31'58,8''$ - $111^{\circ}01'12''$ BT.

4.1.2. Letak Administrasi dan Geografis Kedungsepur

Kedungsepur merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang secara administrasi terletak di bagian utara Provinsi Jawa Tengah yang telah divisualisasikan pada gambar 4.1, dengan batas-batas wilayah berikut ini:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa, Kab. Jepara, Kab. Kudus dan Kab. Pati.
- 2) Sebelah Selatan : Kab. Temanggung, Kab. Boyolali, Kab.Sragen,
Kab. Magelang dan Kab. Wonosobo.
- 3) Sebelah Timur : Kab. Blora.
- 4) Sebelah Barat : Kab. Batang.

Letak administrasi dan Geografis pada masing-masing wilayah kabupaten/kota di Wilayah Kedungsepur adalah sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Kendal: berdasarkan letak geografi, Kabupaten Kendal sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan secara administrasi dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.
- 2) Kabupaten Demak: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa sebagai batas geografis, sebelah timur dengan Kabupaten Kudus, Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang.
- 3) Kabupaten Semarang: berbatasan langsung dengan 8 kabupaten/kota, sebelah utara berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, serta berbatasan dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang di sebelah barat. Selain itu, di tengah-tengah wilayah terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening sebagai batas Geografis.

- 4) Kota Salatiga: letaknya dikelilingi dan dibatasi beberapa desa dari wilayah Kabupaten Semarang. Sedangkan secara geografis lebih tepatnya secara morfologis berada di daerah cekungan, kaki gunung Merbabu, di antara gunung-gunung kecil antara lain: Mungkur, Telomoyo dan Payung Rong.
- 5) Kota Semarang: sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, sebelah timur dengan Kabupaten Demak, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa secara Geografis dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang.
- 6) Kabupaten Grobogan: Secara Geografis, Kabupaten Grobogan terletak di antara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berada di bagian timur. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Grobogan berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Demak di sebelah barat, sebelah utara dengan Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora, di sebelah timur dengan Kabupaten Blora dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi (Jawa Timur), Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Semarang.

4.1.3. Luas Wilayah Kedungsepur

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kedungsepur Tahun 2020.

Kabupaten/Kota	Luas (km ²)	Kedungsepur (%)	Jawa Tengah (%)
1. Kab. Kendal	1.118,13	20,65	3,41
2. Kab. Demak	900,12	16,63	2,74
3. Kab. Semarang	950,21	17,55	2,9
4. Kota Salatiga	57,36	1,06	0,17
5. Kota Semarang	373,78	6,90	1,14
6. Kab. Grobogan	2.013,86	37,20	6,14
Kedungsepur	5.413,46	100	16,5

Sumber: Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober dalam BPS Povinsi Jawa Tengah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1. Kedungsepur memiliki luas wilayah sebesar 5.413,46 km² atau sekitar 16,5% dari total keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dari keenam kabupaten/kota di Kedungsepur, Kabupaten Grobogan merupakan wilayah yang terluas yaitu mencapai 2.013,86 km², atau luasnya sama dengan 37,20% luas Kedungsepur atau 6,14% dari luas Provinsi Jawa Tengah, sedangkan wilayah dengan luas terkecil adalah Kota Salatiga, dengan luas wilayah hanya 57,36 km², atau luasnya sama dengan 1,06% dari luas Kedungsepur dan 0,17% dari luas Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kedungsepur

4.1.4. Kondisi Fisik Kedungsepur

Kondisi fisik Kedungsepur secara umum, meliputi wilayah dataran rendah hingga perbukitan, sebagai akibat dilingkupi oleh beberapa gunung dan pegunungan, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pesisir Utara, membentang dari wilayah Kendal, Kota Semarang ke Demak. Kawasan ini merupakan kawasan pantai yang dibudidayakan sebagai kawasan tambak serta menjadi daerah hilir/muara beberapa sungai besar di Sub Regional Kedungsepur.
- 2) Bagian Selatan, merupakan daerah pegunungan dan dataran tinggi yang sudah tidak aktif lagi, dengan puncaknya yaitu Gunung Ungaran. Daerah ini merupakan daerah yang cukup subur, banyak mata air, hulu sungai, serta tambang mineral;
- 3) Bagian Timur dan Tenggara, terdapat daerah rawan banjir yaitu di daerah Demak.

Karakteristik fisik Kedungsepur dijelaskan dalam kondisi topografi dan kelerengan,

- 1) Kondisi Topografi dan Kelerengan, secara topografi Kedungsepur bagian utara merupakan daerah dataran rendah dan juga berbatasan dengan Laut Jawa, termasuk wilayah Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Demak terletak pada ketinggian antara 0-25 m dan bagian selatan memiliki ketinggian antara 0-2.579 m yang merupakan daerah tanah pegunungan. Sedangkan Kemiringan lereng yang paling dominan di Kedungsepur yaitu kategori datar (0-8%)

terutama pada wilayah bagian utara, dan yang paling kecil adalah kelas kemiringan lereng sangat curam (>40%) hanya sebagian kecil dari luas wilayah dari wilayah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal.

- 2) Kondisi Klimatologi dan Hidrologi, secara umum Kedungsepur beriklim tropis, curah hujan rata-rata tahunan sebesar 3.846,4 mm dan hari hujan rata-rata adalah 124 hari/tahun. Temperatur udara maksimum-minimum Kedungsepur rata-rata 33,7°C dengan temperatur tertinggi pada bulan September dan temperatur terendah pada bulan Juli dan Agustus (22,4°C). Kelembaban nisbi rata-rata mencapai 79% dengan prosentase terbesar pada bulan Desember yang mencapai rata-rata 85%, sedangkan arah angin sebagian besar bergerak dari arah tenggara barat laut dengan kecepatan rata-rata antara 5,90 km per jam. Kondisi hidrologi Kedungsepur memiliki sungai-sungai yang merupakan sumber air di permukaan tanah: Kali Bulawan, Sungai Garang, Sungai Bodri, Sungai Babon, Sungai Jragung, Sungai Tuntang dan Sungai Serang. Adapun sumber-sumber mata air selain sungai, yaitu: Rawa Pening, beberapa mata air dan Waduk Kedung Ombo.
- 3) Kondisi Geologi dan Geomorfologi, sebagian besar daerah dataran rendah di bagian utara Kedungsepur memiliki struktur geologi berupa aluvium yang berasal dari endapan sungai. Sedangkan daerah perbukitan di bagian utara Kedungsepur memiliki susunan batuan

beku yang berasal dari gunung api. Berdasarkan struktur geomorfologinya, sebagian besar kondisi fisiografi Kedungsepur berupa dataran seluas 43,90% yang membentang di sepanjang wilayah Pesisir Kedungsepur dan sebagian wilayah Kabupaten Grobogan. Ada pula fisiografi bukit lipatan seluas 24,40%, volkan dan bukit lipatan 18,98%, dan volkan 12,72% yang sebagian besar berada di bagian selatan Kedungsepur yang merupakan daerah perbukitan. Sehingga untuk jenis tanah Kedungsepur paling dominan adalah Alluvial.

4.1.5. Kondisi Transportasi Kedungsepur

Perkembangan wilayah perkotaan di Wilayah Kedungsepur tidak dapat dilepaskan dari potensi transportasi yang dimiliki, seperti jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan wilayah atau kota-kota besar lainnya di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan wilayah provinsi lain. Sistem angkutan penumpang dan barang di Kedungsepur sebagian besar juga sudah terlayani dan menjangkau sampai ke desa-desa berupa angkutan kota dan desa. Di Kedungsepur terdapat simpul-simpul pergerakan berupa terminal dan sub terminal dimasing-masing kabupaten yang dijadikan sebagai titik awal dalam pergerakan barang dan jasa serta pergantian moda transportasi. Berikut ini prasarana jalan utama Kedungsepur yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Arteri Primer Utama, menghubungkan Kota Semarang-Bawen-Yogyakarta; serta Semarang-Bawen-Solo.

- 2) Jalan Arteri primer bagian utara yang menghubungkan Weleri-Kendal-Semarang-Demak.
- 3) Kolektor Primer, menghubungkan Kota Semarang-Purwodadi; Ambarawa-Banyubiru-Salatiga; Bandungan-Ambarawa; Bergas-Jimbaran-Bandungan-Sumowono ke Temanggung; dan lain lain.
- 4) Jalan Tol Semarang yang menghubungkan jalan Perintis Kemerdekaan-Teuku Umar-Krapyak-Majapahit-Kaligawe (Terminal).

4.1.6. Kondisi Kependudukan Kedungsepur

Tabel 4. 2. Kependudukan Kedungsepur Tahun 2010 dan 2019.

Wilayah Kab/Kota	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk/Tahun (%)	Luas (km ²)	Kepadatan jiwa/km ²
	2010	2019	2010-2019		
1. Kab. Kendal	901,99	971,09	0,85	1.118,13	868
2. Kab. Demak	1057,70	1162,81	1,10	900,12	1292
3. Kab. Semarang	932,70	1053,79	1,44	950,21	1109
4. Kota Salatiga	170,69	194,08	1,52	57,36	3384
5. Kota Semarang	1560,01	1814,11	1,81	373,78	4853
6. Kab. Grobogan	1311,11	1377,79	0,57	2.013,86	684
Kedungsepur	5934,19	6573,66	7,29	5.413,46	12.191

Sumber: BPS, Sensus Penduduk (SP) 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia

2010–2035 dalam Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2020

Berdasarkan Tabel 4.2. Jumlah penduduk di Wilayah Kedungsepur pada tahun 2010 sebanyak 5,93 juta jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2019 bertambah menjadi 6,57 juta jiwa berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2019,

dengan total laju pertumbuhan penduduk sebesar 7,29% dan rata-rata kepadatan penduduk 2.032 jiwa/km² (BPS, 2020).

Wilayah dengan jumlah penduduk, laju pertumbuhan, dan kepadatan penduduk paling tinggi di Wilayah Kedungsepur yaitu di Kota Semarang. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling rendah yaitu Kota Salatiga karena luas wilayahnya yang paling kecil di Kedungsepur dan laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Grobogan karena wilayahnya yang paling luas di Kedungsepur.

4.1.7. Kondisi Perekonomian Kedungsepur

Kedungsepur sebagai salah satu wilayah Pusat Kegiatan Nasional sekaligus suatu kawasan yang memiliki fungsi khusus dalam pengembangan wilayah perkotaan, ternyata menunjukkan kesenjangan dan ketimpangan wilayah antar Kabupaten / Kota. Hal ini dapat dianalisis menggunakan analisis kesenjangan / ketimpangan wilayah melalui perhitungan Indeks Williamson. Kondisi Kesenjangan wilayah di Kedungsepur ini sebesar 0,68 yang termasuk kedalam kriteria kesenjangan berat yang dialami antar Kabupaten-Kota. Dalam menghitung kesenjangan membutuhkan data PDRB dan Jumlah Penduduk di wilayah Kedungsepur. Analisis perhitungan Indeks Williamson mengenai kesenjangan wilayah di Kedungsepur pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.3. dibawah ini.

Tabel 4.3. Perhitungan Kesenjangan Wilayah menggunakan Analisis Indeks Williamson (IW) Tahun 2019.

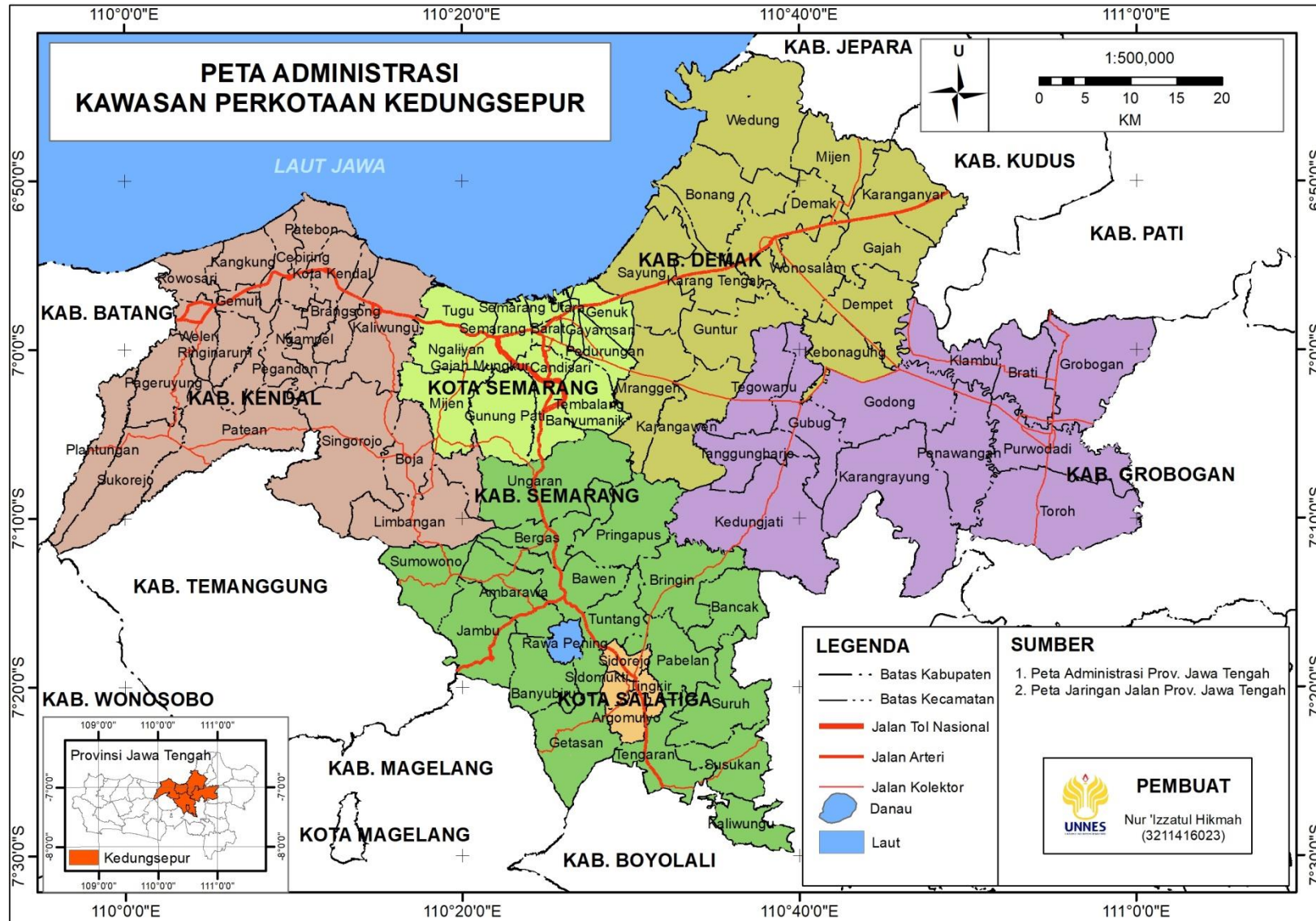
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	PDRB	PDRB/ Kapita	Perhitungan			Hasil
	(fi)	(miliar Rp)	Rp/Tahun (Yi)	(Yi - Y)	(Yi-Y) ²	(fi/n)	
1. Kab. Kendal	971086	30908,49	31828787,56	-5342999	2,85476E+13	0,148	4,21717E+12
2. Kab. Demak	1162805	18417,01	15838433,79	-21333353	4,55112E+14	0,177	8,05041E+13
3. Kab. Semarang	1053786	35747,01	33922456,74	-3249330	1,05581E+13	0,160	1,69252E+12
4. Kota Salatiga	194084	9664,5	49795449,39	12623663	1,59357E+14	0,030	4,70493E+12
5. Kota Semarang	1814110	140326,26	77352674,31	40180888	1,6145E+15	0,276	4,45549E+14
6. Kab. Grobogan	1377788	19692,61	14292917,34	-22878869	5,23443E+14	0,210	1,0971E+14
KEDUNGSEPUR	6573659	254755,88	37171786,52				6,46377E+14
	(n)		(Y)				25423950,5
INDEKS WILLIAMSON (IW)							0,68

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

Keterangan:

Kriteria Kesenjangan Wilayah (IW) :

- < 0,35 : Ringan
- 0,35 – 0,50 : Sedang
- > 0,5 : Berat



Gambar 4.2. Peta Administrasi Kawasan Perkotaan Kedungsepur

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. *Location Quotient* pada Sektor Ekonomi di Kedungsepur

Perhitungan *Location Quotient* (LQ) dilakukan untuk menghitung sektor yang memungkinkan untuk menjadi basis perekonomian pada suatu daerah. Perhitungan LQ dapat digunakan untuk menghitung suatu keunggulan komoditi, sektoral maupun tenaga kerja dengan kriteria penafiran nilai LQ adalah sebagai berikut.

$LQ > 1$ = Sektor basis dan unggulan,

$LQ < 1$ = Sektor non basis dan non unggulan,

$LQ = 1$ = Sektor seimbang dengan wlayah acuan.

Jadi perhitungan LQ dapat diterapkan di berbagai daerah baik untuk menghitung sektor unggulan, komoditi unggulan maupun tenaga kerja unggulan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan perhitungan LQ untuk menghitung sektor unggulan di Kabupaten/Kota Kedungsepur.

Nilai *Location Quotient* (LQ) dihitung menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDRB) berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha yang dihitung selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 hingga tahun 2019 untuk menentukan sektor basis dan non basis. Rincian nilai LQ dalam menentukan sektor basis di setiap daerah di Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan) dapat dilihat pada tabel 4.4. – tabel 4.8. berikut ini.

Tabel 4.4. Hasil Nilai LQ Sektoral di Kabupaten Kendal Tahun 2015 – 2019.

Lapangan Usaha (Sektor)	Nilai LQ					Basis / Non Basis
	2015	2016	2017	2018	2019	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,34	2,36	2,38	2,41	2,49	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	1,57	2,54	2,88	3,00	2,95	Basis
C. Industri Pengolahan	1,40	1,40	1,40	1,42	1,40	Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,57	1,56	1,56	1,56	1,57	Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,99	0,98	0,99	1,00	0,99	Non Basis
F. Konstruksi	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37	Non Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	Non Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,98	0,98	0,99	0,99	0,98	Non Basis
J. Informasi dan Komunikasi	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60	Non Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,04	1,06	1,12	1,20	1,27	Basis
L. Real Estate	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	Non Basis
M,N. Jasa Perusahaan	0,53	0,54	0,53	0,53	0,53	Non Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,65	0,64	0,63	0,63	0,64	Non Basis
P. Jasa Pendidikan	0,81	0,81	0,82	0,81	0,83	Non Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,85	0,84	0,82	0,84	Non Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,92	0,93	0,94	0,94	0,92	Non Basis

Sumber : BPS Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah diolah 2020

Nilai *Location Quotient* (LQ) sektoral di Kabupaten Kendal pada tahun 2015 – 2019 menunjukkan beberapa sektor basis / unggulan dan non basis/ unggulan yang ada di Kabupaten Kendal, dimana sektor yang menjadi unggulan adalah sektor A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; dan K. Jasa Keuangan dan Asuransi. Dimana nilai LQ tertinggi yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 2,40.

Sektor non basis di Kabupaten Kendal atau sektor non unggulan terdiri dari sektor E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; L. Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa lainnya. Dimana nilai LQ terendah yaitu pada sektor Real Estate dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 0,35.

Nilai terendah dan tertinggi dari perhitungan LQ menunjukkan adanya perbedaan unggulan sektor di Kabupaten Kendal. Sektor unggulan dan non unggulan ini dapat dijadikan salah satu arahan pengembangan di Kabupaten Kendal dalam mengurangi ketimpangan atau kesenjangan wilayah di Kabupaten Kendal Kedungsepur.

Tabel 4.5. Hasil Nilai LQ Sektoral di Kabupaten Demak Tahun 2015 – 2019.

Lapangan Usaha (Sektor)	Nilai LQ					Basis / Non Basis
	2015	2016	2017	2018	2019	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,62	2,56	2,60	2,58	2,56	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	1,34	1,17	1,24	1,31	1,25	Basis
C. Industri Pengolahan	0,96	1,00	1,02	1,04	1,04	Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81	Non Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,87	0,88	0,90	0,92	0,93	Non Basis
F. Konstruksi	0,46	0,46	0,45	0,45	0,46	Non Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,13	1,14	1,15	1,16	1,18	Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	0,91	0,92	0,91	0,91	0,90	Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,74	0,73	0,72	0,72	0,73	Non Basis
J. Informasi dan Komunikasi	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36	Non Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,61	0,62	0,61	0,62	0,62	Non Basis
L. Real Estate	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50	Non Basis
M,N. Jasa Perusahaan	0,48	0,48	0,48	0,47	0,48	Non Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,16	1,14	1,13	1,13	1,14	Basis
P. Jasa Pendidikan	1,39	1,39	1,40	1,40	1,44	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99	0,99	0,97	0,96	1,00	Non Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,88	1,88	1,85	1,84	1,86	Basis

Sumber : BPS Kabupaten Demak dan Provinsi Jawa Tengah diolah 2020

Nilai *Location Quotient* (LQ) sektoral di Kabupaten Demak pada tahun 2015 – 2019 menunjukkan beberapa sektor basis / unggulan dan non basis/ unggulan yang ada di Kabupaten Demak, dimana sektor yang menjadi unggulan adalah sektor A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalan; C. Industri Pengolahan; G. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; dan R,S,T,U. Jasa lainnya. Dimana nilai LQ tertinggi yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 2,58.

Sektor non basis di Kabupaten Demak atau sektor non unggulan terdiri dari sektor D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; F. Konstruksi; H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L.Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; dan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Nilai LQ terendah yaitu pada sektor Konstruksi dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 0,46.

Nilai terendah dan tertinggi dari perhitungan LQ menunjukkan adanya perbedaan unggulan sektor di Kabupaten Demak. Sektor unggulan dan non unggulan ini dapat dijadikan salah satu arahan pengembangan di Kabupaten Demak dalam mengurangi ketimpangan atau kesenjangan wilayah Kabupaten Demak di Kedungsepur.

Tabel 4.6. Hasil Nilai LQ Sektoral di Kabupaten Semarang Tahun 2015 – 2019.

Lapangan Usaha (Sektor)	Nilai LQ					Basis / Non Basis
	2015	2016	2017	2018	2019	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,25	1,27	1,27	1,29	1,29	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	0,76	0,68	0,67	0,68	0,66	Non Basis
C. Industri Pengolahan	1,34	1,35	1,34	1,34	1,34	Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,94	0,92	0,89	0,90	0,89	Non Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,92	0,92	0,95	0,96	0,97	Non Basis
F. Konstruksi	0,73	0,73	0,74	0,74	0,73	Non Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,78	0,78	0,79	0,80	0,80	Non Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	Non Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,90	0,89	0,89	0,90	0,92	Non Basis
J. Informasi dan Komunikasi	0,59	0,59	0,61	0,61	0,60	Non Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,89	0,90	0,89	0,89	0,89	Non Basis
L. Real Estate	1,19	1,18	1,18	1,19	1,19	Basis
M,N. Jasa Perusahaan	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	Non Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,91	0,90	0,89	0,91	0,90	Non Basis
P. Jasa Pendidikan	1,18	1,19	1,19	1,18	1,21	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,92	0,93	0,92	0,90	0,93	Non Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,85	0,87	0,90	0,91	0,91	Non Basis

Sumber : BPS Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah diolah 2020

Nilai *Location Quotient* (LQ) sektoral di Kabupaten Semarang pada tahun 2015 – 2019 menunjukkan beberapa sektor basis / unggulan dan non basis/ unggulan yang ada di Kabupaten Semarang, dimana sektor yang menjadi unggulan adalah sektor A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; C. Industri Pengolahan; L.Real Estate; dan P. Jasa Pendidikan. Dimana nilai LQ tertinggi yaitu pada sektor Industri Pengolahan dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 1,34.

Sektor non basis di Kabupaten Semarang atau sektor non unggulan terdiri dari sektor B. Pertambangan dan Penggalian; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, F. Konstruksi; G. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa lainnya. Dimana nilai LQ terendah yaitu pada sektor Informasi dan Komunikasi dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 0,60.

Nilai terendah dan tertinggi dari perhitungan LQ menunjukkan adanya perbedaan unggulan sektor di Kabupaten Semarang. Sektor unggulan dan non unggulan ini dapat dijadikan salah satu arahan pengembangan di Kabupaten Semarang dalam mengurangi ketimpangan atau kesenjangan wilayah Kabupaten Semarang di Kedungsepur.

Tabel 4.7. Hasil Nilai LQ Sektoral di Kota Salatiga Tahun 2015 – 2019.

Lapangan Usaha (Sektor)	Nilai LQ					Basis / Non Basis
	2015	2016	2017	2018	2019	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,53	0,53	0,53	0,55	0,56	Non Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	0,14	0,12	0,12	0,11	0,10	Non Basis
C. Industri Pengolahan	1,04	1,03	1,03	1,02	1,02	Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,69	1,70	1,69	1,67	1,67	Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,98	0,99	0,99	1,00	0,98	Non Basis
F. Konstruksi	0,74	0,75	0,76	0,76	0,76	Non Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,96	0,95	0,97	0,96	0,96	Non Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	1,05	1,03	1,03	1,02	1,02	Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,26	2,27	2,25	2,25	2,27	Basis
J. Informasi dan Komunikasi	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	Non Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,90	0,92	0,91	0,91	0,90	Non Basis
L. Real Estate	1,97	1,97	1,93	1,93	1,90	Basis
M,N. Jasa Perusahaan	2,17	2,19	2,22	2,24	2,26	Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,75	1,73	1,68	1,70	1,72	Basis
P. Jasa Pendidikan	1,54	1,54	1,53	1,51	1,53	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,92	1,94	1,91	1,86	1,91	Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,71	0,72	0,72	0,73	0,73	Non Basis

Sumber : BPS Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah diolah 2020

Nilai *Location Quotient* (LQ) sektoral di Kota Salatiga pada tahun 2015 – 2019 menunjukkan beberapa sektor basis / unggulan dan non basis/ unggulan yang ada di Kota Salatiga, dimana sektor yang menjadi unggulan adalah sektor C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; L.Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; dan Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Dimana nilai LQ tertinggi yaitu pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 2,26.

Sektor non basis di Kota Salatiga atau sektor non unggulan terdiri dari sektor A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalan; E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; dan R,S,T,U. Jasa lainnya. Dimana nilai LQ terendah yaitu pada sektor Pertambangan dan Penggalan dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 0,12.

Nilai terendah dan tertinggi dari perhitungan LQ menunjukkan adanya perbedaan unggulan sektor di Kota Salatiga. Sektor unggulan dan non unggulan ini dapat dijadikan salah satu arahan pengembangan di Kota Salatiga dalam mengurangi ketimpangan atau kesenjangan wilayah Kota Salatiga di Kedungsepur.

Tabel 4.8. Hasil Nilai LQ Sektoral di Kota Semarang Tahun 2015 – 2019.

Lapangan Usaha (Sektor)	Nilai LQ					Basis / Non Basis
	2015	2016	2017	2018	2019	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Non Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	0,56	0,45	0,38	0,34	0,36	Non Basis
C. Industri Pengolahan	0,91	0,90	0,90	0,89	0,90	Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91	Non Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,11	1,11	1,09	1,08	1,08	Basis
F. Konstruksi	1,41	1,41	1,40	1,40	1,39	Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00	Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,94	0,94	0,93	0,91	Non Basis
J. Informasi dan Komunikasi	1,41	1,41	1,39	1,38	1,38	Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	1,06	1,05	1,04	1,02	Basis
L. Real Estate	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12	Basis
M,N. Jasa Perusahaan	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18	Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,01	1,02	1,03	1,03	1,02	Basis
P. Jasa Pendidikan	0,82	0,82	0,82	0,83	0,81	Non Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,95	0,96	0,98	0,95	Non Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80	Non Basis

Sumber : BPS Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah diolah 2020

Nilai *Location Quotient* (LQ) sektoral di Kota Semarang pada tahun 2015 – 2019 menunjukkan beberapa sektor basis / unggulan dan non basis/ unggulan yang ada di Kota Semarang, dimana sektor yang menjadi unggulan adalah sektor E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H. Transportasi dan Pergudangan; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L.Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; dan O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dimana nilai LQ tertinggi yaitu pada sektor Informasi dan Komunikasi dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 1,39.

Sektor non basis di Kota Semarang atau sektor non unggulan terdiri dari sektor A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa lainnya. Dimana nilai LQ terendah yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 0,10.

Nilai terendah dan tertinggi dari perhitungan LQ menunjukkan adanya perbedaan unggulan sektor di Kota Semarang yang dapat dijadikan salah satu arahan pengembangan di Kota Semarang dalam mengurangi ketimpangan wilayah Kabupaten Demak di Kedungsepur.

Tabel 4.9. Hasil Nilai LQ Sektoral di Kabupaten Grobogan Tahun 2015 – 2019.

Lapangan Usaha (Sektor)	Nilai LQ					Basis / Non Basis
	2015	2016	2017	2018	2019	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,31	3,36	3,37	3,36	3,32	Basis
B. Pertambangan dan Penggalian	3,68	3,27	3,17	3,26	3,33	Basis
C. Industri Pengolahan	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	Non Basis
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	Non Basis
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58	Non Basis
F. Konstruksi	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	Non Basis
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,44	1,44	1,45	1,46	1,49	Basis
H. Transportasi dan Pergudangan	1,54	1,58	1,58	1,58	1,60	Basis
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,30	1,29	1,30	1,32	1,37	Basis
J. Informasi dan Komunikasi	0,42	0,42	0,43	0,45	0,45	Non Basis
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,02	1,04	1,04	1,04	1,05	Basis
L. Real Estate	0,88	0,87	0,86	0,85	0,87	Non Basis
M,N. Jasa Perusahaan	0,50	0,49	0,48	0,48	0,49	Non Basis
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,12	1,12	1,11	1,10	1,11	Basis
P. Jasa Pendidikan	1,59	1,58	1,55	1,53	1,57	Basis
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,30	1,28	1,27	1,25	1,29	Basis
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,01	2,01	2,01	2,01	2,04	Basis

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan dan Provinsi Jawa Tengah diolah 2020

Nilai *Location Quotient* (LQ) sektoral di Kabupaten Grobogan pada tahun 2015 – 2019 menunjukkan beberapa sektor basis / unggulan dan non basis/ unggulan yang ada di Kabupaten Grobogan, dimana sektor yang menjadi unggulan adalah sektor A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; G. Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa lainnya. Dimana nilai LQ tertinggi yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Pertambangan dan Penggalian dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 3,34.

Sektor non basis di Kabupaten Grobogan atau sektor non unggulan terdiri dari sektor C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; F. Konstruksi; J. Informasi dan Komunikasi; L.Real Estate; dan M,N. Jasa Perusahaan. Dimana nilai LQ terendah yaitu pada sektor Konstruksi dengan rata – rata nilai LQ selama lima tahun terakhir sebesar 0,30.

Nilai dari perhitungan LQ menunjukkan adanya perbedaan unggulan sektor di Kabupaten Grobogan yang dapat dijadikan salah satu arahan pengembangan di Kabupaten Grobogan.

4.2.2. Konektivitas antar Wilayah (Kabupaten / Kota) Kedungsepur

a. Konektivitas antar Wilayah Kedungsepur

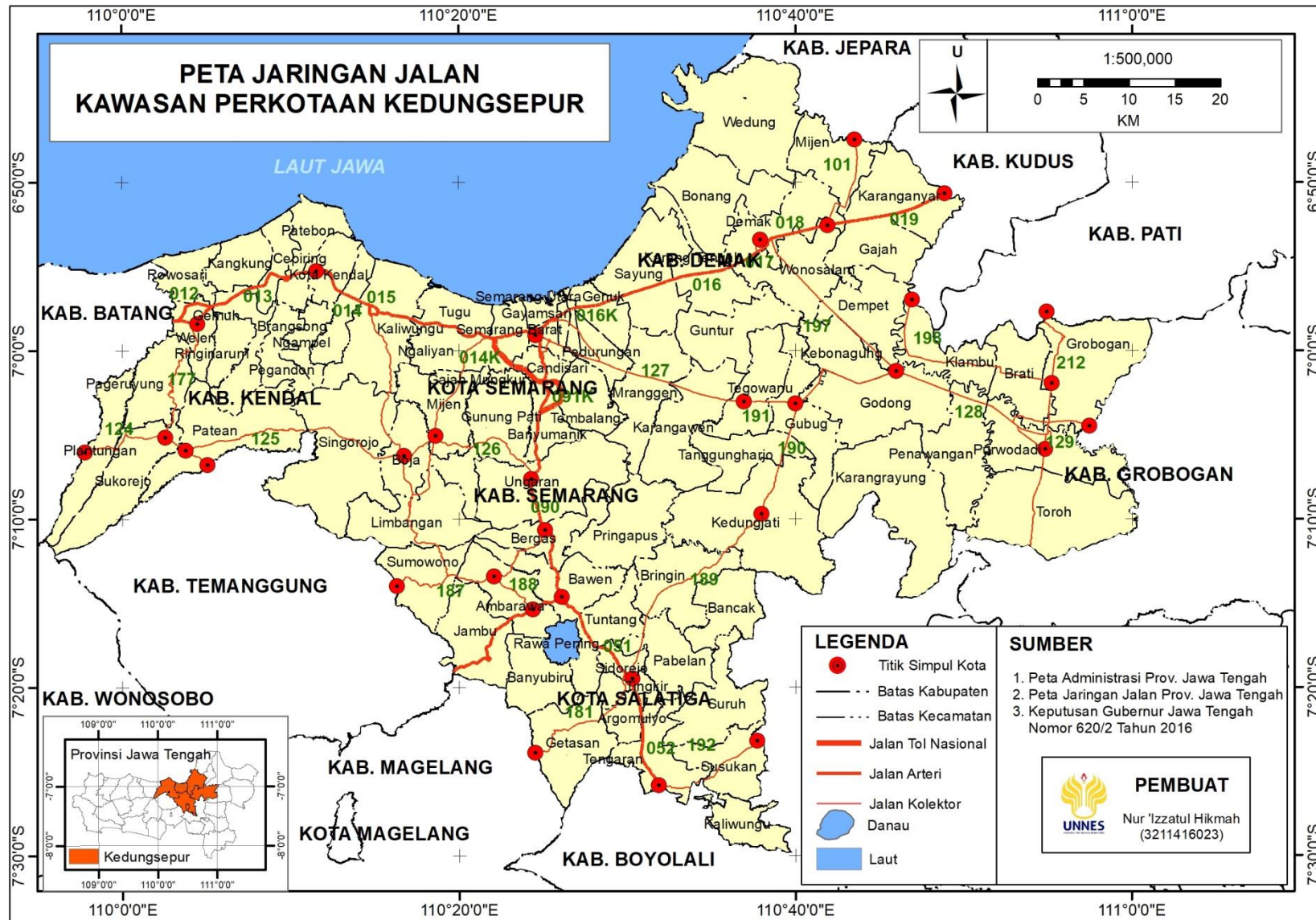
Konektivitas Kabupaten – Kota di Kedungsepur ditinjau melalui struktur jaringan jalan sebagai prasarana transportasi, terdapat teori grafik yang membandingkan jumlah Kota atau Kabupaten yang memiliki banyak rute jalan sebagai prasarana penghubung kota-kota tersebut (Fuady, dkk, 2015). Adanya rute jalan sebagai sarana dapat mengoptimalkan interaksi (konektivitas) antar wilayah (Febrianto, dkk, 2017). Perhitungan konektivitas antar Kabupaten – Kota di Kedungsepur ini menggunakan Peta Jaringan jalan yang Provinsi Jawa Tengah terdapat pada gambar 4.3.

Konektivitas antar wilayah Kabupaten – Kota di Kedungsepur ini dinyatakan menggunakan indeks konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin banyak jaringan jalan terhubung antar kabupaten – kota. Kriteria nilai indeks Beta adalah jika $\beta > 1$ maka menunjukkan *advanced economies* (wilayah maju), sedangkan jika nilai $\beta < 1$ maka menunjukkan *backward economies* (wilayah terbelakang dan belum berkembang). Nilai indeks konektivitas (β) di Kedungsepur sebagai berikut:

Tabel 4.10. Indeks Konektivitas antar Kabupaten – Kota Kedungsepur.

No.	Kabupaten / Kota	e	v	Konektivitas	Klasifikasi Wilayah
1.	Kabupaten Kendal	9	7	1,29	Maju
2.	Kabupaten Demak	5	5	1,00	Maju
3.	Kabupaten Semarang	11	9	1,22	Maju
4.	Kota Salatiga	4	1	4,00	Maju
5.	Kota Semarang	6	2	3,00	Maju
6.	Kabupaten Grobogan	9	8	1,13	Maju
Total		44	32	1,38	Maju

Sumber : Analisis Peta Jaringan Jalan Kedungsepur (diolah, 2020)



Gambar 4. 3. Peta Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan Kedungsepur

Berdasarkan hasil perhitungan indeks konektivitas (β) di Kedungsepur menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kedungsepur merupakan wilayah maju karena memiliki indeks konektivitas yang tinggi yaitu $\beta > 1$. Hal ini juga dapat dilihat pada Peta Jaringan Jalan Kawasan Perkotaan Kedungsepur, dimana angka konektivitas yang tinggi ini dikarenakan jumlah ruas jalan di Kedungsepur terhubung dengan baik.

b. Aksesibilitas antar Wilayah Kedungsepur

Indeks aksesibilitas wilayah merupakan nilai aksesibilitas suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain dalam satu wilayah observasi (Hadi, dkk, 2013). Indeks aksesibilitas memperhitungkan jarak antara kota inti dengan kota lainnya yang dapat diakses melalui jarak tertentu. Nilai indeks inilah yang dijadikan dasar dalam pengklasifikasian aksesibilitas antar wilayah Kabupaten – Kota (*hinterland*) dengan Kota Inti di Kedungsepur.

Klasifikasi aksesibilitas antar wilayah di Kabupaten – Kota di Kedungsepur dilakukan dengan menentukan tiga tingkatan klasifikasi. Penentuan klasifikasi aksesibilitas antar kabupaten kota di Kedungsepur yaitu terdiri dari aksesibilitas tinggi, aksesibilitas sedang dan aksesibilitas rendah. Hal ini diukur melalui formulasi interval antar kelas sebagai berikut (Hikmah, 2018):

$$\text{Interval Kelas} = \frac{(\text{Nilai Kelas tertinggi} - \text{Nilai Kelas Terendah})}{\text{Jumlah kelas}}$$

Hasil perhitungan interval kelas dalam menentukan nilai batas aksesibilitas antar wilayah Kabupaten – Kota di Kedungsepur adalah 0,66.

Kota Semarang yang merupakan kota inti dijadikan sebagai tujuan dari kabupaten / kota di sekelilingnya dalam klasifikasi aksesibilitas di Kedungsepur. Hal ini juga didukung oleh penelitian Indrayati (2010a; 2011a) terdapat peran manusia khususnya wanita dalam pembangunan ekonomi salah satunya dengan memanfaatkan ruang (aksesibilitas) di Kota Semarang. Klasifikasi tingkat aksesibilitas di Kedungsepur adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11. Klasifikasi Aksesibilitas Kabupaten – Kota Kedungsepur.

Indeks Aksesibilitas	Klasifikasi Aksesibilitas
0,07 – 0,73	Tinggi
0,74 – 1,39	Sedang
1,39 – 2,05	Rendah

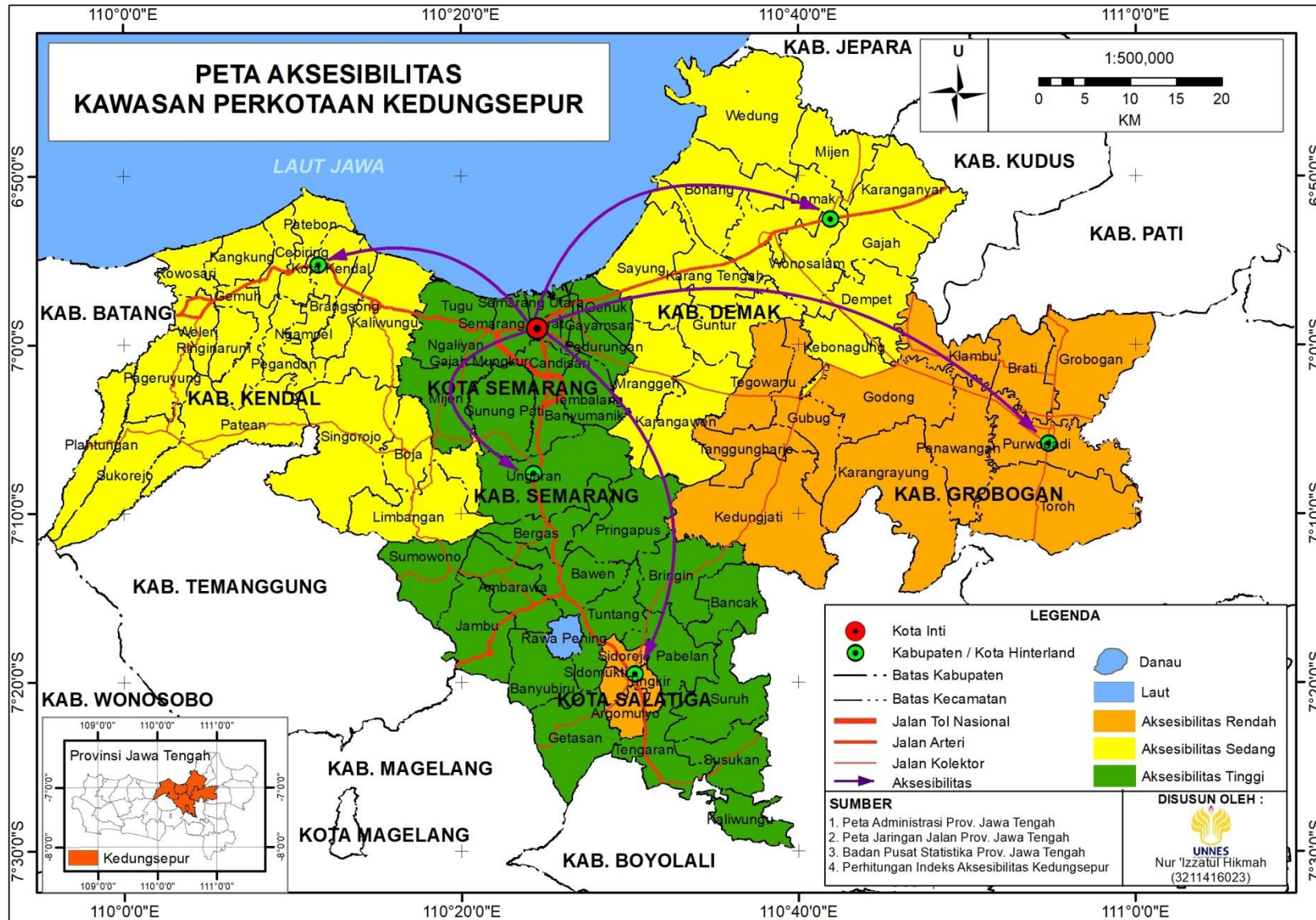
Sumber : Hasil Perhitungan Kelas Interval (Penulis, 2020).

Klasifikasi aksesibilitas di Kedungsepur menunjukkan adanya tingkatan aksesibilitas yang ditunjukkan oleh nilai aksesibilitas antar wilayah Kabupaten – Kota Kedungsepur dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut dan peta yang menunjukkan tingkat aksesibilitas di Kedungsepur dapat dilihat pada gambar 4.4.

Tabel 4.12. Indeks Aksesibilitas antar Kabupaten – Kota Kedungsepur.

Kabupaten / Kota	Luas (km ²)	Kedungsepur (%)	Jarak ke Kota Inti (km)	Indeks Aksesibilitas	Klasifikasi aksesibilitas
1. Kab. Kendal	1118,13	20,65	25	0,91	Sedang
2. Kab. Demak	900,12	16,63	27	0,99	Sedang
3. Kab. Semarang	950,21	17,55	15	0,55	Tinggi
4. Kota Salatiga	57,36	1,06	39	1,43	Rendah
5. Kota Semarang	373,78	6,90	2	0,07	Tinggi
6. Kab. Grobogan	2013,86	37,20	56	2,05	Rendah
Rata – rata Kedungsepur			27,33		1,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020 (diolah, 2020).



Gambar 4.4. Peta Aksesibilitas Kawasan Perkotaan Kedungsepur

4.2.3. Interaksi Keruangan antar Wilayah (Kabupaten / Kota) Kedungsepur dalam Menentukan Lokasi Potensial Arah Pengembangan Wilayah

a. Interaksi antara Kota Inti dan *Hinterland* Kedungsepur

Interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak - pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung (Roucek, 1963). Pendapat yang berbeda berdasarkan geografi perkotaan menurut Short (1984), mengemukakan bahwa interaksi merupakan sistem perkotaan dan tatanan dari kota - kota kecil melalui aliran manusia, barang dan gagasan. Hal ini dapat disebut pula sebagai dinamika sistem perkotaan yang merupakan sistem pergerakan manusia pada suatu area dalam melakukan aktivitasnya, sebagai contoh yaitu perjalanan belanja dan perjalanan ke tempat kerja.

Selain itu aktivitas pergerakan manusia juga berpengaruh pada pola persebaran keruangan dan daya lahan pada suatu fasilitas kependudukan (Umam, dkk, 2012). Pergerakan manusia ini juga dipengaruhi oleh Transportasi antar daerah. Transportasi sangat memegang peranan penting dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan perkotaan (Rofiatul, dkk, 2018). Transportasi perkotaan yang dibutuhkan dalam hal ini ialah angkutan umum (Febrianto, dkk, 2017), dimana berdasarkan hasil penelitian Rofiatul, dkk (2018) angkutan umum digunakan oleh 31% masyarakat perkotaan sebagai aktivitas pergerakan manusia. Hal ini juga

berlaku pada kawasan perkotaan Kedungsepur, dimana transportasi mempengaruhi aktivitas pergerakan manusia. Fakta menunjukkan bahwa pada umumnya alasan pergerakan manusia adalah alasan ekonomi dimana penduduk cenderung bergerak apabila terdapat prospek pekerjaan dan gaji yang lebih baik, selain itu terdapat alasan lain dalam bentuk sosial, seperti kurangnya pelayanan sosial yang miskin dan kurangnya kebebasan individu (Mustafa, dkk, 2018).

Pergerakan manusia yang merupakan salah satu bentuk interaksi yang juga dapat diketahui pola distribusi keruangan perkotaan (Indrayati, 2010b; Indrayati, 2011b; Falah dan Indrayati, 2019) antar wilayah juga terjadi di Kedungsepur. Kota Semarang sebagai kota inti di Kedungsepur menjadi pusat tujuan Kabupaten – Kota di sekitarnya (*hinterland*) yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan untuk melakukan interaksi. Hal ini yang disebut juga sebagai daya tarik (gravitasi) yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk di masing masing wilayah dan jarak antar wilayah di Kedungsepur.

Perhitungan nilai interaksi menggunakan formulasi model gravitasi, dimana semakin tinggi nilai interaksi, maka semakin tinggi pula pergerakan manusia dari dan menuju kota inti atau daya tarik kota inti lebih kuat terhadap Kabupaten / Kota *hinterland* nya (Fachrurrizal dan Hayati, 2014). Hal ini juga berlaku pada nilai interaksi keruangan di Kedungsepur dengan Kota Semarang sebagai kota inti. Klasifikasi

interaksi antar wilayah di Kabupaten – Kota di Kedungsepur dilakukan dengan menentukan tiga tingkatan klasifikasi. Penentuan klasifikasi aksesibilitas antar kabupaten kota di Kedungsepur yaitu terdiri dari aksesibilitas tinggi, aksesibilitas sedang dan aksesibilitas rendah. Hal ini diukur melalui formulasi interval antar kelas sebagai berikut (Hikmah, 2018):

$$\text{Interval Kelas} = \frac{(\text{Nilai Kelas tertinggi} - \text{Nilai Kelas Terendah})}{\text{Jumlah kelas}}$$

Klasifikasi dan interaksi Kabupaten - Kota (*hinterland*) di Kedungsepur terhadap Kota Semarang (kota inti) pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel penentuan klasifikasi interaksi dengan hasil nilai interaksi Kabupaten – Kota Kedungsepur dibawah ini.

Tabel 4.13. Klasifikasi Interaksi antar Kabupaten – Kota Kedungsepur.

Nilai Interaksi	Klasifikasi Interaksi
57.871.420,98 – 746.611.954,90	Tinggi
746.611.954,90 – 1.435.352.488,82	Sedang
1.435.352.488,82 – 2.124.093.022,73	Rendah

Tabel. 4.14. Nilai dan klasifikasi interaksi Kabupaten - Kota (*hinterland*) di Kedungsepur terhadap Kota Semarang (kota inti) Tahun 2019.

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jarak ke Kota Inti (km)	Nilai Interaksi (I)	Klasifikasi
1. Kab. Kendal	971.086	25	704.662.729,38	Rendah
2. Kab. Demak	1.162.805	27	723.407.468,64	Rendah
2. Kab. Semarang	1.053.786	15	2.124.093.022,73	Tinggi
4. Kota Salatiga	194.084	39	57.871.420,98	Rendah
5. Kab. Grobogan	1.377.788	56	199.255.340,30	Rendah

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020 (diolah, 2020).

Klasifikasi interaksi Kabupaten / Kota (*hinterland*) di Kedungsepur terhadap Kota Semarang (kota inti) menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Pengkelasan (klasifikasi) interaksi antar Kota Inti dan Kawasan *Hinterland* dilakukan menggunakan perhitungan kelas interval. Hasilnya menunjukkan bahwa Kabupaten Semarang merupakan Kabupaten yang memiliki interaksi yang tinggi (tertinggi diantara kawasan *hinterland* yang lainnya) dengan Kota Semarang sebagai kota inti.

Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan model gravitasi di Kedungsepur pada tahun 2019, tidak ditemukan adanya interaksi dengan klasifikasi sedang di Kedungsepur. Hal ini juga menunjukkan bahwa kawasan *hinterland* lainnya di Kedungsepur selain Kabupaten Semarang termasuk kedalam interaksi klasifikasi rendah. Kawasan *Hinterland* lainnya yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan memiliki klasifikasi interaksi rendah dengan Kota Semarang sebagai kota inti. Secara tidak langsung, hal ini juga dapat dilihat berdasarkan rata – rata nilai interaksi yang mengalami perbedaan angka yang signifikan antara Kota Inti (Kota Semarang) yang berinteraksi dengan Kabupaten Semarang dan Kota Inti (Kota Semarang) yang berinteraksi Kawasan *Hinterland* lainnya di Kedungsepur.



Gambar 4.5. Peta Interaksi Kawasan *Hinterland* terhadap Kota Inti Kedungsepur

b. Lokasi Potensial Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur

Setelah sebelumnya dilakukan perhitungan *Location Quotient* (LQ), konektivitas, aksesibilitas dan interaksi antar wilayah Kedungsepur, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan formulasi teori titik henti yang dapat menentukan lokasi potensial di Kedungsepur. Penentuan lokasi potensial menggunakan analisis titik henti bertujuan untuk menetapkan batas pengaruh antar pusat pertumbuhan dari kota Inti di Kedungsepur yaitu Kota Semarang terhadap daerah sekitarnya termasuk terhadap kota lain yang lebih kecil (*hinterland*) yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan.

Pengaruh Kota Semarang sebagai Kota Inti di Kedungsepur mempunyai batas jangkauan terhadap kawasan lainnya (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan) yang disebut sebagai titik henti. Kabupaten / Kota *Hinterland di Kedungsepur* berpengaruh pada jarak tertentu dari pusat kota (Kota Semarang).

Tabel 4.15. Titik Henti Kabupaten – Kota *Hinterland* di Kedungsepur dari Pusat Kota (Kota Semarang).

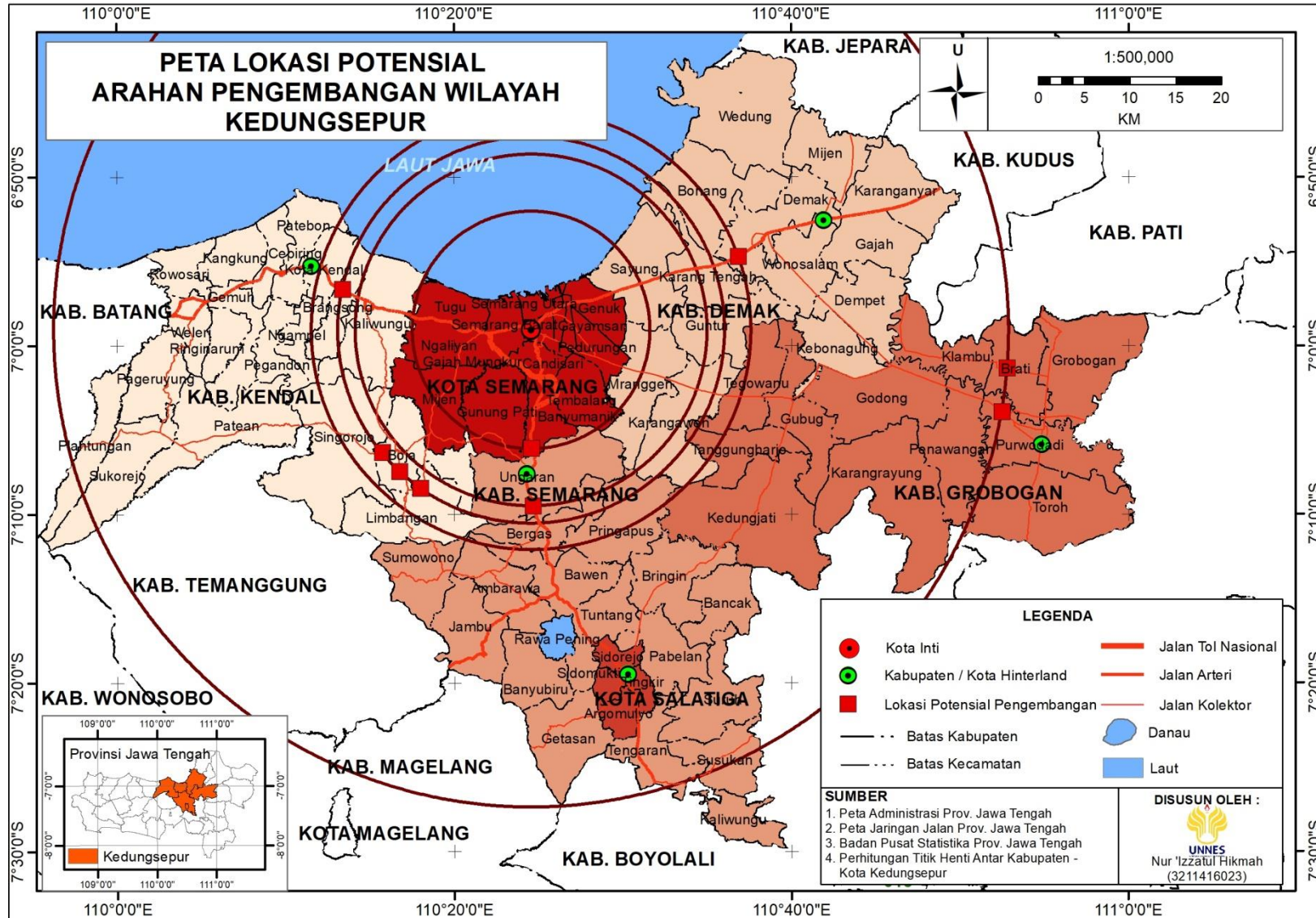
Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jarak ke Kota Inti (km)	Titik Henti (Km)
1. Kab. Kendal	971.086	25	21,13
2. Kab. Demak	1.162.805	27	24,01
2. Kab. Semarang	1.053.786	15	12,98
4. Kota Salatiga	194.084	39	19,22
5. Kab. Grobogan	1.377.788	56	52,15

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020 (diolah, 2020).

Berdasarkan hasil perhitungan titik henti yang dilakukan di Kedungsepur menghasilkan titik henti terdekat dari pusat kota yaitu sejauh 12.98 kilometer dan titik henti terjauh berada pada jarak 52.15 kilometer dari pusat kota. Maksud dan rincian titik henti di Kedungsepur adalah sebagai berikut :

- 1) Pengaruh Kabupaten Kendal adalah sejauh 21,13 km dari Kota Semarang.
- 2) Pengaruh Kabupaten Demak adalah sejauh 24,01 km dari Kota Semarang.
- 3) Pengaruh Kabupaten Semarang adalah sejauh 12,98 km dari Kota Semarang.
- 4) Pengaruh Kota Salatiga adalah sejauh 19,22 km dari Kota Semarang.
- 5) Pengaruh Kabupaten Grobogan adalah 52,15 km dari Kota Semarang.

Secara tidak langsung, perhitungan menggunakan teori titik henti mengasumsikan bahwa akses dari perbatasan dari Kota inti (Kota Semarang dan ke Kota *hinterland* (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan) adalah sama. Hal ini dapat dijadikan acuan sebagai penentuan lokasi potensial arahan pengembangan Wilayah Kedungsepur. Lokasi potensial sebagai arahan pengembangan wilayah Kedungsepur dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini.



Gambar 4.6. Hasil Analisis Peta Lokasi Potensial Arahkan Pengembangan Wilayah Kedungsepur

4.3. Pembahasan

Penelitian berfokus pada identifikasi arahan pengembangan wilayah di Kedungsepur dalam rangka mengatasi ketimpangan wilayah antar Kawasan *Hinterland* dan Kota Inti. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia berlandaskan pada beberapa teori yang meliputi konsep bongkar pasang pengembangan wilayah (Hariyanto dan Tukidi, 2007).

Sejalan dengan konsep tersebut maka arahan pengembangan wilayah yang penulis lakukan untuk Perkotaan Kedungsepur akan didasari kajian tentang sektor yang merupakan basis di Kedungsepur, konektivitas, interaksi dan aksesibilitas di Kedungsepur sehingga di dapatkan arahan lokasi yang potensial untuk dilakukan pengembangan wilayah ataupun untuk pembangunan kawasan industri yang baru. Hal pertama yang dapat dilakukan dalam pengembangan wilayah di Kedungsepur adalah dengan mengidentifikasi sektor unggulan pada wilayah ini. Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan dan kemampuan yang tinggi sehingga bisa dijadikan harapan dalam pengembangan wilayah (Robingatun, dkk, 2014). Arahan pengembangan yang dilakukan peneliti, tidak hanya didasarkan aspek sektor basis saja namun dikaitkan dengan konektivitas, aksesibilitas dan interaksi keruangan antar wilayah sehingga didapat lokasi potensial untuk pengembangan wilayah atau pengembangan potensi kawasan industri baru di Kedungsepur

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

disebutkan bahwa pengembangan wilayah dimaksudkan untuk meningkatkan daya dan hasil guna sumber daya yang tersebar di wilayah nasional dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Upaya pengembangan wilayah arah dan kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperkokoh kesatuan dan ketahanan nasional serta mewujudkan Wawasan Nusantara.
2. Pembangunan sektoral dilakukan secara saling memperkuat untuk meningkatkan pertumbuhan, pemerataan dan kesatuan wilayah nasional serta pembangunan yang berkelanjutan.
3. Perkembangan wilayah diupayakan saling terkait dan menguatkan sesuai dengan potensi wilayah.

4.3.1. Kecenderungan Sektor yang merupakan Basis Sektor dalam Mewujudkan Peran antar Wilayah Kedungsepur menuju Struktur Perkotaan.

Pengembangan wilayah yang dilakukan dengan mengidentifikasi sektor basis selanjutnya dapat dianalisis kecenderungannya pada wilayah tertentu dan dikaitkan dengan beberapa teori yang berhubungan dengan peran antar wilayah menuju struktur perkotaan (Muzayanah, dkk, 2020). Penelitian ini dilakukan pada Kawasan Kedungsepur, dimana dengan dilakukannya analisis sektor basis antar Kabupaten – Kota di Kedungsepur dapat dijadikan pelengkap atau komplementer dengan kawasan lainnya di Kedungsepur. Sektor yang dijadikan pelengkap (komplementer) pada

suatu wilayah berasal dari sektor yang menjadi basis dan memiliki peran tersendiri dalam mewujudkan suatu struktur perkotaan antar Kabupaten – Kota lainnya di Kedungsepur. Sektor basis atau unggulan yang terdapat di wilayah satu dapat berperan untuk berkontribusi menyalurkan sektor tersebut dengan wilayah lainnya di Kedungsepur, sehingga Kedungsepur memiliki tatanan struktur kota yang baik.

Sektor yang diidentifikasi dalam menentukan kecenderungan sektor basis di Kedungsepur meliputi Sembilan sektor ekonomi yang lebih di detilkan lagi berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) menjadi 17 sektor (lapangan usaha). Sektor tersebut adalah A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa lainnya. Perhitungan sektor unggulan ini dilakukan menggunakan analisis LQ (*Location Quotient*). Hasil dari perhitungan LQ ini dilakukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 – 2019 menunjukkan kecenderungan sektor basis yang berbeda antar

Kabupaten – Kota Kedungsepur. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut.

Tabel 4.16. Kecenderungan Sektor Basis antar Kabupaten-Kota Kedungsepur.

Lapangan Usaha (Sektor)	Sektor Basis di Kabupaten – Kota Kedungsepur					
	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Sema- rang	Kota Sala- tiga	Kota Sema- rang	Kab. Grobo- gan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	√	√	√	-	-	√
B. Pertambangan dan Penggalian	√	√	-	-	-	√
C. Industri Pengolahan	√	√	√	√	-	-
D. Pengadaan Listrik dan Gas	√	-	-	√	-	-
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	-	-	√	-
F. Konstruksi	-	-	-	-	√	-
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-	√	-	-	√	√
H. Transportasi dan Pergudangan	-	-	-	√	√	√
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-	-	-	√	-	√
J. Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	√	-
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	√	-	-	-	√	√
L. Real Estate	-	-	√	√	√	-
M,N. Jasa Perusahaan	-	-	-	√	√	-
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	√	-	√	√	√
P. Jasa Pendidikan	-	√	√	√	-	√
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	√	-	√
R,S,T,U. Jasa lainnya	-	√	-	-	-	√

Sumber : Olah Data, 2020

Keterangan : √ = Sektor Basis

- = Sektor Non Basis

Kecenderungan sektor basis di Kedungsepur juga dipengaruhi oleh rata – rata kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB di Kedungsepur selama lima tahun terakhir (2015 – 2019). Rata – Rata persentase kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB di Kedungsepur pada tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini.

Tabel 4.17. Rata – Rata Presentase PDRB Kedungsepur Tahun 2015 – 2019 (%)

Lapangan Usaha (Sektor)	Rata – Rata Presentase PDRB Kedungsepur Tahun 2015 – 2019 (%)					
	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Sema- rang	Kota Sala- tiga	Kota Sema- rang	Kab. Grobo- gan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,37	21,98	10,83	4,61	0,85	28,47
B. Pertambangan dan Penggalian	0,86	0,41	0,23	0,04	0,14	1,09
C. Industri Pengolahan	40,20	28,93	38,43	29,38	25,81	11,83
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,11	0,12	0,23	0,12	0,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,07	0,08	0,08	0,09	0,05
F. Konstruksi	6,70	8,47	13,54	13,97	25,97	5,56
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,22	16,90	11,62	14,12	14,84	21,40
H. Transportasi dan Pergudangan	2,18	3,07	2,27	3,47	3,68	5,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,45	2,53	3,14	7,88	3,25	4,58
J. Informasi dan Komunikasi	4,34	2,56	4,40	4,11	10,18	3,18
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,81	2,36	3,41	3,47	4,01	3,97
L. Real Estate	0,97	1,38	3,28	5,36	3,09	2,40
M,N. Jasa Perusahaan	0,28	0,25	0,49	1,18	0,63	0,26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,91	3,41	2,69	5,12	3,05	3,31
P. Jasa Pendidikan	2,38	4,08	3,45	4,44	2,38	4,54
Q. Jasa Kesehatan dan	0,65	0,76	0,71	1,48	0,74	0,99

Kegiatan Sosial						
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,36	2,72	1,30	1,05	1,17	2,95
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2020 (diolah, 2020).

Seluruh sektor tidak harus menjadi sektor basis di seluruh wilayah perkotaan Kedungsepur, maka dari itu masing – masing Kabupaten – Kota memiliki sektor basis nya sendiri sebagai pendukung pengembangan wilayah di Kedungsepur. Kecenderungan sektor antar Kabupaten - Kota di Kedungsepur memiliki perbedaan sehingga saling melengkapi dari pada setiap sektornya sehingga berperan penting dalam mewujudkan tatanan struktur kota yang baik (Andayani, 2018). Penjelasan mengenai sektor ekonomi yang sebelumnya dijelaskan sebanyak 17 poin sektor, dalam pembahasan selanjutnya akan dipersempit menjadi 9 sektor ekonomi sesuai dengan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)*.

Sektor basis atau sektor unggulan diketahui melalui analisis *Location Quotient (LQ)* yang dihitung menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDRB) berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha yang dihitung selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 hingga tahun 2019 sehingga didapat kecenderungan sektor yang merupakan basis dan dihubungkan dengan rata – rata persentase tertinggi kontribusi sektor ekonomi di Kabupaten – Kota Kedungsepur dalam lima tahun terakhir yaitu:

1) Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Sektor A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menjadi sektor basis di Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan tetapi tidak ada di Kota Salatiga dan Kota Semarang. Sektor pertanian menjadi sektor basis di Kabupaten Kendal dengan rata – rata kontribusi PDRB selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) pada sektor ekonomi sebesar 20,37%, Kabupaten Demak sebesar 21,98% dan Kabupaten Grobogan 28,47%. Persentase kontribusi ekonomi yang besar di wilayah ini juga didukung oleh adanya lahan pertanian sawah beririgasi teknis.

Lahan pertanian sawah beririgasi teknis merupakan lahan yang berpotensi memberikan produktivitas tinggi dalam budidaya pertanian sawah, terutama padi. Hal ini dikarenakan lahan beririgasi teknis ini biasanya mampu menghasilkan padi sedikitnya dua kali panen setiap tahunnya. Kedungsepur memiliki Sawah irigasi seluas 59,702 Ha, tersebar di Kabupaten Grobogan sebesar 36,30%, Kabupaten Demak sebesar 27,71% dan Kabupaten Kendal sebesar 20,63% (Martono, 2008). Luasnya lahan sawah di ketiga daerah tersebut menjadikan wilayah ini sebagai produsen padi untuk Kedungsepur dan Provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu sejalan dengan penelitian Indrayati (2016) bahwa lahan pertanian dan juga petani di Kabupaten Demak harus diberdayakan. Selain itu, Kabupaten Demak menjadi kawasan sentra produksi padi sawah dengan luas sawah 31.100 hektar. Penetapan

Kabupaten Demak sebagai sentra produksi padi di Kedungsepur didasarkan pada terjadinya surplus padi sebesar 200.000-210.000 ton / tahun (<https://sifataru.atrbpn.go.id>). Hal ini juga dipengaruhi oleh konektivitas di Kawasan Kedungsepur merupakan wilayah maju berdasarkan hasil perhitungan nilai indeks konektivitas (Beta). Hasil perhitungan ini mendukung penetapan Kedungsepur sebagai salah satu PKN (Pusat Kegiatan Nasional) yang berupa kawasan metropolitan.

Di sisi lain, Kabupaten Semarang juga memiliki sektor pertanian sebagai sektor basis. Berbeda dengan Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang memiliki kontribusi ekonomi di sektor pertanian sebesar 10,83% yang memiliki komoditas palawija (tanaman kedua) untuk di budidayakan selain padi. Dewasa ini, wilayah Kedungsepur memiliki potensi komoditas pertanian yaitu padi dan palawija.

Potensi pertanian ini melengkapi kebutuhan pokok di Kawasan Kedungsepur lainnya yang tidak memiliki sektor basis pertanian seperti Kota Semarang dan Kota Salatiga. Kota Semarang sebagai kota inti memiliki aksesibilitas dan interaksi keruangan yang tinggi menuju Kabupaten Semarang serta memiliki aksesibilitas dan interaksi keruangan yang sedang menuju Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak. Hal ini memungkinkan Kota Semarang mendapatkan persediaan hasil pertanian dari Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak. Maka dari itu dalam pengembangan

wilayah di masa datang, keberadaan potensi pertanian yang menjadi kebutuhan pokok manusia ini perlu dipertahankan dan dikembangkan.

2) Sektor Pertambangan dan Penggalian

Sektor B. Pertambangan dan Penggalian yang menjadi sektor basis di Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor basis di Kabupaten Kendal dengan rata – rata kontribusi PDRB selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) pada sektor ekonomi sebesar 0,86%, Kabupaten Demak sebesar 0,41% dan Kabupaten Grobogan 1,09%. Persentase kontribusi ekonomi penggalian dan pertambangan yang cenderung kecil yaitu angka terendah sebesar 0,41% dan tertinggi sebesar 1,09% yang membuat sektor ini bukan merupakan sektor pokok tetapi masih berpotensi untuk dikembangkan di Kedungsepur.

Sektor pertambangan dan penggalian di wilayah ini didukung oleh sumber daya mineral yang sangat kaya terdiri dari bahan galian bangunan, industri, dan keramik, andesit, sirtu dan tanah urug (<https://sifataru.atrbpn.go.id>). Bahan galian yang paling besar yaitu batu gamping yang terdapat di Kabupaten Grobogan yang memiliki kontribusi ekonomi paling besar di Kedungsepur. Selain itu, tanah liat yang terdapat di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kendal juga layak tambang, karena berada pada daerah dataran umumnya berupa persawahan dan tegalan. Terakhir, terdapat bahan galian andesit di Kabupaten Kendal yang layak tambang.

Bahan galian andesit yang layak tambang di Kabupaten Kendal, dengan memenuhi persyaratan penambangan harus dengan metode lateral dan dibuat teras-teras dengan ketinggian tertentu. Bahan galian andesit umumnya terletak pada daerah dataran tinggi, atau bukit-bukit dan gunung sehingga penambangannya harus memperhatikan fungsi kawasan dimana bahan galian tersebut berada. Selain itu, bahan galian C yaitu tanah urug di Kabupaten Demak juga menjadi sektor basis pada sektor pertambangan dan penggalian selain sektor pertanian.

Potensi pertambangan dan penggalian ini dapat melengkapi kebutuhan bahan bangunan di Kawasan Kedungsepur lainnya yang tidak memiliki sektor basis pertambangan dan penggalian seperti Kabupaten Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga. Kota Semarang sebagai Kota inti memiliki aksesibilitas dan interaksi keruangan yang sedang menuju Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak. Hal ini memungkinkan Kota Semarang mendapatkan persediaan hasil pertambangan dan penggalian sebagai dasar bahan baku bangunan dari Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak. Maka dari itu dalam pengembangan wilayah di masa datang, keberadaan potensi pertambangan dan penggalian yang menjadi dasar bahan baku untuk membangun bangunan perlu dipertahankan dan dikembangkan.

3) Sektor Industri Pengolahan

Sektor C. Industri Pengolahan menjadi sektor basis di Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga tetapi tidak menjadi sektor basis di Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Sektor industri pengolahan menjadi sektor basis di Kabupaten Kendal dengan rata – rata kontribusi PDRB selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) pada sektor ekonomi sebesar 40,20% tertinggi di Kedungsepur, Kabupaten Demak sebesar 28,93%, Kabupaten Semarang 38,47% dan Kota Salatiga sebesar 29,38%. Persentase kontribusi ekonomi pada sektor industri pengolahan yang besar di wilayah ini juga didukung oleh banyaknya bahan baku yang tersedia untuk diolah berada di Kawasan Kedungsepur.

Bahan baku yang diolah dalam industri pengolahan yang terdapat di Kedungsepur adalah pengolahan bahan baku hasil pertanian serta pertambangan dan penggalian maupun enam sektor ekonomi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian (Priambodo, 2016), terdapat keterkaitan (hubungan timbal balik) antara sektor industri pengolahan dengan sektor pertanian di Kedungsepur. Sektor pertanian memiliki peran sebagai penyedia masukan bagi industri pengolahan sedangkan hasil keluaran industri pengolahan paling banyak dimanfaatkan sebagai pemasukan oleh sektor-sektor ekonomi lainnya termasuk oleh sektor pertanian. Hal ini memberikan peluang yang cukup besar untuk membangun dan mengembangkan industri berbasis pertanian di Kawasan Perkotaan Kedungsepur. Selain sektor pertanian, sektor

industri pengolahan juga berkaitan dengan sektor pertambangan dan penggalian.

Salah satu contoh bahwa sektor industri pengolahan memiliki keterkaitan dengan sektor pertambangan dan penggalian adalah galian jenis gamping yang kemudian diolah menjadi semen sebagai bahan baku untuk membangun suatu bangunan. Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan ini sangat disarankan untuk dilakukan di wilayah atau lokasi potensial seperti di Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan sebagai daerah berbasis pertanian serta pertambangan dan penggalian, maupun di Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga sebagai daerah berbasis industri pengolahan yang dekat dengan kota inti. Kota Semarang sebagai kota inti (primer) memiliki aksesibilitas dan interaksi keruangan (hubungan timbal balik) dengan kabupaten/kota *hinterland* (kota sekunder) di Kedungsepur (Indrayati, dkk, 2019).

4) Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih

Sektor listrik, gas dan air bersih terdiri dari subsektor poin D. Pengadaan Listrik yang menjadi sektor basis di Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga dan Gas; dan E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yang menjadi basis sektor di Kota Semarang. Sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor basis di Kabupaten Kendal dengan rata – rata kontribusi PDRB selama lima tahun terakhir

(2015 – 2019) pada sektor ekonomi sebesar 0,29%, Kota Salatiga sebesar 0,31% dan Kota Semarang sebesar 0,21%. Persentase kontribusi ekonomi listrik, gas dan air bersih yang cenderung kecil dan merupakan sektor penyumbang paling kecil di antara sembilan sektor ekonomi lainnya di Kedungsepur. Hal ini dikarenakan pembangkit listrik di Kedungsepur bersumber dari PLTU (yang bersumber dari pembakaran batu bara) di Batang yang menyuplai (menyediakan) kebutuhan listrik untuk Kedungsepur, Jawa Tengah bahkan dicanangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Jawa – Bali (Rahman, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kendal merupakan wilayah yang memiliki konektivitas tinggi dan maju.

Pada tahun 2017 dicanangkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang merupakan bahan bakar fosil paling bersih saat ini dan memiliki nilai ekonomis paling baik (pertaminapower.com). rencana pembangunan PLTG di Kendal yang ini dicanangkan berada di KIK yaitu Kawasan Industri Kendal (Panggabean, 2017). Sumber bahan baku utama pembangkit listrik ini bukan berasal dari Kedungsepur, sehingga Kawasan Kedungsepur perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk mengembangkan potensi listrik dan gas di wilayah ini. Sementara ketersediaan air bersih yang bersadal dari alam dan dilakukan pengolahan sehingga menjadi layak minum dilakukan oleh beberapa perusahaan di Kota Semarang yang menjadikan sektor air bersih menjadi sektor basis di Kota Semarang.

5) Sektor Konstruksi

Sektor F. Konstruksi hanya menjadi sektor basis di Kota Semarang dari seluruh wilayah Kedungsepur. Sektor konstruksi yang menjadi sektor basis di Kota Semarang ini memiliki rata – rata kontribusi PDRB selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) pada sektor ekonomi sebesar 25,97%. Sektor konstruksi di Kota Semarang memiliki presentase kontribusi ekonomi paling tinggi di Kedungsepur. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang yang merupakan satu-satunya daerah yang memiliki sektor konstruksi sebagai sektor basis di Kedungsepur dan selalu dituntut untuk tetap meningkatkan kontribusinya melalui tolak ukur terhadap PDRB.

Keberlangsungan Sektor Konstruksi yang berjalan lancar dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain melalui dukungan regulasi pemerintah, kebijakan-kebijakan sektoral, *good governance*, struktur usaha, komposisi besaran *market supply and demand* dan pertumbuhan ekonomi (Asmoeadji, 2009). Sektor konstruksi telah tumbuh menjadi industri yang besar di Kedungsepur sebagai asset individu, organisasi dan bangsa. Sektor ini merupakan penyedia pekerjaan bagi masyarakat di Kedungsepur. Banyak masyarakat yang bukan berdomisili di Kota Semarang didatangkan sebagai pekerja konstruksi di Kota Semarang membuktikan bahwa konektivitas dan aksesibilitas menuju Kota Semarang termasuk tinggi. Masyarakat yang datang bukan berasal dari Kota Semarang dan bekerja di wilayah ini, bahan baku konstruksi

bangunan yang di suplai (disediakan) dari Kawasan Kedungsepur yang lain menunjukkan adanya aktivitas manusia yang tinggi di wilayah ini sehingga menunjukkan interaksi keruangan yang tinggi pula.

6) Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel dan restoran terdiri dari subsektor poin G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Subsektor perdagangan menjadi sektor basis di Kabupaten Demak, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan serta subsektor hotel dan restoran (penyediaan akomodasi dan makan minum) menjadi sektor basis di Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Jika Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran menjadi sektor basis atau unggulan pada suatu wilayah, maka wilayah tersebut memiliki ciri wilayah urban atau perkotaan.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran menjadi sektor basis di Kabupaten Demak dengan rata – rata kontribusi PDRB selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) pada sektor ekonomi sebesar 19,43%, Kota Salatiga sebesar 22,00%, Kota Semarang sebesar 18,09%, Kabupaten Grobogan sebesar 25,98% yang memberikan persentase kontribusi ekonomi yang paling tinggi pada sektor ini di Kedungsepur. Persentase kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk salah satu sektor yang memiliki kontribusi ekonomi yang tinggi di Kedungsepur. Selain dikarenakan konektivitas wilayah yang telah

maju di Kedungsepur, hal ini menunjukkan bahwa sektor ini mampu melayani wilayah lain seperti Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang yang tidak memiliki sektor basis perdagangan, hotel dan restoran.

7) Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi terdiri dari subsektor poin H. Transportasi dan Pergudangan; dan J. Informasi dan Komunikasi. Subsektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor basis di Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan serta subsektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor basis hanya di Kota Semarang. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi merupakan kunci dari terdapatnya konektivitas, aksesibilitas dan interaksi keruangan antar wilayah di Kedungsepur.

Sektor pengangkutan dan komunikasi menjadi sektor basis di Kota Salatiga dengan rata – rata kontribusi PDRB selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) pada sektor ekonomi sebesar 7,58%, Kota Semarang sebesar 13,86%, dan Kabupaten Grobogan sebesar 8,5%. Kontribusi Kota Semarang yang memiliki salah satu sektor unggulan yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi juga disebabkan oleh Kota Semarang sebagai kota inti atau Kota primer di Kedungsepur Sektor pengangkutan dan komunikasi juga menyebabkan adanya transformasi perkotaan. Menurut Bintarto (1983), Yunus (2004) dan Hardati (2011) transformasi wilayah perkotaan salah satunya ditandai dengan

kepadatan penduduk yang tinggi sehingga mendorong terjadinya pergerakan atau aktivitas manusia juga semakin tinggi, sebagian lahannya terbangun (memiliki sektor basis) konstruksi), dan perekonomiannya bersifat non pertanian (tidak memiliki sektor basis pertanian). Sektor pengangkutan dan komunikasi juga mendukung fungsi kota, kelengkapan fasilitas pelayanan sosial ekonomi kota (Hayati, 2008) yang lebih baik di Kedungsepur. Sudah jelas bahwa konektivitas wilayah yang telah maju di Kedungsepur, hal ini menunjukkan bahwa sektor ini mampu melayani wilayah lain seperti yang tidak memiliki sektor basis pengangkutan dan komunikasi di Kedungsepur didukung oleh aksesibilitas yang tinggi dari Kota inti (Kota Semarang) dan juga interaksi keruangan antar Kabupaten – Kota di Kedungsepur.

8) Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan terdiri dari subsektor poin K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. Real Estate; dan M,N. Jasa Perusahaan. Subsektor jasa keuangan dan asuransi menjadi sektor basis di Kabupaten Kendal, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Subsektor Real Estate menjadi sektor basis di Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Subsektor jasa perusahaan menjadi sektor basis di Kota Salatiga dan Kota Semarang.

Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan menjadi sektor basis di Kabupaten Kendal dengan rata – rata kontribusi PDRB selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) pada sektor ekonomi sebesar 3,06%, Kabupaten Semarang sebesar 7,18%, Kota Semarang sebesar 7,73%, Kota Salatiga sebesar 10,01% dan Kabupaten Grobogan sebesar 6,63%. Berdasarkan tiga subsektor basis yang terdapat pada Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan ini, Kota Semarang merupakan satu – satunya yang memiliki sektor basis dalam tiga subsektor tersebut. Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan yang menjadi sektor basis pada Kota Semarang sebagai kota inti menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah perkotaan (Hayati, 2008) dengan konektivitas wilayah yang maju, aksesibilitas dan interaksi keruangan yang tinggi.

9) Sektor Jasa - Jasa

Sektor jasa – jasa terdiri dari subsektor poin O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R, S, T, U. Jasa lainnya. Subsektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menjadi sektor basis di Kabupaten Demak, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan. Subsektor Jasa Pendidikan menjadi sektor basis di Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Subsektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial menjadi sektor basis di Kota Salatiga

dan Kabupaten Grobogan. Terakhir, subsektor Jasa Lainnya menjadi sektor basis di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

Sektor jasa – jasa menjadi sektor basis di Kabupaten Demak dengan rata – rata kontribusi PDRB selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) pada sektor ekonomi sebesar 10,97%, Kabupaten Semarang sebesar 8,15%, Kota Salatiga sebesar 12,09%, Kota Semarang sebesar 7,34%, dan Kabupaten Grobogan sebesar 11,79%. Berdasarkan empat subsektor basis yang terdapat sektor ini Kabupaten Grobogan merupakan satu-satunya memiliki keempat subsektor tersebut yang memungkinkan Kabupaten Grobogan menyediakan jasa – jasa yang juga dapat dimanfaatkan oleh wilayah lain di Kedungsepur.

Setelah diketahui sektor basis di Kabupaten – Kota Kedungsepur yang berkontribusi terhadap perekonomian di kedungsepur dapat disimpulkan bahwa terdapat sektor basis di Kedungsepur yaitu sektor industri pengolahan, serta sektor yang paling sedikit pengaruhnya atau yang paling tidak mendominasi di Kedungsepur adalah sektor listrik, gas dan air bersih. Hal ini membantu orang memahami bahwa Kedungsepur merupakan kawasan perkotaan yang mempunyai struktur perkotaan karena sektor pertanian bukanlah sektor yang mendominasi di Kedungsepur.

Keterkaitan antara kecenderungan sektor basis dalam mewujudkan peran antar wilayah Kedungsepur menuju Struktur Perkotaan yaitu Kabupaten Kendal memiliki kontribusi yang paling besar dalam sektor

industri pengolahan. Hal yang sama terjadi kepada Kabupaten Semarang di Kedungsepur dengan mengolah hasil sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi setor basis di kabupaten lain seperti Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan ditambah dengan hasil dari sektor pertambangan dan penggalian yang dapat digunakan menjadi bahan baku bangunan untuk mendukung sektor konstruksi yang menjadi basis di Kota Semarang.

Hal ini juga didukung oleh Kota Semarang yang memiliki sektor basis Sektor pengangkutan dan komunikasi yang dapat menghubungkan sektor lainnya di Kedungsepur untuk mendukung sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menjadi basis di Kabupaten Grobogan, sektor jasa – jasa; sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan; dan sektor listrik, gas dan air bersih di Kota Salatiga. Adanya keterkaitan antara sektor basis di Kabupaten – Kota Kedungsepur dapat dilakukan melalui kerjasama dengan melengkapi keperluan antar sektor yang dapat di distribusikan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya di Kedungsepur sehingga masing – masing wilayah di Kedungsepur memiliki peran yang penting menuju tatanan struktur perkotaan yang baik.

4.3.2. Peran Konektivitas Wilayah dalam Transfer Keruangan Sektor Unggulan antar Kabupaten – Kota Kedungsepur

Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya mengenai sektor basis, konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Kedungsepur telah peran masing – masing wilayah di Kedungsepur adalah sebagai berikut:

1. Sektor basis atau sektor unggulan

Sektor basis atau sektor unggulan diketahui melalui analisis *Location Quotient* (LQ) yang dihitung menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDRB) berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha yang dihitung selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 hingga tahun 2019 sehingga didapat kecenderungan sektor yang merupakan basis dan dihubungkan dengan rata – rata persentase tertinggi kontribusi sektor ekonomi di Kabupaten – Kota Kedungsepur dalam lima tahun terakhir, yaitu :

1) Kabupaten Kendal : Sektor Industri Pengolahan sebesar 40,20%.

Sektor industri pengolahan berkaitan dengan sektor lainnya yang memiliki persentase kontribusi ekonomi yang tinggi di Kedungsepur yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Maka dari itu, untuk mengembangkan Kabupaten Kendal salah satunya harus berfokus pada sektor industri pengolahan yang mengolah hasil pertanian, pertambangan dan kaitannya dengan pengadaan listrik.

2) Kabupaten Demak : Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

sebesar 21,98% tertinggi kedua di Kedungsepur. Sektor ini berkaitan dengan Sektor Industri Pengolahan yang memiliki persentase kontribusi sektor ekonomi yang tertinggi di Kabupaten Demak yaitu sebesar 28,93%. Maka dari itu, untuk mengembangkan Kabupaten Demak salah satunya harus berfokus

pada Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan.

- 3) Kabupaten Semarang : Sektor Industri Pengolahan sebesar 38,43% tertinggi kedua di Kedungsepur sekaligus yang paling tinggi di Kabupaten Semarang. Maka dari itu, untuk mengembangkan Kabupaten Demak salah satunya harus berfokus pada Sektor Industri Pengolahan.
- 4) Kota Salatiga : Sektor Industri Pengolahan sebesar 29,38%, tertinggi di Kota Salatiga. Walaupun Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor yang memiliki persentase kontribusi ekonomi tertinggi di Kota Salatiga tetapi Sektor Jasa – Jasa sebesar 12,09%; Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan sebesar 10,01%; dan Sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar 0,31% yang memiliki persentase sektor basis paling tinggi di Kedungsepur. Maka dari itu, untuk mengembangkan Kota Salatiga salah satunya harus dilakukan pengembangan pada Sektor Jasa – Jasa; Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan Sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih.
- 5) Kota Semarang : Sektor Konstruksi sebesar sebesar 25,97%; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 13,86% yang memiliki sektor basis dengan kontribusi ekonomi paling tinggi di Kedungsepur. Kota Semarang merupakan satu – satunya daerah yang memiliki Sektor Konstruksi sebagai sektor basis di

Kedungsepur. Maka dari itu, untuk mengembangkan Kota Semarang salah satunya harus berfokus pada Sektor Konstruksi dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

- 6) Kabupaten Grobogan : Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 28,47%; Sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,09%; Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 25,98% yang memiliki sektor basis dengan kontribusi ekonomi paling tinggi di Kedungsepur. Maka dari itu, untuk mengembangkan Kabupaten Grobogan, yang harus dikembangkan adalah sektor Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

2. Peran Konektivitas Wilayah dalam Transfer Keruangan Sektor Unggulan antar Kabupaten – Kota Kedungsepur

Peran Konektivitas Wilayah dalam Transfer Keruangan Sektor Unggulan antar Kabupaten – Kota Kedungsepur dapat diketahui melalui hasil perhitungan indeks konektivitas dan indeks aksesibilitas untuk melakukan transfer keruangan sektor unggulan masing – masing Kabupaten Kota. Berdasarkan hasil perhitungan konektivitas wilayah menggunakan formulasi indeks konektivitas, seluruh wilayah Kedungsepur merupakan wilayah yang maju. Hal ini mendukung terkoneksi antar wilayah sehingga memudahkan dalam melakukan

transfer sektor yang menjadi basis di suatu Kabupaten / Kota ke Kabupaten / Kota lainnya.

Peran Kota Semarang sebagai kota inti (Hudalah, dkk, 2014) menjadi pusat tujuan kabupaten – kota *hinterland* nya dengan keseluruhan 44 jalan utama dan 32 titik simpul kota yang menghasilkan nilai indeks konektivitas sebesar 1,38 yang berarti Kawasan Kedungsepur merupakan kawasan yang maju dan berkembang. Hal ini juga ditunjukkan pada peta jaringan jalan Kawasan Perkotaan Kedungsepur yang mengindikasikan bahwa ikatan jaringan konektivitas di Kedungsepur memiliki jaringan yang kuat antar Kabupaten – Kota nya yang berkelanjutan (Radianti, dkk, 2003; Suwa dan Guchi, 2020).

Selain konektivitas, aksesibilitas juga menandakan ikatan yang kuat antara Kabupaten – Kota di Kedungsepur. Kota Semarang sebagai kota inti di Kedungsepur memiliki aksesibilitas yang tinggi dengan Kabupaten Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa transfer (Firman, 2017) sektor konstruksi; dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang mejadi sektor basis di Kota Semarang memiliki aksesibitas yang tinggi yang artinya sangat lancar dalam melakukan transfer sektor tersebut menuju Kabupaten Semarang begitupun sebaliknya yang berada di Koridor Semarang – Ungaran. Kabupaten Semarang memiliki aksesibilitas yang tinggi menuju Kota Semarang sehingga memudahkan transfer sektor industri pengolahan (Hadi, 1993) yang

menjadi basis di Kabupaten Semarang khususnya pada Koridor Semarang - Ungaran.

Berbeda dengan Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak memiliki aksesibilitas yang sedang menuju Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan transfer sektor basis dari dan menuju Koridor Semarang – Kendal dan Koridor Semarang – Demak termasuk dalam kategori lancar dalam pendistribusian sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan sektor industri pengolahan yang menjadi sektor basis di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak dalam menciptakan skruktur kota yang baik. Sedangkan Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan memiliki aksesibilitas yang rendah menuju Kota Semarang yang berarti pendistribusian sektor jasa – jasa; sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan; dan sektor pengadaan listrik, gas dan air bersih yang menjadi sektor basis di Kota Salatiga dan sektor pertambangan dan penggalian; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yan menjadi basis di Kabupaten Grobogan termasuk kategori kurang lancar di Koridor Semarang – Ungaran Salatiga dan Koridor Semarang - Purwodadi.

4.3.3. Lokasi Potensial untuk Optimalisasi Interaksi Keruangan antar Wilayah di Kedungsepur

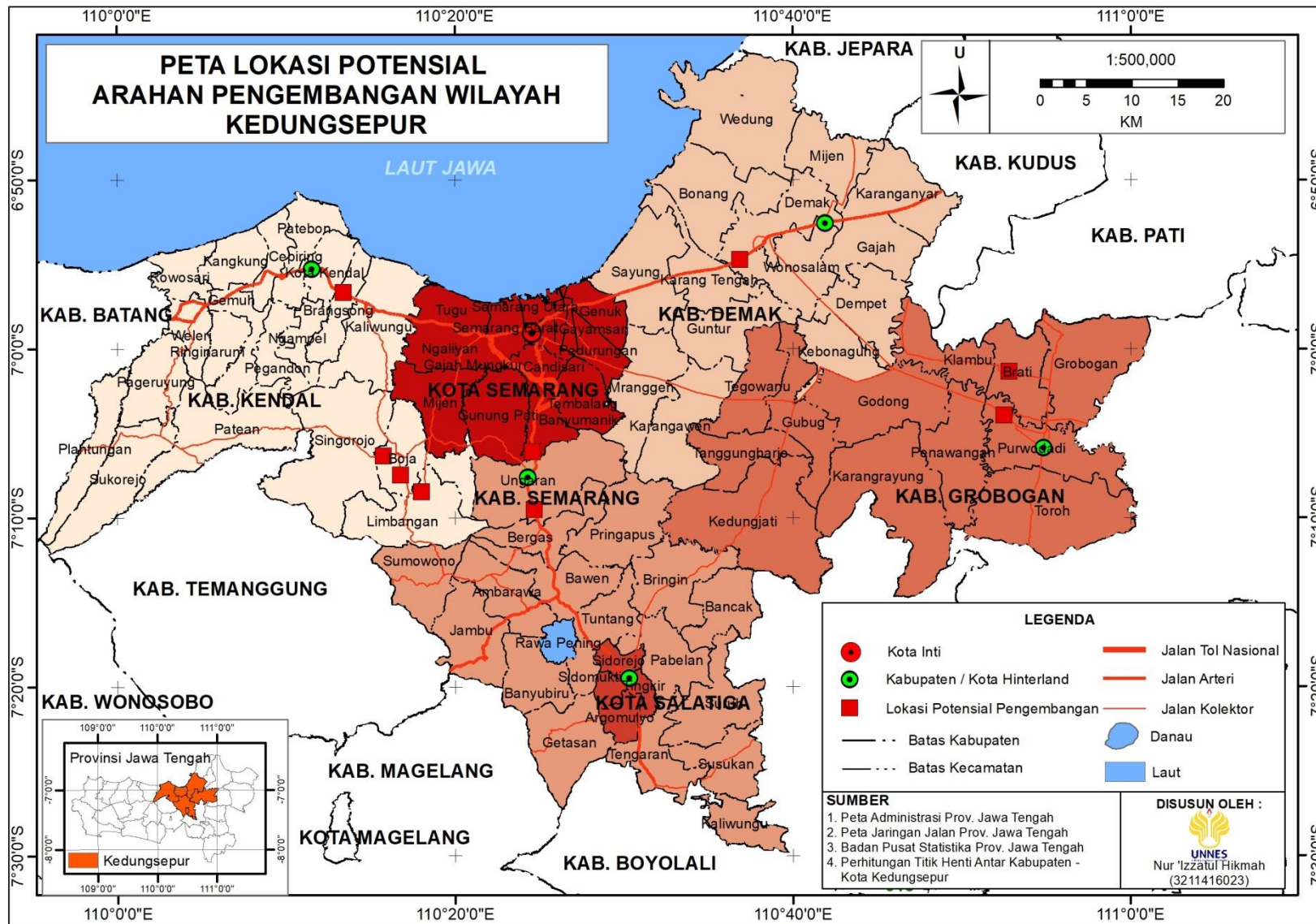
Wilayah dengan rencana pengembangan yang cukup potensial adalah wilayah Kecamatan Mijen, Gunungpati, Tembalang, Genuk, dan Kecamatan Ngaliyan yang berada pada daerah pinggir kota dengan menerapkan sektor yang harus menjadi fokus pengembangan di Kedungsepur yang mendukung hasil penelitian sebelumnya (Martono, 2008). Sejalan dengan hal tersebut, membangun suatu arahan pengembangan di lokasi yang menjadi sektor basis di masing – masing Kabupaten – Kota di Kedungsepur salah satunya dapat dilakukan dengan membangun kawasan industri. Senada dengan hal tersebut, Kawasan industry di Kedungsepur berkembang pada daerah pinggiran Kota Semarang yaitu Koridor Genuk-Sayung, Pedurungan-Mranggen, Pudukpayung-Ungaran yang melebar hingga ke daerah Bergas dan Pringapus (Kabupaten Semarang), serta Tugu-Kaliwungu (Martono, 2008) dan Koridor Semarang-Kendal, Koridor Semarang-Demak, Koridor Semarang-Purwodadi dan Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga (Minnatika dan Indrayati, 2019).

Kedua penelitian tersebut sifatnya masih menunjuk pada area koridor pengembangan. Untuk melengkapi atau menambahkan mengenai penelitian yang sebelumnya, penelitian kali ini lebih ditekankan pada satu titik kawasan (kecamatan) di Kabupaten – Kota Kedungsepur yang memiliki lokasi potensial dekat dengan jalan kolektor (penghubung antar

wilayah satu dengan wilayah lainnya di Kedungsepur) sehingga mempermudah distribusi baik bahan mentah, bahan setengah jadi maupun bahan jadi di kawasan industri di Kedungsepur. Berdasarkan temuan peneliti, lokasi potensial untuk optimalisasi pengembangan wilayah melalui interaksi keruangan antar Kabupaten – Kota di Kedungsepur berdasarkan analisis dan hasil perhitungan teori titik henti (*breaking point*) adalah :

1. Kabupaten Kendal di Kecamatan Kendal, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan berada pada Koridor Semarang-Kendal;
2. Kabupaten Demak di perbatasan antara Kecamatan Demak dan Kecamatan Wonosalam berada pada , Koridor Semarang-Demak;
3. Kabupaten Semarang di Kecamatan Ungaran Barat berada pada Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga;
4. Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik berada pada Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga;
5. Kabupaten Grobogan di Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Brati berada pada Koridor Semarang-Purwodadi.

Hal ini secara astronomis tergambar dengan visualisasi yang lebih jelas tertera pada Gambar 4.7. Peta Lokasi Potensial Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur sebagai berikut.



Gambar 4.7. Peta Lokasi Potensial Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur

Perkembangan lokasi potensial yang ditemukan oleh penulis di Kedungsepur menunjukkan bahwa wilayah perkotaan ini memiliki bentuk cenderung linier mengikuti jaringan jalan akan mempermudah akses pelayanan prasarana. Hal ini juga didukung oleh hasil perhitungan indeks konektivitas di wilayah Kedungsepur yang menunjukkan bahwa kawasan perkotaan ini merupakan wilayah maju dan terhubung dengan baik antar kabupaten – kota. Berjalan lurus dengan indeks konektivitas, indeks aksesibilitas di Kedungsepur juga menunjukkan bahwa semakin dekat jarak yang ditempuh dari kota inti ke kota lainnya (*hinterland*) maka aksesibilitasnya juga semakin tinggi. Hal ini diikuti oleh interaksi keruangan antar Kabupaten – Kota Kedungsepur yang menunjukkan hasil yang sama dengan perhitungan indeks aksesibilitas, bahwa semakin dekat kota inti (Kota Semarang) dengan Kabupaten – Kota (*hinterland*) maka semakin tinggi pula interaksi keruangan yang terjadi di wilayah tersebut.

4.3.4. Arahannya Pengembangan Wilayah Kedungsepur melalui Interaksi Keruangan antar Kabupaten Kota

Tingginya konektivitas, aksesibilitas dan interaksi keruangan antar kabupaten – kota Kedungsepur menjadikan kawasan perkotaan ini sangat potensial untuk dikembangkan dengan beberapa arahan pengembangan. Arahan pengembangan wilayah Kedungsepur melalui interaksi keruangan antar Kabupaten – Kota adalah:

1. Kabupaten Kendal memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan lokasi potensial pengembangan di Kecamatan Kendal, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan atau pada Koridor Semarang-Kendal. Adapun Kecamatan yang sudah dikembangkan di Kabupaten Kendal ada di Kecamatan Kendal dimana terdapat Kawasan Industri Kendal (KIK) di Kabupaten Kendal, sedangkan Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan belum dikembangkan. Kecamatan yang belum dikembangkan sebagai wilayah pengembangan, diharapkan akan menjadi kenyataan dalam pembangunan wilayahnya dan menjadi satu kesatuan di Kedungsepur
2. Kabupaten Demak memiliki arahan pengembangan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Sektor Industri Pengolahan dengan lokasi potensial pengembangan yang belum dikembangkan di perbatasan antara Kecamatan Demak dan Kecamatan Wonosalam atau pada Koridor Semarang-Demak. Kabupaten demak menjadi penyuplai (mengeksport) komoditas pertanian menuju kawasan lainnya di Kedungsepur sehingga diharapkan dengan arahan ini akan terbentuk struktur kota yang baik di Kabupaten Demak dengan tetap menyuplai kebutuhan pokok di Kedungsepur.
3. Kabupaten Semarang memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan lokasi potensial berada di

Kecamatan Ungaran Barat yang sebagian sudah dikembangkan menjadi pabrik pengolahan yang masih beroperasi dapat kita temukan di sepanjang Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga untuk mendukung pengembangan wilayah Kedungsepur.

4. Kota Salatiga memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Jasa – Jasa; Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan Sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih dengan lokasi potensial pengembangan berada pada Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga yang belum dikembangkan.
5. Kota Semarang memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Konstruksi yang bahan bakunya berasal dari Kabupaten Grobogan sehingga Sektor Pengangkutan dan Komunikasi juga mendukung sektor lainnya berjalan dengan baik di Kecamatan Banyumanik atau pada Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga.
6. Kabupaten Grobogan memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Brati atau berada pada Koridor Semarang-Purwodadi yang harus lebih dikembangkan untuk mendukung sektor unggulan lainnya semakin berkembang di Kedungsepur.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan yang telah dilakukan pada wilayah penelitian di Kedungsepur dapat disimpulkan:

1. Sektor basis di Kabupaten – Kota Kedungsepur dalam lima tahun terakhir, yaitu : Kabupaten Kendal : Sektor Industri Pengolahan; Kabupaten Demak : Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Sektor Industri Pengolahan; Kabupaten Semarang : Sektor Industri Pengolahan; Kota Salatiga : Sektor Jasa – Jasa; Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih; Kota Semarang : Sektor Konstruksi; dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi; Kabupaten Grobogan : Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalan; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang paling mendominasi di Kedungsepur dan sektor listrik, gas dan air bersih merupakan sektor yang paling sedikit pengaruhnya atau yang paling tidak mendominasi di Kedungsepur yang membantu orang memahami bahwa Kedungsepur merupakan kawasan perkotaan.
2. Konektivitas antar wilayah Kedungsepur menunjukkan bahwa seluruh wilayah Kedungsepur merupakan wilayah maju dengan indeks konektivitas yang tinggi yaitu $\beta > 1$. Telah diidentifikasi 9 titik yang

diperkirakan sangat potensial untuk pengembangan dan optimalisasi interaksi keruangan antar wilayah di Kedungsepur.

3. Lokasi potensial yang diidentifikasi untuk optimalisasi pengembangan wilayah melalui interaksi keruangan antar Kabupaten – Kota di Kedungsepur terdiri dari 9 titik yaitu: Kabupaten Kendal di Kecamatan Kendal, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan; Kabupaten Demak di perbatasan antara Kecamatan Demak dan Kecamatan Wonosalam; Kabupaten Semarang di Kecamatan Ungaran Barat; Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik; dan Kabupaten Grobogan di Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Brati. Lokasi Potensial tersebut sudah dikembangkan sebagian da nada yang belum di kembangkan tiap kecamatannya.

5.2. Saran

Pengembangan wilayah dilakukan dengan mengembangkan dan melakukan pergerakan dengan menyalurkan sektor basis yang berbeda antar Kota Inti (Kota Semarang) dan Kabupaten - Kota *Hinterland* di Kedungsepur yaitu dengan memperkuat interaksi di Kedungsepur. Saran arahan pengembangan wilayah Kedungsepur melalui interaksi keruangan antar Kabupaten – Kota berdasarkan tiga hal tersebut adalah :

1. Kabupaten Kendal memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan lokasi potensial pengembangan di

Kecamatan Kendal, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Boja dan Kecamatan Limbangan atau pada Koridor Semarang-Kendal.

2. Kabupaten Demak memiliki arahan pengembangan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Sektor Industri Pengolahan dengan lokasi potensial pengembangan di perbatasan antara Kecamatan Demak dan Kecamatan Wonosalam atau pada Koridor Semarang-Demak.
3. Kabupaten Semarang memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Industri Pengolahan dengan lokasi potensial berada di Kecamatan Ungaran Barat atau pada Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga.
4. Kota Salatiga memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Jasa – Jasa; Sektor Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan dan Sektor Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih dengan lokasi potensial pengembangan berada pada Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga.
5. Kota Semarang memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Konstruksi dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi di Kecamatan Banyumanik atau pada Koridor Semarang-Ungaran-Salatiga.
6. Kabupaten Grobogan memiliki arahan pengembangan sektor basis yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Pengalihan; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran di Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Brati atau berada pada Koridor Semarang-Purwodadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afid, Burhanuddin. 2013. "Landasan Teori, Kerangka Berpikir dan Metode Penelitian." Diakses pada 01 05, 2019, dari <https://afidburhanuddin.wordpress.com>
- Andayani, Keumala. 2018. Economic base determination and influence of several variables against contributions percentage of the GDRP in Aceh Besar district. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 352, No. 1, p. 012053). IOP Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Asmoeadji. 2009. Menelusuri Pembangunan Perumahan Dan Permukiman. Jakarta: Rakasindo.
- Aubert, C, dan Xigang Zhu. 2002. "The Changing Role Of Soybean in China's Food System: A Study in Its Production, Processing, Consumption and Trade." Eu-China Joint Research Project.
- Badan Pusat Statistika. 2020. Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2020. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistika. 2020. Kabupaten Demak Dalam Angka 2020. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistika. 2020. Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2020. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistika. 2020. Kabupaten Kendal Dalam Angka 2020. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistika. 2020. Kabupaten Semarang Dalam Angka 2020. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistika. 2020. Kota Salatiga Dalam Angka 2020. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistika. 2020. Kota Semarang Dalam Angka 2020. BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Bintarto. 1983. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia
- CGPRT. 1985. The Soybean Commodity System in Indonesia. Bogor: ESCAP.
- Dharmapatni, I.A.I. 1993. "Fenomena Mega Urban Dan Tantangan Pengelolaannya." Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota (26).

- Djamba, Yanyi K., dan W. Lawrence Neuman. 2002. "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches." *Teaching Sociology* 30(3): 380. <http://www.jstor.org/stable/3211488?origin=crossref>.
- Fachrurrizal, Muhamad Isro, dan Rahma Hayati. 2014. "Pemilihan Lokasi Ibukota Kabupaten Di Wilayah Proyeksi Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara." *Geo Image* 3(2): 1–7.
- Falah, Jhonata, dan Ariyani Indrayati. 2019. "Sebaran Keruangan dan Respon Warga Kota terhadap Layanan Online Smart Living menuju Semarang Smart City Tahun 2018." *Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS X 2019*.
- Febrianto, Wimas Hasan, Saptono Putro, dan Hariyanto. 2017. "TRAYEK ANGKUTAN UMUM UNTUK MENGOPTIMALKAN INTERAKSI DESA KOTA DI KABUPATEN BOYOLALI." *Geo Image* 6(1).
- Firman, Tommy. 1992. "The Spatial Pattern of Urban Population Growth in Java 1980-1990." *Bulletin of Indonesian Economics Studies* 2(28).
- Firman, Tommy. 2017. The urbanisation of Java, 2000–2010: towards 'the island of mega-urban regions'. *Asian Population Studies*, 13(1), 50-66.
- Fikri, Muhammad Tsaqibul, dan Fafurida Fafurida. 2018. "Sektor Unggulan dan Keterkaitan Spasial Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah." *Economics Development Analysis Journal* 7(3): 243-250.
- Fuady, Bambang Hidayat, Erika Buchari, dan Joni Arliansyah. 2015. "Karakteristik Transportasi Kabupaten Banyuwasin Sebagai Daerah Penyangga Kota Palembang." *Jurnal Transportasi* 15(3): 179–88.
- Giyarsih, Sri Rum. 2012. "Koridor Antar Kota Sebagai Penentu Sinergisme Spasial: Kajian Geografi Yang Semakin Penting." *Tatalokal* 14(2): 90–97.
- Hadi, Prayoga Luthfil, Tri Basuki Joewono, dan Wimpy Santosa. 2013. "Aksesibilitas Menuju Fasilitas Kesehatan Di Kota Bandung." *Jurnal Transportasi* 13(3): 213–22.
- Hadi, Sudharto. P. 1993. *Planning for industrialization in central Java, Indonesia: the process, the impacts and the alternatives* (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
- Hanafiah, HT. 1996. *Tata Laksana Dan Kelembagaan Penataan Ruang Kawasan Pedesaan*. Cisarua Bogor: Sarasehan Pemantapan Rencana Peraturan Pemerintah Kawasan Pedesaan.
- Harahap, Lenni Ati, dan Endah Purwaningsih. 2018. "Studi Tentang Rute, Jangkauan dan Permintaan Terhadap Becak Kayuh di Kecamatan Padang

- Utara.” *Jurnal Buana* 2: 770–82.
- Hardati, Puji. 2011. *Transformasi Wilayah Peri-Urban. Kasus di Kabupaten Semarang*. Semarang: UNNES.
- Hariyanto, dan Tukidi. 2007. ‘Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia di Era Otonomi Daerah’. Dalam *Jurnal Geografi*. Vol.4 No.1. Hal. 1-10.
- Hayati, Rahma. 2008. *Konstelasi dan Orde Kota dalam Perencanaan Wilayah*. Semarang: UNNES.
- Hendayana, Rachmat. 2003. “Aplikasi Metode Location Quotient (Lq) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional.” *Informatika Pertanian* 12(Desember).
- Hikmah, Nur ‘Izzatul. 2018. “Local Wisdom of Farmers on The Northern Slopes of Ungaran Mountain to Reduce Erosion on Agricultural Land.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 313(ICoRSIA 2018): 290–93.
- Hod, Ron. 1998. *Economic Analysis: A Location Quotient*. Primer. Principal Sun Region Associates.
- Hudalah, Delik., Firman, Tommy., dan Woltjer, Johan. 2014. *Cultural Cooperation, Institution Building and Metropolitan Governance in Decentralizing Indonesia*. *International Journal of Urban and Regional Research*, 38(6), 2217-2234.
- Indrayati, Ariyani. 2010a. *Peranan Wanita dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Kasus Tentang Pola Ruang Belanja Wanita di Daerah Pinggiran Kota Semarang)*. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*, 7(2).
- Indrayati, Ariyani. 2010b. *Studi manajemen infrastruktur perkotaan berbasis komunitas, kasus manajemen MCK komunal di bantaran sungai Kota Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Indrayati, Ariyani. 2011a. *Kontribusi Wanita dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui preferensi ruang belanja*. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*, 8(2), 73-82.
- Indrayati, Ariyani. 2011b. *Pola Distribusi Keruangan MCK Komunal dan Hubungannya dengan Kawasan Kumuh di Perkotaan Yogyakarta*. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan dan Profesi Kegeografian*, 8(1), 54-63.
- Indrayati, Ariyani. 2016. *Empowerment Of Farmers To Determine The Most*

Optimal Season In Planting Tobacco Based On Local Wisdom In Kandangan District Of Temanggung Regency. Dynamics And Empowerment Of Rural Society In Asia, 97.

- Indrayati, Ariyani, Nur 'Izzatul Hikmah, dan Raulendhi Fauzanna. 2019. "Increasing Reciprocal Linkages between Primary City and Secondary Cities in Kedungsepur Metropolitan." ICESI.
- Isserman, Andrew M. 2001. "Competitive Advantages of Rural America in the Next Century." 58(January): 38–58.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620/2 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi Jawa Tengah
- Kinayati, Djojuroto, dan M. L. A. Sumaryati. 2004. Prinsip-Prinsip Dasar Penelitian Bahasa Dan Sastra. Bandung: Nuansa.
- Martono, Primasto Ardi. 2008. Tesis Pascasarjana Magister Program Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro "Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi Dan Antar Daerah Di Wilayah Kedungsepur."
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- McGee, T.G. 1991. "The Future of the Asian City: The Emergence of Desakota Regions." In Proceeding International Seminar and Workshop on the South East Asian City of the Future, Jakarta.
- Miller, Mark M., Lay James Gibson, dan N. Gene Wright. 1991. "Location Quotient : A Basic Tool for Economic Development Analysis." Economic Development Review: 65.
- Minnatika, Nella. dan Indrayati, Ariyani. 2019. "Transformasi Spasial Pada Koridor Perkotaan Kedungsepur. Geo-Image.
- Mustafa, Arnisa, Murshal Manaf, dan Agus Salim. 2018. "Interaksi Keruangan Kawasan Perkotaan Tanete Dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Transportasi Spatial Interaction of Urban Tanete Areas and Its Implications for Transportation Services." PBUP 1(1): 1–9.
- Muta'ali, Luthfi. 2015. Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Muzayanah, I.F.U., Nazara, S., Mahi, B. R., dan Hartono, D. 2020. Is there social capital in cities? The association of urban form and social capital formation in the metropolitan cities of Indonesia. International Journal of Urban Sciences, 1-25.

- Nugroho, Arif Satriyo. 2014. “ANALISIS ESTIMASI MOBILITAS PENDUDUK TERHADAP DUA PUSAT KEGIATAN WILAYAH DI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2013.” Fakultas Geografi UMS.
- Panggabean, G. A. 2017. Rencana Pembangkit Listrik di Kawasan Industri Kendal Direstui. Diakses pada 05 12, 2020, dari Semarang.bisnis.com: <https://semarang.bisnis.com/read/20171024/536/766753/rencana-pembangkit-listrik-di-kawasan-industri-kendal-direstui>
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi
- Prasetio, Krisma, dan Sulistinah. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi Industri Kerajinan Marmer Di Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.” *Swara Bhumi* 3(3): 30–41. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/swara-bhumi/article/view/16246>.
- Priambodo, Gunawan. 2016. *Spatial Patterns of Agriculture And Industrial Sector Linkages And Its Implication On Inter-Regional Collaboration A Study Of Kedungsepur Area* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Radianti, Jaziar., Tasrif, Muhammad., dan Rostiana, Endang. (2003). *A Dynamic Model for Spatial Planning in Metropolitan Areas*. In *International Conference of the System Dynamics Society* (pp. 1-27).
- Raharjani, Jeni. 2005. “Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Pasar Swalayan Sebagai Tempat Berbelanja (,Studi Kasus Pada Pasar Swalayan Di Kawasan Seputar Simpang Lima Semarang).” *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi* 2: 1–15.
- Rahman, L. 2018. Jawa Tengah Pasok Listrik untuk Jawa - Bali. Diakses pada 05 12, 2020, dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id>: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2018/07/19/jawa-tengah-pasok-listrik-untuk-jawa-bali>
- Ramadhan, R. A, dan Pigawati, B. 2019. *Transit Oriented Development (TOD) on the Commuter Train Network*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 313, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Robingatun, Rahma Hayati, dan Ariyani Indrayati. 2014. “Daya Saing Wilayah Dan Sektor Unggulan Sebagai Penentu Pusat Pertumbuhan Baru Orde II

Di Kabupaten Purworejo.” *Geo Image* 3(1).

Rofiatul, Ulya Meiliana, Hariyanto, dan Putro Saptono. 2018. "Tingkat Kebutuhan Penduduk Terhadap Angkutan Umum Perkotaan di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan." *Geo-Image* 7(1): 54-62.

Roucek, Joseph S. 1963. “Changing Concepts and Recent Trends in American Educational Sociology.” *Revista Internacional de Sociología* 21: 217.

Roucek, Y. S, dan R.R, W. 1963. *Sociology and Introduction*. London: Riutledge & Kegan Paul Ltd.

Rusastra, Iwayan. 2002. *Struktur Pasar Dan Pemasaran Gabah Beras Dan Komoditi Kompetitor Utama*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian.

Sanditia, Eka Mayang, Whinarko Juliprijanto, dan Rusmijati. 2017. “Analisis Disparitas Pendapatan Per Kapita Dengan Pendekatan Sektorial Antar Wilayah Kedungsepur Tahun 2010-2017.” *DINAMIC : Directory Journal of Economic* 1: 168–81.

Short, J.R. 1984 *An Intriduction to Urban Geography*. London :Routladge and Kegen Paul.

Smart Indonesia Initiatives. 2015. “Smart City Indonesia.” *Buletin Smart City ID*: 1 dan 2.

Strodtbeck, Fred L . 1949. “Equal Opportunity Intervals : A Contribution to the Method of Intervening Opportunity Analysis.” *American Sociological Review* , 14(4): 490–97.

Suharto, Benny Benyamin. 2009. “Pentingnya Analisis Lokasi Dan Pola Keruangan Di Dalam Perencanaan Wilayah Dan Kota.” : 1–32.

Suyatno. 2007. “Analisa Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat Ii Wonogiri : Menghadapiimplementasi Uu No. 22/1999 Dan Uu No. 5/1999.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan* 1(2): 144.

Suwa, A dan Guchi, M. 2020. *Sustainability and the Automobile Industry in Asia: Policy and Governance*. Routledge.

Tika, Moh. Pabundu. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Turner, J S. 1986. “New Directions in Communications.” *International Zurich Seminar on Digital Communication*: 25–32.

- Umam, Khairul, Rahma Hayati, dan Ariyani Indrayati. 2012. "Pola Distribusi Spasial dan Daya Layan Fasilitas Perbankan di Kabupaten Kudus." *Geo-Image* 1(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2002. Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
- Utama, Putra Fajar. 2008. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Ketimpangan Di Kabupaten/Kota Yang Tergabung Dalam Kawasan Kedungsepur Tahun 2004 - 2008."
- Utami, W. S., dan Kurniawati, A. 2018. *Pendalaman Materi Geografi Modul 7: Interaksi Desa - Kota*. Jakarta: Kemendikbud & Kemenristekdikti.
- Wibowo, Fajar Hadhiyanto, dan Sri Rahayu. 2017. "Kajian Pola Interaksi Keruangan Sentra Usaha Pengasapan Ikan Di Desa." *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)* 6(2): 113–24.
- Wijaya, A. 1996. "Jurnal Ekonomi Pembangunan Pilihan Pembangunan Industri : Kasus DKI Jakarta." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* No IV (2).
- Yunus, Hadi Sabari. 2004. *Struktur Tata Ruang Kota*, Edisi ke empat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuswanto, Musyiam, Woro Kaesi. 2014. "Analisis Spasial Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran, Kota Semarang, Kota Salatiga Dan Purwodadi) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012."

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Rinci Perhitungan *Location Quotient* (LQ) Sektoral Kedungsepur

A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	5293,30	5439,64	5617,43	5784,87	6049,82	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	3568,63	3534,95	3677,92	3701,18	3698,07	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	3285,73	3382,75	3477,13	3576,42	3623,52	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	376,80	385,02	393,93	411,85	424,95	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	1025,27	1043,69	1037,04	1068,07	1089,57	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	4821,98	4945,94	5092,07	5161,26	5130,66	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	18371,71	18731,98	19295,52	19703,65	20016,59	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	113826,3	116331,12	118450,17	121556,54	123214,2	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	1,52	1,52	1,53	1,53	1,58	2,34	2,36	2,38	2,41	2,49
2. Kab. Demak	1,70	1,65	1,67	1,64	1,62	2,62	2,56	2,60	2,58	2,56
3. Kab. Semarang	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	1,25	1,27	1,27	1,29	1,29
4. Kota Salatiga	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,53	0,53	0,53	0,55	0,56
5. Kota Semarang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
6. Kab. Grobogan	2,14	2,16	2,18	2,14	2,10	3,31	3,36	3,37	3,36	3,32
KEDUNGSEPUR	0,65	0,64	0,64	0,64	0,63	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,55	1,55	1,55	1,57	1,58

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

B. Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian (Miliar Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	117,95	221,68	269,65	290,60	307,10	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	60,464	61,135	69,45339	76,07402	77,52786	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	65,77474	68,82	72,01857	75,7789	79,08472	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	3,35	3,36	3,36	3,36	3,40	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	183,86	172,26	159,73	146,38	169,46	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	177,66497	181,84714	189,65652	201,62238	220,2365	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	609,06	709,10	763,87	793,82	856,81	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	16278,16	19367,6	20356,48	20855,98	21557,12	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	0,24	0,37	0,43	0,45	0,46	1,57	2,54	2,88	3,00	2,95
2. Kab. Demak	0,20	0,17	0,18	0,20	0,19	1,34	1,17	1,24	1,31	1,25
3. Kab. Semarang	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,76	0,68	0,67	0,68	0,66
4. Kota Salatiga	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,14	0,12	0,12	0,11	0,10
5. Kota Semarang	0,08	0,07	0,06	0,05	0,06	0,56	0,45	0,38	0,34	0,36
6. Kab. Grobogan	0,55	0,48	0,47	0,49	0,51	3,68	3,27	3,17	3,26	3,33
KEDUNGSEPUR	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,67	6,84	6,73	6,69	6,46

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

C. Sektor Industri Pengolahan

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Industri Pengolahan (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	9977890	10505620	11076050	11763810	12440170	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	4144101	4502627	4804846,2	5131972,2	5487466,08	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	11156214,25	11719709,24	12221519,53	12862545,69	13761168,63	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	2321817,06	2407848,71	2530035,15	2649361,11	2815202,59	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	28737827,51	29989940,02	31740254	33249531	36067728,68	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	1796951,74	1893484,71	2052872,11	2290245,39	2494834,78	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	58134801,56	61019229,68	64425576,99	67947465,39	73066570,76	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	284306590	295960840	308770220	322200870	338937670	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,40	1,40	1,40	1,42	1,40
2. Kab. Demak	0,79	0,82	0,84	0,86	0,87	0,96	1,00	1,02	1,04	1,04
3. Kab. Semarang	1,10	1,11	1,11	1,11	1,13	1,34	1,35	1,34	1,34	1,34
4. Kota Salatiga	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,04	1,03	1,03	1,02	1,02
5. Kota Semarang	0,75	0,74	0,75	0,74	0,75	0,91	0,90	0,90	0,89	0,90
6. Kab. Grobogan	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44
KEDUNGSEPUR	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,22	1,21	1,21	1,21	1,19

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

D. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	53010,00	56200,00	58780,00	61550,00	64820,00	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	16330,00	17298,00	18274,79	19077,04	20002,21	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	37156,53	38352,16	38778,84	40923,23	42203,39	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	17936,17	19079,53	19772,21	20546,21	21480,22	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	134605,68	144287,72	153250	161535	171164,61	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	16271,55	17111,62	17919,28	18870,21	19965,72	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	275309,93	292329,03	306775,12	322501,69	339636,15	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	887580	928110	976550	1028920	1085270	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	1,95	1,97	1,95	1,93	1,92	1,57	1,56	1,56	1,56	1,57
2. Kab. Demak	1,00	1,01	1,01	1,00	0,99	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81
3. Kab. Semarang	1,17	1,16	1,11	1,11	1,08	0,94	0,92	0,89	0,90	0,89
4. Kota Salatiga	2,10	2,14	2,10	2,06	2,03	1,69	1,70	1,69	1,67	1,67
5. Kota Semarang	1,12	1,14	1,14	1,13	1,12	0,90	0,91	0,91	0,91	0,91
6. Kab. Grobogan	0,93	0,94	0,93	0,92	0,93	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76
KEDUNGSEPUR	1,24	1,26	1,24	1,23	1,22	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,79	0,80	0,81	0,82

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

E. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	21060	21510	22520	23620	24370	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	11147	11502	12234,63	12978,87	13662,86	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	22765,87	23299,73	24978,1	26330,59	27474,66	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	6571,97	6732,42	6974,76	7354,01	7633,20	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	104151,38	106996,06	110513	114495	120682,92	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	7492,64	7700,87	8139,35	8521,84	9059,32	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	173188,86	177741,08	185359,84	193300,31	202882,96	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	577260	589810	628210	658880	687980	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	1,19	1,18	1,16	1,15	1,14	0,99	0,98	0,99	1,00	0,99
2. Kab. Demak	1,04	1,06	1,05	1,06	1,07	0,87	0,88	0,90	0,92	0,93
3. Kab. Semarang	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	0,92	0,92	0,95	0,96	0,97
4. Kota Salatiga	1,18	1,19	1,15	1,15	1,14	0,98	0,99	0,99	1,00	0,99
5. Kota Semarang	1,33	1,33	1,28	1,25	1,24	1,11	1,11	1,09	1,08	1,08
6. Kab. Grobogan	0,66	0,66	0,66	0,65	0,66	0,55	0,55	0,56	0,57	0,58
KEDUNGSEPUR	1,20	1,20	1,17	1,15	1,15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	0,83	0,86	0,87	0,87

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

F. Sektor Konstruksi

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Konstruksi (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	1629140	1739410	1868910	1991960	2073770	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	1262143	1338124	1394882,7	1476596,2	1567325,14	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	3869078,2	4089818,39	4385485,65	4649525,13	4766554,31	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	1066758,78	1142391,98	1214060,16	1288650,39	1345373,36	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	28462910,37	30194987,34	32118682	34109911	35908409,94	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	884916,03	934380,36	986361,63	1034496,48	1092990,96	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	37174946,38	39439112,07	41968382,14	44551139,20	46754423,71	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	81286110	86589000	92762020	98393740	103262320	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	0,65	0,65	0,65	0,65	0,64	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37
2. Kab. Demak	0,84	0,84	0,81	0,81	0,82	0,46	0,46	0,45	0,45	0,46
3. Kab. Semarang	1,33	1,32	1,32	1,31	1,28	0,73	0,73	0,74	0,74	0,73
4. Kota Salatiga	1,36	1,37	1,36	1,35	1,34	0,74	0,75	0,76	0,76	0,76
5. Kota Semarang	2,59	2,56	2,51	2,48	2,46	1,41	1,41	1,40	1,40	1,39
6. Kab. Grobogan	0,55	0,55	0,54	0,53	0,53	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
KEDUNGSEPUR	1,83	1,82	1,79	1,78	1,76	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,55	0,55	0,56	0,56	0,57

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	3044750,00	3200580,00	3378700,00	3566380,00	3752650,00	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	2480423,00	2633483,00	2791938,77	2971780,86	3169161,35	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	3324419,62	3501752,00	3723073,65	3951296,12	4183515,34	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	1094504,89	1147816,61	1224668,72	1289891,57	1361415,88	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	16370904,88	17291740,51	18264413	19393067	20520786,24	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	3382977,48	3533658,09	3767444,62	4015289,06	4292117,11	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	29697979,87	31309030,21	33150238,76	35187704,61	37279645,92	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	115430120	121970810	129133510	136588140	144758380	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	0,86	0,85	0,85	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
2. Kab. Demak	1,16	1,17	1,17	1,17	1,18	1,13	1,14	1,15	1,16	1,18
3. Kab. Semarang	0,81	0,80	0,81	0,80	0,80	0,78	0,78	0,79	0,80	0,80
4. Kota Salatiga	0,99	0,98	0,98	0,97	0,97	0,96	0,95	0,97	0,96	0,96
5. Kota Semarang	1,05	1,04	1,03	1,02	1,00	1,02	1,02	1,01	1,01	1,00
6. Kab. Grobogan	1,48	1,47	1,48	1,48	1,49	1,44	1,44	1,45	1,46	1,49
KEDUNGSEPUR	1,03	1,03	1,02	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,97	0,98	0,99	1,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	831540,00	886880,00	948150,00	1022050,00	1107310,00	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	377709,00	395112,00	414366,37	445164,57	473254,21	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	883268,89	932667,36	996363,87	1075886,03	1164471,10	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	600659,93	641432,66	675182,52	724154,74	778443,87	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	3485869,01	3744878,27	4025898	4320766	4547720,42	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	710334,81	742451,16	798783,54	867601,69	956007,73	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	6889381,64	7343421,45	7858744,30	8455623,03	9027207,33	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	25064280,00	26633470,00	28350130,00	30667220,00	33469950,00	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	1,08	1,08	1,08	1,07	1,06	0,98	0,98	0,99	0,99	1,01
2. Kab. Demak	0,82	0,80	0,79	0,78	0,76	0,74	0,73	0,72	0,72	0,73
3. Kab. Semarang	0,99	0,98	0,98	0,98	0,97	0,90	0,89	0,89	0,90	0,92
4. Kota Salatiga	2,49	2,50	2,47	2,43	2,39	2,26	2,27	2,25	2,25	2,27
5. Kota Semarang	1,03	1,03	1,03	1,01	0,96	0,93	0,94	0,94	0,93	0,91
6. Kab. Grobogan	1,43	1,42	1,43	1,42	1,44	1,30	1,29	1,30	1,32	1,37
KEDUNGSEPUR	1,10	1,10	1,10	1,08	1,05	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91	0,91	0,91	0,92	0,95

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

J. Informasi dan Komunikasi

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	979870	1060960	1199100	1337650	1476150	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	337472	369157	424086,42	477155,35	536250,52	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	1145847,93	1239781,56	1411181,02	1580315,44	1729662,42	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	295,965,41	317,453,06	351,490,81	392,864,40	432,878,37	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	10341283,62	11229271,09	12400831	13921172	15505401,77	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	449960,76	481149,03	552421,98	640224,89	713196,71	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	13550399,72	14697771,74	16339111,23	18349382,08	20393539,79	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	33001270	35742560	40485500	45500920	50789280	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	0,97	0,96	0,96	0,95	0,93	0,59	0,59	0,60	0,60	0,60
2. Kab. Demak	0,55	0,56	0,56	0,56	0,57	0,34	0,34	0,35	0,36	0,36
3. Kab. Semarang	0,97	0,97	0,97	0,97	0,95	0,59	0,59	0,61	0,61	0,60
4. Kota Salatiga	0,93	0,92	0,90	0,89	0,87	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56
5. Kota Semarang	2,32	2,31	2,22	2,19	2,16	1,41	1,41	1,39	1,38	1,38
6. Kab. Grobogan	0,69	0,69	0,69	0,71	0,71	0,42	0,42	0,43	0,45	0,45
KEDUNGSEPUR	1,65	1,64	1,60	1,58	1,56	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,61	0,61	0,63	0,63	0,64

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

K. Jasa Keuangan dan Asuransi

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	979870	1060960	1199100	1337650	1476150	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	346838	372058	394771,15	413782,62	431986,26	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	969326,81	1050220,4	1109390,31	1153784,22	1196199,6	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	263701,1387	289309,28	305383,8454	316866,2487	327705,4376	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	4448461,88	4729220,91	5041604	5204954	5364004,67	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	617903,5	665973,46	715919,54	744740,83	773097,11	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	7626101,33	8167742,05	8766168,85	9171777,92	9569143,08	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	21636630	23533410	24749920	25635550	26535010	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	1,48	1,46	1,57	1,68	1,79	1,04	1,06	1,12	1,20	1,27
2. Kab. Demak	0,87	0,86	0,86	0,87	0,88	0,61	0,62	0,61	0,62	0,62
3. Kab. Semarang	1,26	1,25	1,25	1,25	1,25	0,89	0,90	0,89	0,89	0,89
4. Kota Salatiga	1,27	1,28	1,28	1,27	1,27	0,90	0,92	0,91	0,91	0,90
5. Kota Semarang	1,52	1,48	1,48	1,46	1,43	1,08	1,06	1,05	1,04	1,02
6. Kab. Grobogan	1,44	1,44	1,46	1,46	1,47	1,02	1,04	1,04	1,04	1,05
KEDUNGSEPUR	1,41	1,39	1,40	1,40	1,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,71	0,72	0,71	0,71	0,71

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

L. Real Estate

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Real Estate (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	236770,00	252710,00	272420,00	287420,00	303370,00	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	201861,00	215567,00	228230,04	242638,80	255846,46	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	928130,16	988845,76	1056001,18	1119614,80	1180461,54	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	413977,83	443008,21	465791,50	490732,91	509069,79	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	3299749,11	3561449,44	3866353	4102158	4338390,91	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	379163,16	402061,56	423395,13	445455,19	474781,54	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	5459651,26	5863641,97	6312190,85	6688019,70	7061920,24	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	14822300	15831480	16856960	17797500	18782400	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
2. Kab. Demak	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,50	0,50	0,49	0,50	0,50
3. Kab. Semarang	1,76	1,75	1,75	1,75	1,74	1,19	1,18	1,18	1,19	1,19
4. Kota Salatiga	2,90	2,91	2,86	2,84	2,78	1,97	1,97	1,93	1,93	1,90
5. Kota Semarang	1,65	1,65	1,66	1,65	1,63	1,11	1,12	1,12	1,12	1,12
6. Kab. Grobogan	1,29	1,29	1,27	1,26	1,27	0,88	0,87	0,86	0,85	0,87
KEDUNGSEPUR	1,48	1,48	1,48	1,48	1,46	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,68	0,68	0,67	0,68	0,68

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

M,N. Jasa Perusahaan

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Jasa Perusahaan (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	65500	72210	78500	85400	94040	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	35900	38869	42015,47	45731,72	49885,35	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	131243,02	143903,69	156562,99	171073,08	187759,28	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	84092,70	92253,74	101940,34	112711,71	124170,73	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	648834,69	706231,85	775945	859075	940653,53	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	39741,21	42444,56	45486,68	49657,39	54716,6	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	1005311,62	1095912,84	1200450,48	1323648,90	1451225,49	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	2141140	3032330	3296660	3609300	3989820	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	1,00	0,77	0,77	0,76	0,76	0,53	0,54	0,53	0,53	0,53
2. Kab. Demak	0,91	0,69	0,69	0,68	0,67	0,48	0,48	0,48	0,47	0,48
3. Kab. Semarang	1,72	1,33	1,33	1,32	1,31	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92
4. Kota Salatiga	4,08	3,16	3,20	3,22	3,19	2,17	2,19	2,22	2,24	2,26
5. Kota Semarang	2,24	1,71	1,71	1,71	1,67	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18
6. Kab. Grobogan	0,94	0,71	0,70	0,69	0,69	0,50	0,49	0,48	0,48	0,49
KEDUNGSEPUR	1,88	1,44	1,44	1,44	1,42	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,53	0,69	0,69	0,69	0,71

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

0. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	499220	511040	523940	541640	561760	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	536090	548062	559461,65	577672,12	599770,11	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	815548,02	832883,58	854232,36	895625,32	918582,32	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	420903,90	431216,05	431756,4	454269,83	473920,09	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	3422191,43	3597407,63	3793826	3933818	4087630,57	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	554725,40	570846,43	585332,49	598876,61	621795,77	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	6248678,753	6491455,69	6748548,9	7001901,88	7263458,86	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	22194690	22720440	23304540	24137860	25033500	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	0,73	0,73	0,73	0,72	0,72	0,65	0,64	0,63	0,63	0,64
2. Kab. Demak	1,31	1,31	1,29	1,29	1,29	1,16	1,14	1,13	1,13	1,14
3. Kab. Semarang	1,03	1,03	1,02	1,03	1,02	0,91	0,90	0,89	0,91	0,90
4. Kota Salatiga	1,97	1,97	1,92	1,94	1,94	1,75	1,73	1,68	1,70	1,72
5. Kota Semarang	1,14	1,16	1,18	1,17	1,15	1,01	1,02	1,03	1,03	1,02
6. Kab. Grobogan	1,26	1,28	1,27	1,25	1,25	1,12	1,12	1,11	1,10	1,11
KEDUNGSEPUR	1,13	1,14	1,15	1,14	1,13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,89	0,88	0,87	0,88	0,89

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

P. Jasa Pendidikan

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Jasa Pendidikan (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	565720	609030	660170	710220	763120	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	582749	623552	673857,96	729397,13	786466,7	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	953978,04	1026876,36	1110330,82	1191989,94	1277678,03	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	335797,55	359878,23	384102,52	410477,56	438422,44	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	2510834,89	2704344,41	2940945	3257655	3368213,94	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	712160,4	753687,48	795963,89	853470,6	915566,12	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	5661239,88	6077368,48	6565370,19	7153210,23	7549467,23	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	29324080	31479470	33674590	36286320	39040750	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,81	0,81	0,82	0,81	0,83
2. Kab. Demak	1,08	1,07	1,08	1,08	1,09	1,39	1,39	1,40	1,40	1,44
3. Kab. Semarang	0,91	0,91	0,92	0,91	0,91	1,18	1,19	1,19	1,18	1,21
4. Kota Salatiga	1,19	1,19	1,18	1,17	1,15	1,54	1,54	1,53	1,51	1,53
5. Kota Semarang	0,63	0,63	0,63	0,64	0,61	0,82	0,82	0,82	0,83	0,81
6. Kab. Grobogan	1,23	1,22	1,20	1,18	1,18	1,59	1,58	1,55	1,53	1,57
KEDUNGSEPUR	0,77	0,77	0,77	0,77	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,29	1,30	1,30	1,29	1,33

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	151460	166390	181990	196840	209700	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	108464	116471	126186,88	136992,35	148078,01	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	193057,19	210309,16	230198,23	250745,04	266818,54	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	108721,64	118663,18	128670,47	139154,33	148676,28	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	758573,85	818390,9	922444	1052235	1068683,44	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	151367,3	160404,7	174701,11	191232,91	204689,96	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	1471643,98	1590628,94	1764190,69	1967199,63	2046646,23	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	6307620	6929500	7525670	8187910	8738370	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	0,78	0,78	0,78	0,77	0,77	0,84	0,85	0,84	0,82	0,84
2. Kab. Demak	0,93	0,91	0,90	0,90	0,91	0,99	0,99	0,97	0,96	1,00
3. Kab. Semarang	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,92	0,93	0,92	0,90	0,93
4. Kota Salatiga	1,79	1,78	1,77	1,75	1,75	1,92	1,94	1,91	1,86	1,91
5. Kota Semarang	0,89	0,87	0,89	0,92	0,86	0,95	0,95	0,96	0,98	0,95
6. Kab. Grobogan	1,21	1,18	1,17	1,18	1,18	1,30	1,28	1,27	1,25	1,29
KEDUNGSEPUR	0,94	0,92	0,93	0,94	0,91	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,07	1,09	1,08	1,06	1,10

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

R,S,T,U. Jasa Lainnya

Kabupaten/Kota	PDRB Sektor Jasa Lainnya (Juta Rp)					Total PDRB (Miliar Rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	317990	345510	378510	411510	444520	24762,33	26139,5	27649,78	29245,66	30908,49
2. Kab. Demak	391519	418246	447326,35	481609,59	524814,68	14913	15672,48	16584,12	17479,88	18417,01
3. Kab. Semarang	342646,88	371575,56	418056,84	459572,97	499426,72	28768,33	30292,47	32002,98	33855,68	35747,01
4. Kota Salatiga	77250,08	82974,37	90789,60	99155,21	108001,91	7759,18	8168,24	8624,24	9127,75	9664,5
5. Kota Semarang	1229003,88	1316157,05	1437912	1575377	1719366,12	109110,69	115542,56	123279,89	131317,63	140326,26
6. Kab. Grobogan	445931,47	475348,51	517456,42	563940,55	617357,28	15962,62	16682,63	17659,25	18688,57	19692,61
KEDUNGSEPUR	2804341,311	3009811,49	3290051,21	3591165,323	3913486,708	201276,15	212497,88	225800,28	239715,17	254755,88
JAWA TENGAH	12300030	13362350	14561840	15937470	17375660	806765,09	849099,35	893750,3	941164,12	992105,79
Kabupaten/Kota	LQ terhadap Provinsi Jawa Tengah					LQ terhadap Kedungsepur				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1. Kab. Kendal	0,84	0,84	0,84	0,83	0,82	0,92	0,93	0,94	0,94	0,94
2. Kab. Demak	1,72	1,70	1,66	1,63	1,63	1,88	1,88	1,85	1,84	1,86
3. Kab. Semarang	0,78	0,78	0,80	0,80	0,80	0,85	0,87	0,90	0,91	0,91
4. Kota Salatiga	0,65	0,65	0,65	0,64	0,64	0,71	0,72	0,72	0,73	0,73
5. Kota Semarang	0,74	0,72	0,72	0,71	0,70	0,81	0,80	0,80	0,80	0,80
6. Kab. Grobogan	1,83	1,81	1,80	1,78	1,79	2,01	2,01	2,01	2,01	2,04
KEDUNGSEPUR	0,91	0,90	0,89	0,88	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
JAWA TENGAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,09	1,11	1,12	1,13	1,14

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 diolah (Penulis, 2020).

Lampiran 2. Jalan Provinsi Jawa Tengah



Lampiran 3. Hasil Rinci Perhitungan Persentase Kontribusi Sektor Ekonomi Kedungsepur Tahun 2015 - 2019

B. Kabupaten Kendal

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kendal (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010					Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kendal					Rata - Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5293295,38	5439635,39	5617425,38	5784865,38	6049815,38	21,38	20,81	20,32	19,78	19,57	20,37
B. Pertambangan dan Penggalian	117945,59	221683,34	269651,58	290601,58	307101,58	0,48	0,85	0,98	0,99	0,99	0,86
C. Industri Pengolahan	9977893,54	10505620,53	11076050,47	11763810,9	12440172,22	40,29	40,19	40,06	40,22	40,25	40,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	53006,04	56202,05	58778,9	61548,43	64819,93	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21055,43	21512,95	22520,15	23620,15	24370,15	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F. Konstruksi	1629144,78	1739413,2	1868908,35	1991958,35	2073768,35	6,58	6,65	6,76	6,81	6,71	6,70
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3044750,11	3200580,71	3378702,01	3566378,06	3752648,06	12,30	12,24	12,22	12,19	12,14	12,22
H. Transportasi dan Pergudangan	530026,39	563781,17	603582,68	642616,58	694461,27	2,14	2,16	2,18	2,20	2,25	2,18
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	831535,42	886876,39	948148,64	1022048,64	1107313,64	3,36	3,39	3,43	3,49	3,58	3,45

J. Informasi dan Komunikasi	979866,65	1060960,28	1199100,15	1337651,1	1476151,1	3,96	4,06	4,34	4,57	4,78	4,34
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	447148,08	486262,35	511388,41	527539,48	541355,94	1,81	1,86	1,85	1,80	1,75	1,81
L. Real Estate	236770,73	252709,43	272415,49	287415,49	303365,49	0,96	0,97	0,99	0,98	0,98	0,97
M,N. Jasa Perusahaan	65496,23	72210,02	78499,07	85399,07	94039,07	0,26	0,28	0,28	0,29	0,30	0,28
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	499217,86	511043,35	523938	541638	561763	2,02	1,96	1,89	1,85	1,82	1,91
P. Jasa Pendidikan	565719,83	609025,27	660174,07	710224,07	763124,07	2,28	2,33	2,39	2,43	2,47	2,38
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151459,96	166392,66	181985,25	196840,25	209700,25	0,61	0,64	0,66	0,67	0,68	0,65
R,S,T,U. Jasa lainnya	317993,34	345505,86	378508,47	411508,97	444516,97	1,28	1,32	1,37	1,41	1,44	1,36
PDRB Kab. Demak	24762325,36	26139414,95	27649777,07	29245664,5	30908486,47	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kendal, 2020 diolah (Penulis, 2020).

C. Kabupaten Demak

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Demak (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010					Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Demak					Rata - Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3568630	3534945	3677920,03	3701175,22	3698068,9	23,93	22,56	22,18	21,17	20,08	21,98
B. Pertambangan dan Penggalian	60464	61135	69453,39	76074,02	77527,86	0,41	0,39	0,42	0,44	0,42	0,41
C. Industri Pengolahan	4144101	4502627	4804846,2	5131972,2	5487466,08	27,79	28,73	28,97	29,36	29,80	28,93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	16330	17298	18274,79	19077,04	20002,21	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11147	11502	12234,63	12978,87	13662,86	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
F. Konstruksi	1262143	1338124	1394882,7	1476596,2	1567325,14	8,46	8,54	8,41	8,45	8,51	8,47
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2480423	2633483	2791938,77	2971780,86	3169161,35	16,63	16,80	16,84	17,00	17,21	16,90
H. Transportasi dan Pergudangan	451160	476276	504271,52	540078,72	577443,29	3,03	3,04	3,04	3,09	3,14	3,07
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	377709	395112	414366,37	445164,57	473254,21	2,53	2,52	2,50	2,55	2,57	2,53
J. Informasi dan Komunikasi	337472	369157	424086,42	477155,35	536250,52	2,26	2,36	2,56	2,73	2,91	2,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	346838	372058	394771,15	413782,62	431986,26	2,33	2,37	2,38	2,37	2,35	2,36

L. Real Estate	201861	215567	228230,04	242638,8	255846,46	1,35	1,38	1,38	1,39	1,39	1,38
M,N. Jasa Perusahaan	35900	38869	42015,47	45731,72	49885,35	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,25
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	536090	548062	559461,65	577672,12	599770,11	3,59	3,50	3,37	3,30	3,26	3,41
P. Jasa Pendidikan	582749	623552	673857,96	729397,13	786466,7	3,91	3,98	4,06	4,17	4,27	4,08
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108464	116471	126186,88	136992,35	148078,01	0,73	0,74	0,76	0,78	0,80	0,76
R,S,T,U. Jasa lainnya	391519	418246	447326,35	481609,59	524814,68	2,63	2,67	2,70	2,76	2,85	2,72
PDRB Kab. Demak	14913000	15672482	16584124,32	17479877,38	18417009,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Demak, 2020 diolah (Penulis, 2020).

D. Kabupaten Semarang

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Semarang (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010					Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Semarang					Rata - Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3285727,69	3382746,05	3477134,02	3576417,71	3623520,67	11,42	11,17	10,87	10,56	10,14	10,83
B. Pertambangan dan Penggalian	65774,74	68816,48	72018,57	75778,9	79084,72	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,23
C. Industri Pengolahan	11156214,25	11719709,2	12221519,53	12862545,69	13761168,63	38,78	38,69	38,19	37,99	38,50	38,43
D. Pengadaan Listrik dan Gas	37156,53	38352,16	38778,84	40923,23	42203,39	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22765,87	23299,73	24978,1	26330,59	27474,66	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F. Konstruksi	3869078,2	4089818,39	4385485,65	4649525,13	4766554,31	13,45	13,50	13,70	13,73	13,33	13,54
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3324419,62	3501752	3723073,65	3951296,12	4183515,34	11,56	11,56	11,63	11,67	11,70	11,62
H. Transportasi dan Pergudangan	644143,45	670910,56	717679,01	774255,13	842429,57	2,24	2,21	2,24	2,29	2,36	2,27
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	883268,89	932667,36	996363,87	1075886,03	1164471,1	3,07	3,08	3,11	3,18	3,26	3,14
J. Informasi dan Komunikasi	1145847,93	1239781,56	1411181,02	1580315,44	1729662,42	3,98	4,09	4,41	4,67	4,84	4,40

K. Jasa Keuangan dan Asuransi	969326,81	1050220,4	1109390,31	1153784,22	1196199,6	3,37	3,47	3,47	3,41	3,35	3,41
L. Real Estate	928130,16	988845,76	1056001,18	1119614,8	1180461,54	3,23	3,26	3,30	3,31	3,30	3,28
M,N. Jasa Perusahaan	131243,02	143903,69	156562,99	171073,08	187759,28	0,46	0,48	0,49	0,51	0,53	0,49
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	815548,02	832883,58	854232,36	895625,32	918582,32	2,83	2,75	2,67	2,65	2,57	2,69
P. Jasa Pendidikan	953978,04	1026876,36	1110330,82	1191989,94	1277678,03	3,32	3,39	3,47	3,52	3,57	3,45
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193057,19	210309,16	230198,23	250745,04	266818,54	0,67	0,69	0,72	0,74	0,75	0,71
R,S,T,U. Jasa lainnya	342646,88	371575,56	418056,84	459572,97	499426,72	1,19	1,23	1,31	1,36	1,40	1,30
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	28768327,3	30292468	32002984,99	33855679,34	35747010,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, 2020 diolah (Penulis, 2020).

E. Kota Salatiga

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010					Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga					Rata - Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	376.804.16	385.019.54	393.926.69	411.846.04	424.948.93	4.86	4.71	4.57	4.51	4.40	4.61
B. Pertambangan dan Penggalian	3.358.23	3.357.52	3.356.55	3.350.96	3.396.51	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
C. Industri Pengolahan	2.321.817.06	2.407.848.71	2.530.035.15	2.649.361.11	2.815.202.59	29.92	29.48	29.34	29.03	29.13	29.38
D. Pengadaan Listrik dan Gas	17.936.17	19.079.53	19.772.21	20.546.21	21.480.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.571.97	6.732.42	6.974.76	7.354.01	7.633.20	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
F. Konstruksi	1.066.758.78	1.142.391.98	1.214.060.16	1.288.650.39	1.345.373.36	13.75	13.99	14.08	14.12	13.92	13.97
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.094.504.89	1.147.816.61	1.224.668.72	1.289.891.57	1.361.415.88	14.11	14.05	14.20	14.13	14.09	14.12
H. Transportasi dan Pergudangan	270.360.17	279.806.81	296.338.73	316.362.34	343.761.08	3.48	3.43	3.44	3.47	3.56	3.47
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	600.659.93	641.432.66	675.182.52	724.154.74	778.443.87	7.74	7.85	7.83	7.93	8.05	7.88
J. Informasi dan Komunikasi	295.965.41	317.453.06	351.490.81	392.864.40	432.878.37	3.81	3.89	4.08	4.30	4.48	4.11

K. Jasa Keuangan dan Asuransi	263.701.14	289.309.28	305.383.85	316.866.25	327.705.44	3.40	3.54	3.54	3.47	3.39	3.47
L. Real Estate	413.977.83	443.008.21	465.791.50	490.732.91	509.069.79	5.34	5.42	5.40	5.38	5.27	5.36
M,N. Jasa Perusahaan	84.092.70	92.253.74	101.940.34	112.711.71	124.170.73	1.08	1.13	1.18	1.23	1.28	1.18
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	420.903.90	431.216.05	431.756.40	454.269.83	473.920.09	5.42	5.28	5.01	4.98	4.90	5.12
P. Jasa Pendidikan	335.797.55	359.878.23	384.102.52	410.477.56	438.422.44	4.33	4.41	4.45	4.50	4.54	4.44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108.721.64	118.663.18	128.670.47	139.154.33	148.676.28	1.40	1.45	1.49	1.52	1.54	1.48
R,S,T,U. Jasa lainnya	77.250.08	82.974.37	90.789.60	99.155.21	108.001.91	1.00	1.02	1.05	1.09	1.12	1.05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.759.181.62	8.168.241.90	8.624.240.98	9.127.749.57	9.664.500.70	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kota Salatiga, 2020 diolah (Penulis, 2020).

F. Kota Semarang

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010					Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kota Semarang					Rata - Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1025273,5	1043687,42	1037037	1068074	1089568,62	0,94	0,90	0,84	0,81	0,78	0,85
B. Pertambangan dan Penggalian	183860,2	172256,37	159733	146381	169460,22	0,17	0,15	0,13	0,11	0,12	0,14
C. Industri Pengolahan	28737827,51	29989940,02	31740254	33249531	36067728,68	26,34	25,96	25,75	25,32	25,70	25,81
D. Pengadaan Listrik dan Gas	134605,68	144287,72	153250	161535	171164,61	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	104151,38	106996,06	110513	114495	120682,92	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
F. Konstruksi	28462910,37	30194987,34	32118682	34109911	35908409,94	26,09	26,13	26,05	25,98	25,59	25,97
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16370904,88	17291740,51	18264413	19393067	20520786,24	15,00	14,97	14,82	14,77	14,62	14,84
H. Transportasi dan Pergudangan	3946353,73	4191313,58	4490252	4847427	5338390,25	3,62	3,63	3,64	3,69	3,80	3,68
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3485869,01	3744878,27	4025898	4320766	4547720,42	3,19	3,24	3,27	3,29	3,24	3,25
J. Informasi dan Komunikasi	10341283,62	11229271,09	12400831	13921172	15505401,77	9,48	9,72	10,06	10,60	11,05	10,18

K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4448461,88	4729220,91	5041604	5204954	5364004,67	4,08	4,09	4,09	3,96	3,82	4,01
L. Real Estate	3299749,11	3561449,44	3866353	4102158	4338390,91	3,02	3,08	3,14	3,12	3,09	3,09
M,N. Jasa Perusahaan	648834,69	706231,85	775945	859075	940653,53	0,59	0,61	0,63	0,65	0,67	0,63
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3422191,43	3597407,63	3793826	3933818	4087630,57	3,14	3,11	3,08	3,00	2,91	3,05
P. Jasa Pendidikan	2510834,89	2704344,41	2940945	3257655	3368213,94	2,30	2,34	2,39	2,48	2,40	2,38
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	758573,85	818390,9	922444	1052235	1068683,44	0,70	0,71	0,75	0,80	0,76	0,74
R,S,T,U. Jasa lainnya	1229003,88	1316157,05	1437912	1575377	1719366,12	1,13	1,14	1,17	1,20	1,23	1,17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	109110689,6	115542560,6	123279892	131317632	140326256,9	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Semarang, 2020 diolah (Penulis, 2020).

G. Kabupaten Grobogan

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Grobogan (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010					Persentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Grobogan					Rata - Rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4821978,84	4945935,34	5092068,97	5161262,27	5130657,24	30,21	29,65	28,84	27,62	26,05	28,47
B. Pertambangan dan Penggalian	177664,97	181847,14	189656,52	201622,38	220236,5	1,11	1,09	1,07	1,08	1,12	1,09
C. Industri Pengolahan	1796951,74	1893484,71	2052872,11	2290245,39	2494834,78	11,26	11,35	11,62	12,25	12,67	11,83
D. Pengadaan Listrik dan Gas	16271,55	17111,62	17919,28	18870,21	19965,72	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7492,64	7700,87	8139,35	8521,84	9059,32	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
F. Konstruksi	884916,03	934380,36	986361,63	1034496,48	1092990,96	5,54	5,60	5,59	5,54	5,55	5,56
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3382977,48	3533658,09	3767444,62	4015289,06	4292117,11	21,19	21,18	21,33	21,49	21,80	21,40
H. Transportasi dan Pergudangan	813078,16	874144,68	935331,03	1003059,08	1101544,34	5,09	5,24	5,30	5,37	5,59	5,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	710334,81	742451,16	798783,54	867601,69	956007,73	4,45	4,45	4,52	4,64	4,85	4,58
J. Informasi dan Komunikasi	449960,76	481149,03	552421,98	640224,89	713196,71	2,82	2,88	3,13	3,43	3,62	3,18

K. Jasa Keuangan dan Asuransi	617903,5	665973,46	715919,54	744740,83	773097,11	3,87	3,99	4,05	3,99	3,93	3,97
L. Real Estate	379163,16	402061,56	423395,13	445455,19	474781,54	2,38	2,41	2,40	2,38	2,41	2,40
M,N. Jasa Perusahaan	39741,21	42444,56	45486,68	49657,39	54716,6	0,25	0,25	0,26	0,27	0,28	0,26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	554725,4	570846,43	585332,49	598876,61	621795,77	3,48	3,42	3,31	3,20	3,16	3,31
P. Jasa Pendidikan	712160,4	753687,48	795963,89	853470,6	915566,12	4,46	4,52	4,51	4,57	4,65	4,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	151367,3	160404,7	174701,11	191232,91	204689,96	0,95	0,96	0,99	1,02	1,04	0,99
R,S,T,U. Jasa lainnya	445931,47	475348,51	517456,42	563940,55	617357,28	2,79	2,85	2,93	3,02	3,13	2,95
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	15962619,43	16682629,7	17659254,29	18688567,37	19692614,79	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan, 2020 diolah (Penulis, 2020).